Proyek Riset G-20:

Peran Indonesia dalam G-20:
Latarbelakang, Peran dan Tujuan Keanggotaan Indonesia

Tim Riset G-20
Yulius P Hermawan (Koordinator)
Wulani Sriyuliani
Getruida H Hardjowijono
Sylvie Tanaga

Diterbitkan oleh

Proyek Riset G-20
Peran Indonesia dalam G-20:
Latarbelakang, Peran dan Tujuan
Keanggotaan Indonesia

Yulius P Hermawan
Tim Riset G-20

Diterbitkan oleh
Friedrich Ebert Stiftung, Kantor Perwakilan Indonesia bekerjasama
dengan Departemen Hubungan Internasional Universitas Parahyangan

Desain & Layout:
Malhaf Budiharto [Komunitas Pejaten]

Cetakan Pertama, Mei 2011

ISBN: 978-602-8866-03-3

Friedrich-Ebert-Stiftung
Indonesia Office
Jl. Kemang Selatan II No. 2A
Jakarta Selatan 12730
DKI Jakarta - Indonesia
Tel. +62 (0)21 7193 711
Fax +62 (0)21 7179 1358
E-mail:info@fes.or.id.

Pendahuluan

G-20 sudah memulai aktivitasnya sejak dibentuk pada tahun 1999 di Jerman. Namun forum intergovernmental ini baru dikenal komunitas internasional secara luas terutama sejak tahun 2008 ketika pemimpin-pemimpinnya memutuskan mengubah tingkat pertemuannya dari level menteri ke level Kepala Negara/ Kepala Pemerintahan. G-20 menjadi high profile forum dengan digelarnya KTT pertama di Washington. Pemimpin pun bersepakat untuk mengadakan pertemuan KTT dua kali dalam setahun dengan agenda urgent untuk mengatasi krisis finansial yang melanda dunia.

Profil G-20 semakin meroket ketika pemimpin-pemimpin G-20 bersepakat untuk menjadikan G-20 sebagai *premier forum for economic cooperation* (forum utama kerjasama ekonomi). Puluhan komitmen telah dibuat dan implementasinya telah diupayakan oleh masing-masing anggota G-20. Setiap anggota dituntut untuk memperkuat lembaga keuangan domestik mereka melalui permodalan yang kokoh dari hantaman krisis likuiditas, untuk membuat kebijakan fiskal yang transparan dan akuntabel, kebijakan perdagangan yang anti proteksionisme, dan lain-lain. Reformasi lembaga keuangan internasional seperti *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank* (Bank Dunia) merupakan inisiatif terpenting di antara inisiatif-inisiatif yang mendesak dan penting lainnya dalam penataan arsitektur finansial global.

Banyak negara saat ini telah mengakui peran penting G-20 dalam menghadapi krisis ekonomi yang buruk dan statusnya sebagai forum utama dalam tata pengaturan finansial global. Sebagai contoh, organisasi regional seperti ASEAN dan forum eksklusif seperti BRIC telah memberikan harapan dan kredit bagi forum ini seperti yang terlihat dalam komunike-komunike mereka.

G-20 dibangun sebagai terobosan baru dalam kerjasama multilateralisme. Jumlah anggotanya yang 20 dipandang signifikan dan sistemik. Keduapuluh anggota secara keseluruhan menguasai 80 persen lebih perekonomian dunia yang ditandai dengan pertumbuhan GNP, penguasaan aliran investasi asing, pasar, perdagangan dunia dan populasi dunia. Asumsi yang diyakini adalah bahwa bila perekonomian di keduapuluh anggota ini sehat, maka akan sehat pula perekonomian seluruh dunia. Sehingga, keberhasilan forum ini akan membawa dampak sistemik yang signifikan bagi negara-negara dan entitas ekonomi dunia yang saat ini tidak menjadi anggota G-20. Pertumbuhan ekonomi di keduapuluh anggota ini akan membawa pertumbuhan yang stabil di negara-negara lain.

Forum ini dipandang lebih baik dibandingkan dengan G-8 dalam pengertian jumlah keanggotaan. G-20 lebih merefleksikan perkembangan kekuatan-kekuatan ekonomi dunia terkini, yang ditunjukkan dengan keanggotaan beberapa negara yang perekonomiannya tumbuh sangat pesat beberapa decade belakangan ini. Forum ini juga dipandang lebih luwes dibanding dengan kerjasama-kerjasama multilateral lain yang beranggotakan massif. PBB sebagai contoh telah dipuji sebagai organisasi yang legitimasinya kuat karena merangkul hamper seluruh bangsa di dunia, namun dikritik karena seringkali lamban dalam menciptakan kemajuan-kemajuan yang cepat dan tepat; PBB telah membuat puluhan deklarasi tetapi hanya sedikit yang diimplementasikan penuh.

Dengan asumsi ini G-20 tampaknya akan tetap mempertahankan ekslusivitas jumlah anggotanya. Dua tuntutan muncul sebagai implikasi dari keyakinan akan ekslusivitas ini. Pertama bahwa G-20 harus bisa membuktikan kemampuannya untuk membuat resep-resep yang manjur bagi pemulihan perekonomian dunia dari krisis finansial dan kemudian mampu menciptakan tatanan perekonomian dunia yang stabil dan adil melalui penguatan lembaga-lembaga keuangan internasional yang ada. Kedua bahwa G-20 berkepentingan untuk menjamin bahwa tingkat pertumbuhan perekonomian di keduapuluh

anggotanya akan berpengaruh positif bagi perekonomian di negara-negara non anggotanya. Bukan sebaliknya: pertumbuhan ekslusif yang merugikan negara-negara non anggota G-20. G-20 seyogyanya menjadi forum ekslusif dalam pengertian jumlah keanggotaan, namun memberikan manfaat yang inklusif bagi seluruh bangsa.

Indonesia telah menjadi anggota G-20 sejak forum *intergovernmental* ini dibentuk di tahun 1999. Bagi Indonesia klub ekslusif ini merupakan arena bergengsi tinggi di mana Indonesia dapat mencapai kepentingan-kepentingan nasionalnya. Namun Indonesia juga memahami posisi unik dan tanggungjawab vitalnya untuk mewakili negara-negara berkembang. Pertama, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang karena pertumbuhan ekonominya tercatat cukup penting di antara negara-negara berkembang lainnya dimasukkan dalam kategori *emerging economy*; sebagai *emerging economy* Indonesia mendapat hak istimewa untuk duduk dalam klub tersebut. Kedua, Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat setelah China, Amerika Serikat dan India. Ketiga, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan karenanya dapat memainkan peran potensial untuk menjembatani perbedaan-perbedaan di antara peradaban dunia. Keanggotaan Indonesia dalam klub dapat membantu memperbaiki citra tentang perbedaan antara Barat dan Islam.

Keempat, Indonesia merupakan negara demokrasi baru yang dalam proses konsolidasi. Keanggotaan Indonesia dapat memberikan inspirasi ke negara-negara lain untuk mempromosikan demokrasi dan mempertahankan perumbuhan ekonomi tinggi. Kelima, secara geografis Indonesia memiliki posisi yang signifikan. Indonesia merupakan satu-satunya anggota ASEAN yang menjadi anggota tetap G-20. Tentu saja bisa ditambahkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang di masa lalu pernah terpuruk oleh krisis ekonomi yang dahsyat dan kini telah berhasil mengatasinya dengan relatif baik.

Keunikan ini diyakini menjadi alasan kuat dipilihnya Indonesia dalam G-20. Selain potensinya sebagai *global buyer* yang besar di dunia karena jumlah penduduknya yang besar, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil akan berdampak sistemik ke stabilitas pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, dan lebih lanjut memberikan kontribusi stabilitas perekonomian di Asia dan dunia. Keberhasilan Indonesia akan menjadi model yang menarik pula bagi penguatan sistem demokrasi liberal di dunia. Ini

akan menginspirasikan suatu proses demokratisasi yang ideal yang ditopang oleh penguatan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Kehadiran Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim memberikan citra positif bagi G-20 terutama untuk menangkis persepsi negatif dari tesis *clash of civilization* (benturan peradaban) antara peradaban Barat dan Islam. G-20 adalah antitesis perbenturan peradaban yang menunjukkan bahwa Barat siap bekerjasama dengan negara-negara Muslim.

Memiliki sejumlah keunikan ini, tugas Indonesia menjadi ganda. Selain memperjuangkan kepentingan nasionalnya, Indonesia 'diharapkan' dapat memadukan kepentingan negara-negara berkembang secara umum dan kepentingan-kepentingan negara-negara di Asia Tenggara dan dunia Muslim secara khusus. Kalau Indonesia berhasil memainkan peran ganda ini, Indonesia dapat berkontribusi dalam menjawab inti persoalan legitimasi yang selama ini menghantui G-20. Pertanyaannya adalah: apakah Indonesia dapat memenuhi harapan-harapan tinggi ini?

Penelitian ini telah mengeksplorasi berbagai pendapat tentang eksistensi G-20 sebagai forum utama kerjasama ekonomi internasional di antara negara-negara maju dan berkembang dan tentang peran Indonesia dalam forum utama kerjasama ekonomi tersebut. Sejumlah wawancara telah dilakukan dan sejumlah dokumen telah dikaji untuk mencari jawab terkait posisi negara-negara terhadap forum *intergovernmental* dan posisi dan peran Indonesia dalam forum intergovernmental ini.

Serangkaian *wawancara* dengan sekitar 35 responden telah dilakukan dalam penelitian ini untuk menjawab: 1. Apakah responden setuju terhadap peran G-20 sebagai forum utama kerjasama ekonomi dan bagaimana pandangan responden tentang kemampuan G-20 untuk mengatasi krisis ekonomi; 2. Apakah kepentingan Indonesia dalam G-20? Bagaimana Indonesia mewujudkan kepentingan nasionalnya dalam G-20? Bagaimana Indonesia memenuhi komitmen-komitmen yang telah dibuat dalam G-20 sebagai upaya pemenuhan kepentingan nasional Indonesia? 3. Bagaimana Indonesia memainkan peran gandanya untuk membawa ASEAN dan dunia Islam dalam forum G-20? 4. Bagaimana G-20 sebagai forum *intergovernmental* dapat merangkul lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam proses pembuatan komitmennya?

Penelitian ini juga mengkaji puluhan dokumen yang dikeluarkan oleh G-20, dokumen-dokumen pemerintah dan *background paper* yang terkait dengan

G-20 dan mempelajari sejumlah analisa pengamat dan informasi-informasi yang dipublikasikan di media terkait dengan proses G-20. Dokumen-dokumen tersebut dianalisa secara kualitatif untuk menjawab lima pertanyaan utama penelitian tersebut.

Untuk mempertajam penemuan riset, tim riset dan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) menyelenggarakan suatu *Focus Group Discussion* (FGD) pada tanggal 4 Nopember 2010 yang dihadiri sekitar enampuluh peserta. Mereka mewakili lembaga-lembaga pemerintahan, LSM, kedutaan-kedutaan besar asing untuk Indonesia, lembaga-lembaga internasional, peneliti dan akademisi. Diskusi ini juga menjadi forum khusus di mana pemerintah, LSM dan akademisi dapat mensharingkan pandangan-pandangan mereka tentang proses G-20 dan posisi pemerintah Indonesia. Ketua Sherpa G-20 Indonesia, aktivis-aktivis LSM terkemuka, jurnalis dan akademisi mengemukakan pandangan kritis yang konstruktif mereka tentang kemajuan yang telah dicapai dalam proses G-20. Para peserta lain memberikan tanggapan mereka yang kritis terhadap berbagai aspek.

Laporan hasil penelitian ini mepresentasikan hasil kajian tim peneliti G-20 atas transkrip dan laporan wawancara, dokumen-dokumen, analisa pengamat/peneliti lain dan informasi-informasi yang tersedia di media dan sekaigus juga beragam ide, komentar dan usulan-usulan yang disampaikan dalam FGD tentang “G-20 dan Agenda Pembangunan”. Laporan ini menyoroti beragam pandangan dari para responden penelitian. Ini juga memaparkan deskripsi tentang G-20, politik luar negeri Indonesia, ASEAN, dunia Muslim dan LSM sehingga para pembaca memperoleh gambaran yang lengkap tentang Indonesia, peran Indonesia dan LSM. Laporan ini juga mengemukakan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat efektivitas G-20, beberapa penilaian tentang peran potensial LSM dalam forum intergovernmental tersebut.

Bandung, Nopember 2010
Yulius Purwadi Hermawan

Pernyataan dan Ucapan Terimakasih

Ide penelitian tentang G-20 ini muncul menyusul penyelenggaraan *Expert Group Meeting* yang diselenggarakan oleh *Friedrich Ebert Stiftung* Indonesia dan Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Katolik Parahyangan pada bulan 17 Nopember 2009 di Bandung. Pada waktu hadir sekitar 40 orang akademisi, peneliti dalam dan luar negeri, aktivis LSM nasional dan internasional, serta wakil dari Uni Eropa, kedutaan besar asing untuk Indonesia dan wakil dari lembaga pemerintahan Indonesia. Disadari bahwa pembentukan G-20 merupakan realitas politik internasional yang penting dan bahwa diperlukan kajian lebih mendalam untuk melihat peran lembaga tersebut di arena itnernasional dan peran negara-negara berkembang dalam forum tersebut.

Penelitian ini telah melakukan wawancara dengan sekitar 35 orang narasumber baik secara formal maupun informal, *face-to-face interview* maupun korespondensi via e-mail. Responden tersebut berasal dari berbagai lembaga pemerintahan Indonesia dan lembaga internasional. Kami mendapat dukungan dari Kementrian Keuangan, Kementrian Perdagangan, Bank Indonesia dan Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia melalui kesediaan narasumber-narasumber kunci untuk menyediakan waktu bagi terlaksananya *in-depth interviews*. Kami juga mendapat sambutan sangat baik dari perwakilan-perwakilan kedutaan besar asing untuk Indonesia, perwakilan Bank Dunia, IMF dan Uni Eropa yang pandangan-pandangan mereka telah memperkaya penemuan penelitian ini. Sejumlah peneliti dan pengamat ekonomi politik internasional juga turut berkontribusi bagi penelitian ini dengan memberikan masukan-masukan dan informasi-informasi yang kritis dan analitis. Atas dukungan mereka, kami mengucapkan terimakasih.

Kami juga menyampaikan apresiasi kepada para aktivis LSM nasional dan internasional yang menyempatkan waktu mereka untuk men-*sharing*-kan gagasan-gagasan mereka tentang G-20 dan partisipasi Indonesia dan negara-

negara berkembang lainnya. Secara informal, beberapa pejabat kementrian luar negeri juga men-*sharing*-kan pandangan mereka tentang G-20. Kami sangat menghargai pandangan-pandangan seluruh responden yang sangat terbuka; pandangan-pandangan tersebut, seperti mereka klaim, seringkali bersifat personal dan tidak mewakili pandangan negara asal atau lembaga mereka. Karenanya, ini justru memberikan bobot yang semakin mendalam untuk penelitian ini.

Kami mendapat kehormatan besar dari ketua Sherpa G-20 Indonesia, para pembicara dan para peserta FGD G-20 dan Agenda Pembangunan yang telah hadir dan berpartisipasi dalam FGD yang diselenggarakan tanggal 4 Nopember 2011. Semua peserta memiliki antusiasisme tinggi dalam mensharingkan pandangan kritis mereka terkait perkembangan terakhir dalam proses G-20 terutama menjelang KTT G-20 di Seoul, Korea. Karenanya kami berterimakasih atas kontribusi mereka untuk memperkaya laporan penelitian ini.

Tentu saja, kami sangat berterimakasih kepada Bapak Erwin Schweisshelm, direktur *Friedfrich Ebert Stiftung* Kantor Indonesia atas dukungan dan bantuannya untuk keberlangsungan penelitian ini. Juga kepada Sdr. Artanti Wardhani, staf FES Indonesia yang menjadi kontak kami untuk hal-hal substantif dan teknis-administratif.

Sebagai koordinator tim riset saya pribadi berterimakasih untuk anggota tim peneliti yang upaya dan kesabarannya yang panjang dapat menghasilkan laporan ini. Mereka adalah Wulani Sriyuliani, Getruide H Hardjowijono dan Silvie Tanaga yang bersama-sama telah berkontribusi untuk menyiapkan laporan tertulis ini. Kami juga berterimakasih untuk pewawancara pendukung kami, Albert Tri Wibowo dan Cherika Novianti yang telah bekerja keras untuk menyediakan waktunya untuk melakukan wawancara dengan narasumber kami. Saya juga menyampaikan terimakasih kepada Vyke Valencia yang telah berkontribusi dalam penulisan draft awal laporan dalam bahasa Inggris. Saya merasa sangat terbantu dengan dukungan Bapak Norbert von Hoffman yang telah menyediakan waktunya yang berharga untuk menjadi *proofreader* laporan penelitian versi Bahasa Inggris, sekaligus untuk masukan dan koreksi-koreksi yang sangat detil sehingga laporan ini dapat menjadi lebih sempurna.

Bandung, Nopember 2010
Yulius Purwadi Hermawan

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

I.

G-20: PENDEKATAN KLUB EKSLUSIF BARU DENGAN DAMPAK INKLUSIF GLOBAL

Bab I ini akan mendeskripsikan G-20 sebagai klub yang mengklaim diri sebagai pemegang mandat global, latar belakang pembentukan dan institusionalisasi G-20, makna dari G-20 sebagai forum utama kerjasama ekonomi internasional, komitmen-komitmen yang dibuat dalam G-20 dan kritik-kritik terhadap G-20 yang muncul. Bab ini akan menunjukkan bahwa efektivitas G-20 dalam menangani krisis ekonomi tidak serta merta menyelesaikan kritik atas klaim diri dan legitimasinya. Sejumlah agenda besar perlu dipertimbangkan G-20 terutama untuk membuat eksistensinya memberi manfaat bagi seluruh bangsa di dunia.

a. G-20 sebagai *extra-ordinary club*

G-20 bagaimanapun harus dilihat sebagai suatu klub baru, namun dengan tanggung jawab yang lebih inklusif. Sebagai klub, forum ini hanya melibatkan sejumlah negara anggota (19 negara bangsa) dan satu organisasi regional (Uni Eropa); sejumlah anggota ini pula yang berkewajiban hadir dalam pertemuan-pertemuan G-20 baik di tingkat pejabat senior, kelompok kerja, di tingkat kementrian keuangan dan gubernur bank, di tingkat Sherpa maupun di tingkat KTT. Sejumlah anggota tersebut pula yang 'memiliki' hak untuk menyepakati sejumlah komitmen-komitmen dan tentu saja mereka pula yang bertanggungjawab untuk melaksanakan komitmen-komitmen tersebut. Sebagai sebuah klub, G-20 harus memberikan manfaat kepada anggota-anggotanya karena manfaat itu pula yang akan mendorong keterlibatan anggota-anggotanya untuk tetap aktif. Kesuksesan sebuah klub

yang bermanfaat juga sangat tergantung pada kemampuan negara-negara anggotanya untuk memenuhi komitmen yang telah dibuat di dalam klub tersebut.[1]

Namun demikian, G-20 bukanlah *ordinary club* (klub biasa). G-20 adalah klub dengan anggota terbatas namun memiliki tujuan ambisius yang membawa dampak global. G-20 mengklaim bahwa mandatnya adalah:

> *"Untuk memberi kontribusi bagi penguatan arsitektur finansial internasional dan untuk menciptakan peluang-peluang bagi dialog tentang kebijakan-kebijakan nasional, kerjasama internasional dan lembaga-lembaga finansial internasional yang dapat membantu mendukung pertumbuhan dan pembangunan di seluruh dunia."*[2]

Mempertimbangkan kerjasama ekslusif ini, G-20 berkeyakinan dapat membawa manfaat yang bukan hanya dapat dinikmati oleh keduapuluh anggotanya, tetapi juga sekira 170 negara lain yang tidak tergabung dalam G-20. Keyakinannya adalah kalau 19 negara plus Uni Eropa berhasil dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil, berkelanjutan dan seimbang, perekonomian dunia akan menjadi kuat, berkelanjutan dan stabil.

Untuk mencapai sasaran tersebut, G-20 melakukan dua pendekatan sekaligus: (1) Pertama, kelompok ini merangkul negara-negara yang memiliki modalitas ekonomi yang secara bersama-sama menguasai sebagian besar perekonomian dunia. (2) Kedua, kelompok ini juga melibatkan perwakilan-perwakilan dari Bank Dunia, IMF dan lembaga-lembaga keuangan global lainnya. Pendekatan pertama memberikan keuntungan bahwa apa yang dilakukan G-20 akan berdampak sistemik yang signifikan terhadap perekonomian regional maupun global. Ini misalnya ditegaskan oleh perwakilan salah satu negara anggota G-20: *"kalau perekonomian Indonesia bertumbuh dengan stabil dan baik, negara-negara tetangganya di Asia Tenggara juga akan menikmati pertumbuhan ini."*[3] Daya beli masyarakat Indonesia akan

---

1 Tentang ini telah menjadi kajian para teoritisi teori klub yang menekankan benefit yang harus diperoleh oleh anggota klub sebagai determinan dari keberlanjutan suatu organisasi internasional sebagai suatu klub.

2 http://www.g20.org

3 Wawancara dengan perwakilan anggota G-20 dari Asia Selatan tanggal 27 Mei 2010.

Gambar 1.
GDP negara-negara anggota G-20

Sumber:
http://blogs.reuters.com/macroscope/2009/09/22/graphic-gdp-of-the-G-20-nations
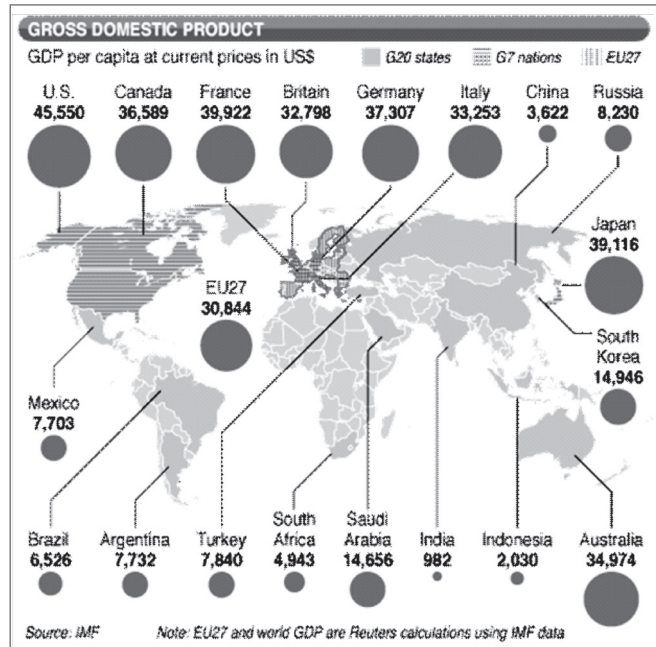
meningkat dan dengan demikian akan menjadi 'pembeli' produk-produk impor yang masuk ke Indonesia dari negara-negara tetangga.

Pendekatan kedua menjamin keberlangsungan tata pengaturan finansial global yang lebih kondusif bagi pemenuhan komitmen-komitmen dalam G-20. Bank Dunia dan IMF adalah lembaga-lembaga keuangan *Bretton Woods* yang sejak awal dibentuk untuk menjaga stabilitas keuangan dan pembangunan dunia. Merekalah yang selama ini telah memainkan peran untuk membantu negara-negara dalam menjaga stabilitas perekonomian domestik baik di masa normal maupun krisis. Lembaga-lembaga tersebut cukup krusial mengingat dana yang dimilikinya dapat membantu pendanaan pembangunan domestik negara-negara anggotanya.

Negara-negara anggota G-20 berkomitmen untuk melakukan koordinasi kebijakan fiskal, finansial dan moneter, guna menjamin pertumbuhan ekonomi yang seimbang di antara mereka. Kebijakan-kebijakan ini tertuang dalam Kerangka bagi Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Seimbang yang menjadi cetak biru yang harus diacu oleh stiap anggota G-20 untuk membuat kebijakan nasional yang terkoordinasi.

Untuk mendukung pencapaian yang maksimal, G-20 juga mengundang negara-negara dan organisasi regional non anggota yang dipandang dapat memberi kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian global yang seimbang. Dalam hal ini, G-20 tetap harus dilihat sebagai G-20 plus[4], yang prinsipnya tetap terbuka bagi "keikutsertaan" negara atau lembaga non anggota untuk memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan seimbang. Dalam KTT-KTTnya, G-20 mengundang kehadiran *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD), *the World Trade Organisation* (WTO), *the Financial Stability Board* (FSB), *the United Nations, the New Partnership for African Development* (NEPAD) dan *the Association of South-East Asian Nasions* (ASEAN) sebagai pengamat *(Observer)*. Di KTT London, *International Labour Organisation* (ILO) juga menjadi organisasi yang diundang dalam pertemuan pemimpin G-20.[5]

Namun, pemimpin-pemimpin G-20 juga menyadari bahwa mereka tidak dapat memaksa negara non anggota G-20 untuk mengimplementasikan komitmen-komitmen yang di buat dalam KTT G20 yang eksklusif. *Leading by example* (memimpin dengan contoh) diadopsi sebagai prinsip yang menekankan pentingnya penerapan komitmen yang konsisten oleh negara-negara anggota G-20.[6] Anggota G-20 harus menunjukkan bahwa mereka berkomitmen secara penuh untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan mereka dan membuktikan bahwa keputusan-keputusan tersebut terbukti efektif untuk mencapai mandate global yang telah diklaim sendiri oleh G-20. Jika terbukti berhasil, bangsa-bangsa lain akan secara sukarela mengikuti inisiatif-inisiatif G-20.

b. Latar-belakang pembentukan dan institusionalisasi G-20

Lahirnya G-20 dilatarbelakangi oleh konteks globalisasi yang terus menguat. Beragam literatur tentang globalisasi telah men-*sharing*-kan suatu

---

4 Seperti disampaikan perwakilan dari IMF untuk Indonesia dalam wawancara tanggal 12 Agustus 2010.

5 Fact Sheet 3: the G-20, http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/FactSheet3TheG-20EN diakses tanggal 23 Agustus 2010.

6 Seperti disampaikan seorang narasumber perwakilan pemerintah dalam Focus Group Discussion dan Lokakarya, G-20 dan Agenda Pembangunan tanggal 4 Nopember 2010.

pandangan bahwa dunia menjadi semakin kecil, dan tidak ada negara yang tidak rentan terhadap pengaruh yang terjadi di lingkungan eksternalnya. Saling ketergantungan di antara negara menjadi ciri sentral dari tren globalisasi kontemporer dan dalam konteks ini kerjasama di antara negara-negara di dunia menjadi suatu keharusan.[7]

Serangkaian krisis ekonomi yang terjadi pada dekade tahun 1990an membuktikan bahwa dunia baru membutuhkan pendekatan baru untuk merespon dunia yang semakin kecil. Nilai Peso Mexico jatuh di bulan Desember 1994 menandai krisis finansial di negara ini yang imbasnya dirasakan pada negara-negara di Amerika Selatan. Indonesia, Thailand dan Korea Selatan mengalami krisis moneter yang parah pada tahun 1997 dan dampaknya dirasakan di negara-negara di kawasan Asia.[8] Kerentanan finansial juga dirasakan di Rusia pada tahun 1998; di Brazil pada tahun 1998-2002, Turki pada tahun 1999-2002, dan Argentina pada tahun 2000-2001. Berbagai negara seperti China dan India telah merespon krisis dengan berbagai cara; apapun cara yang ditempuh telah beresiko pada meledaknya angka pengangguran dan melemahnya daya beli masyarakat, lebih lanjut ini berdampak sistemik pada transaksi perdagangan dunia.

Krisis finansial yang terjadi pada tahun 1990an tersebut menjadi perhatian serius menteri-menteri keuangan negara-negara maju dan mengantarkan pada pengakuan bahwa sudah saatnya mereka harus mengajak negara-negara yang perekonomiannya menguat *(emerging economies)* untuk bergabung dalam diskusi tentang penataan struktur finansial global. Adalah Paul Martin, Menteri Keuangan Kanada dan Lawrence Summer, menteri Keuangan Amerika Serikat yang kemudian mengambil inisiatif untuk memulai penyelenggaraan dialog-dialog G22 dan G33, dimana negara-negara dengan perekonomian yang signifikan secara geografis dan ekonomik turut diundang di dalamnya. Dialog G-20 yang reguler diselenggarakan pada bulan Desember 1999 dan

---

7 Lihat misalnyaKeohane, Robert O. (2002). Power and Governance in A Partially Globalized World. London: Routledge; Karns, Margaret P and Mingst, Karen A. (2004) International Organizations: The Politics and Porcess of Global Governance. Boulder, CO: Lynne Rienner Publisher; Cable, Vincent (1999) Globalization and Global Governance. London: Pinter; Schlte, Jan Art (2000). Globalization: A Critical Introduction. New York: St. Martin's Press; Frank J. Lechner dan John Boli (eds.) (2000). The Globalization, Reader. Massachusetts, MA dan Oxford: Blackwell.

8 Tentang rangkaian krisis ekonomi dapat dilihat pada Bab 1. Genesis of L-20 project.

terus dilembagakan setiap tahunnya hingga saat ini. G-20 disebut oleh para perintisnya sebagai terobosan baru *"to make a smaller world governable and fairer"* (untuk membuat dunia yang semakin kecil dapat dikelola dan lebih adil."[9]

G-20 dapat didefinisikan sebagai sebuah komite baru untuk mengelola isu-isu ekonomi global. Komite yang awalnya beranggotakan menteri-menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari 8 negara G-8 ditambah 10 negara dengan perekonomian yang menguat plus Australia dan Uni Eropa. G-20 dipandang sebagai kompromi baru yang lebih baik antara kerjasama-kerjasama multilateral yang ada. Jumlahnya yang lebih besar, sekalipun tidak terlalu besar dibandingkan G-7, memberikan peluang bagi dialog-dialog yang lebih luwes dengan hasil nyata yang lebih cepat, jumlahnya tentu jauh lebih sedikit dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (192 negara) yang terkesan sangat lambat dalam penanganan isu-isu krusial yang dihadapi dunia. Dengan penetapan jumlah yang terbatas, G-20 meyakini kemampuan dan efektivitas untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

Pertemuan-pertemuan rutin pun digelar sejak pertemuan pertama G-20 di Berlin, Jerman. G-20 fokus pada penanganan krisis ekonomi, kebijakan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, penguatan sistem finansial di masing-masing negara anggota dan, sebagai respon terhadap serangan teroris 9/11 di gedung kembar New York, kerjasama dalam pembekuan pendanaan terorisme. Dialog kemudian mengembangkan diskusi pada pentingnya reformasi lembaga-lembaga keuangan *Bretton Woods*, IMF dan Bank Dunia. Reformasi ini dilihat sebagai prekondisi penting untuk memperkuat struktur finansial global yang relatif kokoh dalam mengantisipasi krisis ekonomi di masa depan.

Krisis ekonomi Amerika Serikat pada tahun 2007 semakin menempatkan pentingnya G-20. Para pendukung pelembagaan G-20 melihat perlunya peningkatan dialog G-20 dari level kementrian ke level Konferensi Tingkat Tinggi. Hanya pemimpin politik yang dapat membuat keputusan-keputusan strategis yang sekalipun tidak *legally binding* (mengikat secara hukum) namun berimplikasi pada pemenuhan komitmen politik yang lebih kuat. Dengan demikian kesepakatan yang dibuat dalam forum *intergovernmental* di tingkat tertinggi akan membawa penyesuaian-penyesuaian kebijakan di masing-

---

9 Ibid.

masing negara, termasuk keputusan yang sifatnya teknis. Menjadikan forum G-20 di tingkat pemimpin tertinggi membuat keputusan-keputusan yang dibuat dalam forum tersebut menjadi *'implementable'* (bersifat dapat diterapkan).[10]

KTT G-20 pertama diselenggarakan di Washington tahun 2008, kemudian dilanjutkan di London (2009), Pittsburgh (2009), Toronto (2010) dan Seoul (Nopember 2010). Ketiga KTT pertama berfokus utama pada upaya darurat dalam merespon krisis finansial. Koordinasi makro dilakukan untuk mengelola *toxic asset* dan rekapitalisasi perbankan dan stimulus fiskal sebesar 2% PDB.

Dalam KTT Washington, pemimpin-pemimpin G-20 menyepakati tindakan-tindakan mendesak yang harus dilakukan seperti mengupayakan secara serius tindakan-tindakan untuk menstabilisasi sistem finansial; mendukung kebijakan moneter yang tepat dan diperlukan bagi kondisi domestik; menggunakan kebijakan-kebijakan fiskal untuk menstimulasi permintaan domestik bagi dampak yang cepat sementara tetap menjaga kerangka kebijakan yang kondusif bagi keberlanjutan fiskal; membantu negara-negara berkembang untuk mendapatkan akses bagi keuangan dalam kondisi finansial yang sulit termasuk melalui fasilitas likuiditas dan dukung-dukungan program; mendukung Bank Dunia dan Bank Pembangunan Multilateral (MDBs) untuk menggunakan kemampuannya untuk mendukung program-program pembangunan; dan menjamin bahwa IMF, Bank Dunia dan Bank-bank pembangunan lain mempunyai sumber dana yang mencukupi dalam memainkan peran mereka dalam menangani krisis.[11]

Dalam KTT di Washington ini juga disepakati lima prinsip dalam reformasi pasar finansial dan rejim regulasi untuk menghindarkan krisis serupa dimasa yang akan datang. Prinsip-prinsip tersebut adalah: (1) Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas; (2) Peningkatan Regulasi yang kuat; Promosi integritas dalam Pasar Finansial; (4) Promosi kerjasama internasional; (5) Reformasi lembaga-lembaga keuangan internasional.[12]

Empat kelompok kerja secara khusus dibentuk untuk menangani isu-isu spesifik. Empat kelompok kerja tersebut adalah Kelompok Kerja 1 menangani

---

10 Seperti disampaikan oleh Miranda Goeltom, mantan wakil Gubernur Bank Indonesia, dalam *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan oleh BPPK Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia 3 Agustus 2010.

11 Summit Declaration on Financial Markets and the World Economy, 15 November , 2008.

12 Ibid.

Hedge funds dan instrumen turunannya, standar akuntansi, agen-agen *credit rating*; Kelompok Kerja 2 menangani pembentukan FSB, Sanksi bagi *tax haven*, dan *supervisory College*; Kelompok Kerja 3 menangani *flexible credit line* dan peningkatan capital IMF sebesar 750 billion dollar AS; Kelompok Kerja 4 menangani *Budget Support* USD 100 billion, GCI ADB 200% dan *Trade Financing* USD 250 billion. Keempat kelompok kerja ini merupakan pendekatan G-20 untuk mengedepankan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam KTT Washington.

Dalam KTT di London dan Pittsburgh dan pertemuan-pertemuan lanjutan di tingkat pejabat senior, kementrian dan Bank Sentral, pelaksanaan komitmen-komitmen bagi tindakan mendesak tersebut dievaluasi dalam laporan kemajuan *(progress report)*[13] dan ditindaklanjuti dengan komitmen-komitmen baru. Satuan tugas khusus dibentuk untuk menyusun rancangan agenda dan rencana-rencana aksi.

Untuk menghindarkan perdebatan yang sering terjadi di KTT lain, G-20 fokus pada komonalitas di antara anggota-anggotanya. KTT mengadopsi prinsip-prinsip esensial yang tidak hanya membentuk citra dan nilai simbolik, tetapi juga meningkatkan profil G-20 yang penting secara politik. Ini penting untuk membuat G-20 dapat memulai suatu diskusi tentang bagaimana membangun stabilitas dan kapabilitas untuk mengelola krisis ekononomi, isu-isu yang otoritasnya berada di tangan menteri-menteri keuangan dan gubernur bank sentral.

Selain pertemuan tingkat tinggi, pertemuan pejabat senior, menteri keuangan dan Gubernur Bank Sentral, G-20 juga memiliki organ pertemuan Sherpa. Pertemuan Sherpa diselenggarakan sebelum KTT yang dimaksudkan untuk mensinkronisasikan isu-isu yang secara khusus akan diagendakan dalam KTT.[14] Dengan demikian pertemuan di tingkat *leader* dapat menjadi lebih efektif karena lebih fokus pada masalah-masalah dan kepentingan

---

13 Lihat *Progress Report on the Immediate Actions of the Washington Action Plan* disiapkan oleh Ketua G-20 perwakilan Inggris 4 Maret 2009; *Progress Report on the Actions of the Washington Action Plan*, 2 April 2009; T*he Global Plan for Recovery and Reform*, 2 April 2009; *Progress Report on the Actions of the London and Washington G-20 Summits*, 6 September 2009; *Progress report on the Actions to Promote Financial Regulatory Reform* diterbitkan oleh AS, Ketua KTT G-20 di Pittsburgh– 25 September 2009.

komonalitas dengan pendekatan yang telah disepakati bersama di tingkat pejabat senior, kementrian dan pejabat Sherpa; daripada membawa perbedaan-perbedaan yang dikhawatirkan justru akan memperpanjang perdebatan di tingkat pimpinan negara.

c. G-20 sebagai forum utama kerjasama ekonomi

KTT G-20 di Pittsburgh menghasilkan kesepakatan yang penting khususnya menyangkut peran G-20 di masa yang akan datang. Deklarasi finalnya menekan bahwa pemimpin-pemimpin G-20 sejak KTT di Pittsburgh akan bertemu secara regular dan menjamin bahwa delegasi-delegasi mereka akan berusaha hadir dan berpartisipasi aktif dalam semua pertemuan. Ini menegaskan eksistensi G-20 yang awalnya terkesan bersifat *ad hoc* menjadi 'permanen' untuk jangka waktu yang relatif panjang. Deklarasi ini menegaskan dua nilai penting, yaitu sifatnya yang 'permanen', pengakuan G-7 terhadap peran *emerging economies* dan peran kunci G-20 sebagai forum kerjasama ekonomi global maupun regional.

Dari komite *ad hoc* ke lembaga permanen

Deklarasi di Pittsburg menegaskan bahwa pemimpin G-20 bertekad untuk membuat kehadiran G-20 lebih bersifat permanen. Pemimpin-pemimpin G-20 menyadari bahwa penyelesaian krisis ekonomi membutuhkan solusi yang permanen bukan solusi *ad hoc.* Untuk itu diperlukan lembaga yang bersifat permanen pula yang memiliki tugas utama untuk membangun arsitektur finansial global yang tahan terhadap krisis.[15]

G-20 meyakini bahwa solusi terhadap krisis ekonomi memprasyaratkan kerjasama yang bersifat global, secara terus menerus. Melalui kerjasama ini dirumuskan cara-cara yang terbaik untuk penyelesaian krisis, baik yang harus dilakukan oleh masing-masing negara anggota G-20 maupun yang harus dilakukan oleh dan melalui lembaga-lembaga finansial internasional.

Setiap negara harus mengupayakan sejumlah kebijakan dalam upaya merespon krisis melalui stimulus fiskal, merangsang pemulihan pertumbuhan ekonomi kembali di era krisis, dan kemudian mengupayakan stabilitas perekonomian yang tahan terhadap krisis serupa di masa yang akan datang

---

14 Wawancara dengan Ketua Sherpa G-20 Indonesia tanggal 2 Juni 2010.

melalui penguatan sektor keuangan domestik.

Agenda yang diupayakan melalui lembaga finansial internasional meliputi penambahan dana talangan untuk menstimulasi sektor produksi secara khusus, dan perekonomian domestik secara umum. Reformasi lembaga-lembaga finansial melalui regulasi standar internasional juga diyakini penting untuk menjaga stabilitas finansial global.

Peran *emerging economies* dalam arsitektur ekonomi global

Selain tekad untuk membangun forum yang permanen, Deklarasi G-20 sebagai forum utama untuk kerjasama ekonomi di Pittsburg bisa dipahami secara sempit namun dengan makna yang luas. Ini adalah deklarasi pemimpin-pemimpin G-7/G-8 yang menegaskan bahwa G-20 adalah satu-satunya forum untuk membicarakan kerjasama ekonomi di antara mereka. Implikasinya adalah bahwa G-7/G-8 tidak lagi mengagendakan kerjasama ekonomi di dalam KTT G-7 mereka.

Deklarasi ini bermakna luas karena pemimpin G-7/G-8 benar-benar mengakui bahwa forum G-7/G-8 tidak lagi mencukupi untuk mendorong kerjasama ekonomi yang kemudian berdampak sistemik pada arsitektur finansial global dan bahwa mereka harus melibatkan negara-negara berkembang yang perekonomiannya menguat dan unggul.[16] Keunggulan G-20 adalah bahwa forum ini melibatkan negara-negara yang perekonomiannya menguat pada beberapa dekade terakhir ini. Penguatan ini tentu saja mempengaruhi perekonomian global secara keseluruhan. Negara-negara ini adalah produsen yang produk-produknya sudah mulai menguasai pasar dunia. Negara-negara ini adalah juga konsumen yang potensial, dan karenanya menjadi *global buyers* bagi produk-produk pasar global, termasuk produk negara-negara maju maupun negara berkembang.

G-20 dengan segenap keunggulannya telah menjadi forum dimana pemimpin-pemimpin berkomitmen untuk hadir di dalam KTTnya mulai dari Washington (2008), London (2009), Pittsburgh (2009) dan kemudian Toronto (2010) dan nantinya, Korea Selatan (2010), Perancis (2011) dan Meksiko (2012). Hasil-hasil nyata dalam bentuk pemulihan ekonomi juga tampak terlihat dan ini membuktikan efektivitas G-20 dalam merespon krisis. (lihat bagian berikut

15 Ibid.

16 Seperti disampaikan oleh sebagian besar para responden dari perwakilan-perwakilan negara-negara asing untuk Indonesia.

dari laporan ini). Ini memberikan argumentasi yang kuat bagi institusionalisasi G-20 sebagai forum utama kerjasama ekonomi.

Referensi utama bagi forum kerjasama ekonomi lain

Makna ketiga dari deklarasi pemimpin G-20 adalah penempatan G-20 sebagai 'referensi utama' dari kerjasama ekonomi lain terutama yang melibatkan keanggotaan mereka. Mempertimbangkan kekuatan ekonomi masing-masing anggota G-20, penempatan sebagai forum utama menjadikan G-20 dan kesepakatan-kesepakatan yang dibuatnya sebagai referensi utama bagi aktivitas negara-negara anggotanya, termasuk menjadi rujukan bagi perilakunya di forum-forum serupa baik di tingkat regional maupun di tingkat global.

Dengan demikian, setiap anggota G-20 akan memegang komitmen yang telah mereka buat dalam G-20 dan memenuhinya di tingkat domestik masing-masing. Setiap anggota G-20 juga bertanggungjawab untuk membawa

Gambar 2. G-20 sebagai Forum Utama Kerjasama Ekonomi

Sumber: disusun oleh Y P Hermawan dari berbagai sumber
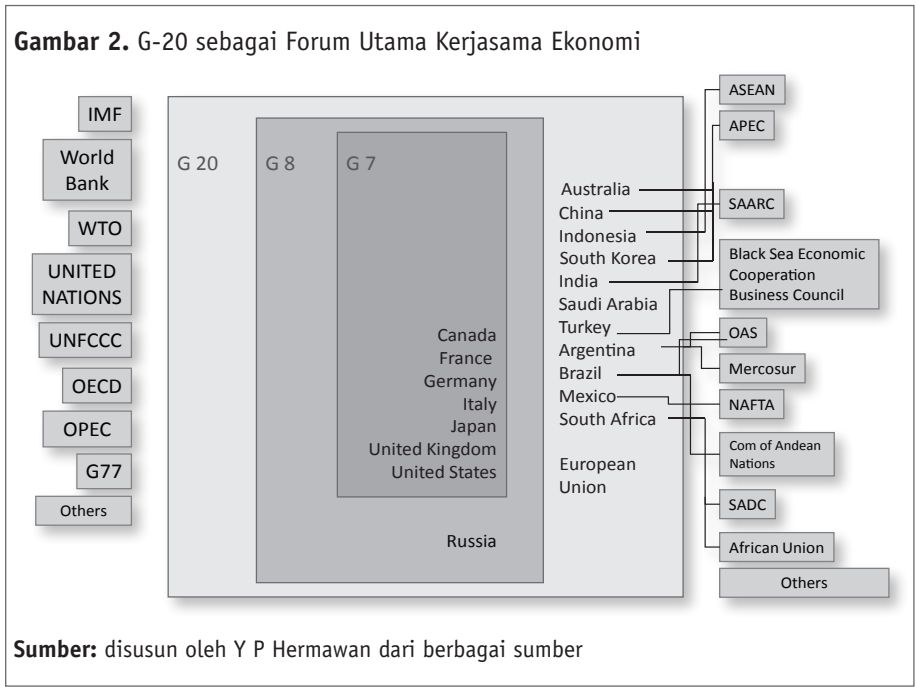
komitmen yang dibuatnya sebagai rujukan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat di forum-forum internasional lain dimana mereka menjadi anggotanya.

d. Komitmen-komitmen G-20

Terdapat 93 komitmen yang telah dibuat pemimpin-pemimpin G-20 di KTT London, Washington dan Pittsburgh.[17] KTT G-20 Toronto memperkuat komitmen-komitmen tersebut berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan komitmen dan perkembangan ekonomi global dunia. Negara-negara anggota G-20 telah berupaya untuk memenuhi komitmen tersebut. Kerjasama dengan Bank Dunia dan IMF juga dilakukan untuk memfasilitasi pemenuhan komitmen tersebut. Bagian ini akan mendeskripsikan komitmen-komitmen yang telah dibuat terutama sejak KTT pertama kali diselenggarakan di Washington pada tahun 2008 hingga KTT G-20 di Pittsburgh.

93 komitmen tiga KTT G-20 (Washington, London, Pittsburgh)

Sembilanpuluh tiga komitmen yang telah dibuat dalam tiga KTT pertama dapat diidentifikasi sebagai berikut. Komitmen tersebut meliputi komitmen-komitmen dalam sektor (1) makro ekonomi, (2) *restoring lending*; (3) *Trade Finance*; (4) reformasi IFI; (5) *Energy and Climate Change*; (6) *Financial Regulation*; (7) *FSB Establishment*; (8) *International Cooperation*; (9) *Prudential regulation*; (10) *Scope of Regulation*; (11) *Transparent Assessment of Regulatory Regimes*; (12) *Compensation*; (13) *Tax havens and Non-Cooperative Jurisdictions*; (14) *Accounting Standards*; (15) *Credit Rating Agencies*.

Dalam makro ekonomi, G-20 menyepakati 9 komitmen yang diantaranya meliputi (1) komitmen untuk menyediakan stimulus fiskal untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi *("deliver the scale of sustained fiscal effort necessary to restore growth")*, (2) komitmen Bank Sentral untuk membuat kebijakan-kebijakan yang luwes sejauh diperlukan dan instrumen-instrumen moneter untuk menjaga stabilitas harga *(Central Banks' pledge to maintain expansionary policies for as long as needed and to use the full range of monetary*

17 *Progress report on the Economic and Financial Actions of the London*, Washington and Pittsburgh G-20 Summits, prepared by the UK Chair of the G-20, St, Andrews, 7 November 2009.

policy instruments, including unconventional instruments consistent with price stability"), (3) resolusi untuk menjamin ketahanan fiskal dan stabilitas harga jangka panjang dan strategi-strategi untuk keluar dari krisis yang dapat dipertanggungjawabkan, (4) komitmen untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan dalam kerangkan *"Strong, Sustainable and Balanced Growth"*, (5) komitmen untuk mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan ekonomi dan menahan diri dari upaya devaluasi mata uang; (6) mendaya-gunakan investasi yang didanai program stimulus fiskal untuk tujuan membangun *"a resilient, sustainable and green recovery"* (pemulihan yang kokoh, berkelanjutan dan ramah lingkungan) dan (7) tanggungjawab kolektif untuk meminimalisasi dampak sosial krisis di negara-negara termiskin.

Dalam sektor pemulihan pinjaman *(restoring lending)*, pemimpin-pemimpin G-20 berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan aliran kredit melalui sistem finansial dan menjamin dampak positif lembaga-lembaga yang penting secara sistemik dalam menerapkan kebijakan sesuai dengan kerangka yang telah disepakati dalam G-20 untuk memulihkan sistem peminjaman dan untuk memperbaiki sektor finansial.

Dalam sektor keuangan perdagangan, G-20 bersepakat untuk menjamin ketersediaan sedikitnya USD 250bn dalam jangka waktu dua tahun untuk mendukung keuangan perdagangan melalui agen-agen kredit ekspor dan investasi dan melalui MDBs untuk jangka waktu tiga tahun. Dalam sektor ini ini juga disepakati fleksibilitas persaratan kapital bagi keuangan perdagangan.

Duapuluh enam (26) komitmen menyangkut reformasi IFI juga disepakati dalam KTT G-20. Keduapuluhenam komitmen tersebut meliputi dari 6 komitmen tentang sumber-sumber IMF termasuk peningkatan dana, 10 tentang sumber-sumber Bank Dunia termasuk peningkatan kapital untuk pinjaman, 1 komitmen bagi fleksibilitas *"Debt Sustainability Framework"* dan 10 komitmen terkait dengan tata kelola IMF dan Bank Dunia termasuk reformasi dalam lembaga keuangan internasional tersebut.

Menyangkut energi dan perubahan iklim, pemimpin-pemimpin G-20 berkomitmen untuk mengambil tindakan dalam menangani ancaman perubahan iklim termasuk upaya membangun kesepakatan dalam negosiasi *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCC). G-20 juga berkomitmen untuk menghapuskan dan merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien dan memberikan bantuan bagi negara-negara miskin.

Dalam sektor regulasi finansial, pemimpin-pemimpin G-20 berkomitmen

untuk mengambil tindakan di tingkat nasional dan internasional untuk meningkatkan standar supaya pemerintah nasional menerapkan standar global secara konsisten untuk menghindarkan fragmentasi pasar, proteksionisme dan *regulatory arbitrage*.

Dalam hal pembentukan *Financial Stability Board* (FSB), G-20 menyepakati pembentukan FSB sebagai pengganti dari *the Financial Stability Forum* (FSF). Anggota-anggota FSB berkomitmen untuk menjaga stabilitas finansial, meningkatkan keterbukaan dan transparansi sektor finansial, mengimplementasikan standar finansial internasional dan bersepakat untuk melakukan evaluasi secara periodik. FSB harus bekerjasama dengan IMF untuk mengidentifikasi resiko makroekonomik dan finansial dan melakukan tindakan-tindakan untuk mengatasinya. Anggota FSB juga seharusnya segera mengimplementasikan prinsip-prinsip FSF bagi manajemen krisis lintas batas negara dan pemerintah nasional seharusnya membangun kelompok-kelompok manajemen krisis bagi perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di beberapa negara, serta menetapkan kerangka legal untuk melakukan intervensi dalam krisis.

Dalam hal regulasi *prudential*, G-20 menegaskan pentingnya standar-standar regulasi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kapital bank dan mengurangi kompetisi perbankan yang eksesif. Regulasi-regulasi ini penting untuk diterapkan jika kondisi finansial sudah membaik dan pemulihan ekonomi sudah berjalan. Terkait dengan regulasi ini berkomitmen untuk membuat garis-garis besar harmonisasi definisi kapital. Lembaga-lembaga otoritatif berkewajiban untuk bekerjasama dan menyusun kebijakan teknis operasional untuk menerapkan standar regulasi tersebut.

Terkait dengan cakupan regulasi, G-20 berkomitmen untuk memperbaiki sistem regulasi untuk menjamin bahwa pemerintah dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan resiko-resiko *macro-prudential* termasuk dalam bank-bank pengawasan untuk membatasi dampak sistemik. G-20 juga berusaha menjamin bahwa badan otoritatif memiliki kewenangan untuk mengumpulkan informasi yang relevan menyangkut semua lembaga-lembaga finansial material, pasar dan instrumen-instrumen untuk melihat potensi buruk yang dapat menyebabkan dampak sistemik. Namun ditegaskan bahwa upaya ini perlu dikoordinasikan di tingkat internasional. Pemimpin-pemimpin G-20 juga bersepakat untuk meningkatkan regulasi, fungsi dan transparansi pasar finansial dan komoditas untuk mengatasi gejolak harga komoditas yang

eksesif.

Dalam hal *assessment* yang transparan terhadap regulasi transparan dari semua anggota G-20 berkomitmen untuk membuat laporan *Financial Sector Assessment Program* (FSAP). Mereka juga mendukung assessment yang transparan terhadap sistem regulasi nasional di setiap negara.

Menyangkut kompensasi, pemimpin-pemimpin G-20 di London mendukung prinsip-prinsip pembayaran dan kompensasi di lembaga-lembaga finansial penting yang dibuat oleh FSF. Di Pittsburgh, G-20 menyepakati standard implementasi dari prinsip-prinsip FSB dan mendorong penerapannnya dengan segera. Kompensasi seharusnya bersesuaian dengan resiko yang ada dan performa yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Terkait dengan *tax havens* dan jurisdiksi non-kerjasama, G-20 meminta semua negara untuk mengikuti standar internasional dalam bidang-bidang prudential, pajak dan anti pencucian uang/dan penanganan pendanaan terorisme (AML/CFT); G-20 juga meminta negara-negara mengadopsi standar internasional menyangkut pertukaran informasi yang ditetapkan G-20 pada tahun 2004 dan yang dimuat dalam *UN Model Tax Convention*. G-20 juga menyambut baik perluasan *Global Forum on Transparency and the Exchange of Information*, termasuk partisipasi negara-negara berkembang, dan mendukung kesepakatan bagi program evaluasinya. Dalam hal ini, tugas forum adalah untuk meningkatkan trasnparansi dalam perpajakan dan pertukaran informasi di antara negara. Ini dipandang penting untuk memerangi penggunaan *tax havens*.

Menyangkut standar akuntansi, G-20 bersepakat untuk meningkatkan standar bagi penilaian instrumen-instrumen finansial yang didasarkan pada likuiditas dan pandangan para investor, dan memperkuat kerangka bagi akuntansi nilai yang *fair*. Penetapan standar akunting ini harus mengurangi kompleksitas standar-standar akuntasi bagi instrumen finansial. G-20 juga menyepakati serangkaian hal-hal teknis operasional untuk penetapan standar akunting yang trasnparan.

Terkait dengan agen-agen penilaian kredit, G-20 menyepakati bahwa agensi tersebut harus tunduk pada rejim pengawasan termasuk registrasi, yang konsisten dengan prinsip-prinsip fundamental *Code of Conduct for Credit Rating Agencies* IOCSO. Pemerintah nasional harus menjamin bahwa lembaga-lembaga penilaian kredit tersebut mematuhi pelaksanakan aturan-aturan tersebut. Bila diperlukan pemerintah dapat mengubah prosedur untuk

mengatasi konflik kepentingan dengan tetap memperhatikan transparansi dan kualitas proses penilaian.

Komitmen lama dan baru dalam KTT G-20 Toronto

Dalam KTT di Toronto Kanada 26-27 Juni 2010, pemimpin-pemimpin G-20 mempertegas eksistensi dan kapasitas G-20 sebagai forum utama bagi kerjasama ekonomi internasional. KTT G-20 bersepakat untuk melanjutkan melakukan koordinasi kebijakan untuk menjamin *"a full return to growth with quality jobs, to reform and strengthen financial system, and to create strong, sustainable and balanced global growth"* (kembalinya pertumbuhan dengan pekerjaan yang berkualitas, reformasi dan penguatan sistem finansial dan penciptaan pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan dan seimbang).[18]

Untuk mencapai tujuan tersebut, G-20 kembali menekankan komitmennya bagi (1) *"the Framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth"* (Kerangka Pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan dan seimbang); (2) reformasi sektor finansial, (3) reformasi lembaga finansial internasional dan pembangunan; (4) memerangi proteksionisme dan mempromosikan perdagangan dan investasi. G-20 juga menyepakati sejumlah isu lain seperti korupsi, *green recovery* dan *sustainable global growth*, subsidi energi, perlindungan lingkungan dan pengurangan jurang kemiskinan; menindaklanjuti isu-isu ini, G-20 menekankan sejumlah agenda untuk menindaklanjuti isu-isu tersebut.

Terkait dengan reformasi sektor finansial, G-20 menetapkan empat pilar agenda *reform*. Pertama, adalah kerangka pengawasan yang kuat *(Strong Regulatory Framework)* melalui *Basel Committee on Banking Supervision* (Komite Basel untuk pengawasan perbankan) yang telah menetapkan rejim global baru bagi kapital dan likuditas perbankan. Pilar kedua adalah pengawasan yang efektif. FSB perlu berkonsultasi dengan IMF untuk menyusun rekomendasi menyangkut penguatan pengawasan khususnya terkait dengan mandat, kapasitas dan kewenangan lembaga pengawasan. Pilar ketiga adalah resolusi dan pengelolaan lembaga-lembaga sistemik yang memiliki kewenangan dan instrumen untuk merestrukturisasi dan memperbaiki lembaga-lembaga keuangan yang sedang dalam krisis. Pilar keempat adalah *assessment* internasional yang trasnparan dan *peer review* melalui FSB.

Terkait dengan perang terhadap proteksionisme dan promosi perdagangan

---

18 The G-20 Toronto Summit Declaration, 26-27 Juni 2010.

dan investasi, anggota-anggota G-20 berkomitmen untuk tetap menjaga pasar domestik mereka terbuka bagi perdagangan dan investasi asing. Untuk itu, pemimpin-pemimpin G-20 tidak akan menciptakan hambatan-hambatan bagi investasi dan perdagangan barang dan jasa, menerapkan batasan-batasan ekspor dan menerapkan aturan-aturan WTO secara konsisten dalam menstimulasi ekspor. Dalam hal ini, G-20 meminta WTO, OECD dan UNCTAD untuk memonitor situasi sesuai dengan mandat mereka dan melaporkan komitmen ini secara regular kepada publik. Pasar terbuka diyakini memainkan peran sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

Yang barangkali penting untuk dicatat dari KTT Toronto adalah komitmen bagi pembangunan yang disertai dengan pembentukan Kelompok Kerja Pembangunan yang menangani khusus isu pembangunan:

> *"Mempersempit jurang pembangunan dan mengurangi kemiskinan merupakan tujuan integral kami untuk mencapai pertumbuhan yang kuang, berkelanjutan dan seimbang dan menjamin perekomian yang kuat dan tahan terhadap krisis bagi semua bangsa. Dalam hal ini, kami sepakat untuk mebentuk Kelompok Kerja Pembangunan dan memberi mandat untuk mengelobasi agenda pembangunan dan rencana aksi tahunan yang harus diadopsi dalam KTT Seoul."*[19]

Dengan mencermati komitmen-komitmen yang telah dibuat dalam G-20 terutama sejak KTT di Washington, anggota G-20 bersepakat pada pentingnya sistem perekonomian terbuka, koordinasi kebijakan finansial dan perbankan domestik untuk menstimulasi perekonomian nasional, pentingnya standar regulasi internasional bagi lembaga-lembaga finansial domestik dan pentingnya suatu lembaga internasional yang memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja domestik.

Rencana Aksi Seoul

Dalam KTT Seoul, pemimpin-pemimpin G-20 mengeluarkan apa yang disebut Rencana Aksi Seoul yang menekankan komitmen pada lima bidang kebijakan: (1) kebijakan moneter dan nilai tukar mata uang; (2) kebijakan

---

19 *The G-20 Torronto Summit Declaration*, 26- 27 Juni 2010, poin no. 47, hal. 9.

perdagangan dan pembangunan; (3) kebijakan fiskal; (4) reformasi finansial; (5) reformasi struktural.

Dalam hal kebijakan-kebijakan moneter dan nilai tukar, G-20 menegaskan kembali pentingnya komitmen bank-bank sentral terhadap stabilitas harga dan pentingnya sistem nilai tukar yang ditentukan oleh pasar, sementara bank-bank juga perlu meningkatkan fleksibilitas nilai tukar dan menhan diri dari devaluasi mata uang.

Pemimpin-pemimpin G-20 menegaskan kembali komitmen pada perdagangan bebas dan investasi dan mendeklarasikan komitmen mereka menentang praktek perdagangan yang proteksionis dalam segala bentuk sebagaimana juga proteksionisme finansial. Mereka memutuskan untuk membuat langkah-langkah dalam "mengatasi *bottleneck* yang menghambat pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan dan kokoh di negara-negara berkembang, khususnya di negara-negara dengan pendapatan yang rendah: infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, perdagangan, investasi swasta dan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, pertumbuhan yang kokoh, inklusi finansial, mobilisasi sumber-sumber domestik dan sharing pengetahuan."

Dalam hal kebijakan-kebijakan fiskal, negara-negara maju yang tergabung dalam G-20 menjanjikan untuk memformulasikan dan mengimplemetasikan rencanan-rencana konsolidasi fiskal jangka menengah yang ambisius dan mendukung pertumbuhan. G20 menyadari resiko dari penyesuaian-penyesuaian dalam pemulihan global dan resiko bahwa kegagalan untuk mengkonsolidasikan kebijakan yang sinkron akan menghambat tingkat kepercayaan dan pertumbuhan.

Pemimpin-pemimpin G-20 berkomitmen untuk berupaya meningkatkan standar-standar di tingkat nasional dan internasional, dan menjamin bahwa otoritas nasional mereka akan menerapkan standar-standar global tersebut secara konsisten, dan menghindarkan fragmentasi pasar, proteksionisme dan arbitrasi peraturan. Pemimpin-pemimpin sepakat untuk menerapkan kapital bank baru dan standard likuiditas dan juga menangani masalah-masalah besar dan melanjutkan reformasi peraturan-peraturan finansial.

Reformasi struktural bertujuan untuk meningkatkan dan melanjutkan permintaan global, memperkuat penciptaan lapangan pekerjaan, menyeimbangkan ekonomi global dan mempromosikan pertumbuhan. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, G-20 merumuskan serangkan tindakan

yang diambil termasuk reformasi pasar, reformasi bursa tenaga kerja dan pembangunan sumber daya manusia, reformasi perpajakan, kebijakan-kebijakan yang berorientasi pertumbuhan dan inovasi, reformasi untuk mengurangi ketergantungan negara-negara anggota terhadap permintaan eksternal, reformasi untuk memperkuat jaringan pengaman sosial dan investasi dalam infrastruktur.

KTT Seoul juga mengembangkan Rencana Aksi Multi-Tahun *(Multi Year Action Plan)* untuk mempromosikan keberlanjutan eksternal dengan memperkuat kerjasama multilateral dan melanjutkan secara penuh kebijakan-kebijakan untuk mengurangi ketimpangan yang eksesif, dan menjaga sistem nilai tukar. Pemimpin-pemimpin G-20 juga sepakat untuk memperluas dan merumuskan kembali MAP konsultatif yang dilakukan negara termasuk monitoring komitmen-komitmen dan *asesment* kemajuang-kemajuan yang telah dicapai untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama.

Pemimpin-pemimpin G-20 juga menyapakati *Konsensus Pembangunan Seoul bagi Pertumbuhan yang Seimbang* dan *Rencana Aksi Multi-Tahun tentang Pembangunan*. Mereka mengadopsi enam prinsip utama yang menjadi dasar konsensus dan rencana. Konsensus mengidentifikasi sembilan pilar kunci dari aksi-aksi untuk mengatasi penyumbat pertumbuhan inklusif, berkelanjutan dan kokoh di negara-negara berkembang, khususnya di negara-negara dengan pendapatan yang rendah. Rencana Aksi Multi-Tahun menggariskan tindakan-tindakan khusus dan detil untuk mengatasi hambatan utama tersebut. Pemimpin-pemimpin G-20 memberikan mandat pada kelompok kerja Pembangunan untuk memonitor implementasi Rencana Aksi tersebut. Pembangunan yang didasarkan pada konsensus akan menjadi bagian peting pada KTT-KTT G-20 selanjutnya.

Komitmen-komitmen G-20 jelas menunjukkan bahwa anggota-anggota G-20 yakin akan pentingnya sistem ekonomi terbuka untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan seimbang. Koordinasi di antara negara-negara anggota dalam sektor keuangan, perbankan domestik untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional, dan standard-standard regulasi internasional bagi lembaga-lembaga finansial domestik merupaka agenda integral untuk menciptakan ekonomi global yang tahan krisis.

e. Efektivitas G-20 dalam pemulihan krisis finansial global

Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian terdahulu, G-20 telah berupaya keras untuk melakukan koordinasi kebijakan untuk mengatasi krisis ekonomi baik yang terjadi tahun 1990an maupun yang kemudian terjadi di tahun 2007. Fokus utamanya adalah bagaimana memulihkan kembali pertumbuhan ekonomi melalui sejumlah stimulus fiskal dan moneter. Apakah G-20 berhasil dalam mengatasi krisis finansial global? Apakah G-20 dapat membuktikan efektivitasnya yang selama ini diklaim sebagai keunggulan yang dimiliki karena jumlah anggotanya yang terbatas?

Dalam evaluasinya di KTT G-20 di Toronto di bulan Juni 2010, pemimpin-pemimpin G-20 menyatakan:

> *"Upaya-upaya kami hingga hari ini telah membuahkan hasil-hasil yang baik. Stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi secara global, yang belum ada presedennya, sedang memainkan peran besar dalam menata kembali permintaan swasta dan pinjaman. Kami sedang mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan stabilitas dan kekuatan sistem finansial kami. Sumber-sumber bagi lembaga-lembaga finansial internasional yang meningkat secara signifikan telah membantu menstabilkan dan mengatasi dampak krisis pada masyarakat yang paling rentan. Reformasi tata kelola dan manajemen yang sedang berlangsung, yang harus diseleaikan, akan meningkatkan efektivitas dan relevansi lembaga-lembaga ini. Kami telah berhasil menjaga komitmen kuat kami melawan proteksionisme."*[20]

Sejumlah bukti menunjukkan bahwa secara umum terdapat tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil di negara-negara anggota G-20. Terdapat juga sejumlah bukti untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di negara-negara non anggota G-20. Ini bisa dipakai untuk menunjukkan bahwa stabilisasi yang terjadi di negara-negara anggota G-20 langsung atau tidak langsung telah menahan kontraksi yang sebelumnya terjadi di negara-negara non anggota G-20. Laporan Bank Dunia mencatat sejumlah kemajuan penting yang mengkoreksi turunnya pertumbuhan ekonomi baik di negara maju maupun di negara-negara berkembang pada periode 2007-

20 Lihat the G-20 Toronto Summit Declaration, 26-27 Juni 2010.

2009. GDP dunia yang jatuh hingga 2,2 persen di tahun 1999 diperkirakan akan tumbuh menjadi 2,7 persen di tahun 2010 dan 3,2 persen di tahun 2011. Volume perdagangan dunia yang turun hingga 14,4 persen di tahun 2009, diproyeksikan akan meningkat hingga 4,3 persen di tahun 2010 dan 6,2 persen di tahun 2011.[21]

Bank Dunia juga mencatat proyeksi pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang hingga 5,2 persen di tahun 2010 dan 5,8 persen di tahun 2011. Ini artinya mereka meningkat dari 1,2 persen di tahun 2009. Negara-negara kaya juga bertumbuh antara 1,8 hingga 2,3 persen di tahun 2010 dan 2011.[22]

Tabel 1. Pertumbuhan GDP Riil Dunia
(prosentase perubahan dari tahun sebelumnya)

	2008	2009e	2010f	2011f	2012f
Dunia	1,7	-2,1	3,3	3,3	3,5
Pendapatan Tinggi	0,4	-3,3	2,3	2,4	2,7
Negara-negara OECD	0,3	-3,4	2,2	2,3	2,6
Wilayah Euro	0,4	-4,1	0,7	1,3	1,8
Jepang	-1,2	-5,2	2,5	2,1	2,2
Amerika Serikat	0,4	-2,4	3,3	2,9	3,0
Non-anggota OECD	3,0	-1,7	4,2	4,2	4,5
Negara-negara berkembang	5,7	1,7	6,2	6,0	6,0
Asia Timur dan Pasifik	8,5	7,1	8,7	7,8	7,7
China	9,6	8,7	9,5	8,5	8,2
Indonesia	6,0	4,5	5,9	6,2	6,3
Thailand	4,8	1,7	3,0	3,7	4,0
Eropa dan Asia Tengah	4,2	-5,3	4,1	4,2	4,5
Rusia	5,6	-7,9	4,5	4,8	4,7
Turki	0,7	-4,7	6,3	4,2	4,7
Polandia	4,8	1,7	3,0	3,7	4,0

21 Updated World Bank Analysis: Crisis, Finance and Growth. http://econ.worldbank.org/ diakses tanggal 8 Agustus 2010.

22 Ibid.

Amerika Latin dan Karibia	4,1	-2,3	4,5	4,8	4,7
Brasil	5,1	-0,2	4,5	4,1	4,2
Meksiko	1,8	-6,5	4,3	4,0	4,2
Argentina	7,0	-1,2	4,8	3,4	4,4
Timur Tengah dan Afrika Utara	4,2	3,2	4,0	4,3	4,5
Mesir	7,2	4,7	5,0	5,5	5,7
Iran	2,3	1,8	3,0	3,2	3,2
Algeria	2,4	2,1	4,6	4,1	4,3
Asia Selatan	4,9	7,1	7,5	8,0	7,7
India	5,1	7,7	8,2	8,7	8,2
Pakistan	2,0	3,7	3,0	4,0	4,5
Bangladesh	6,2	5,7	5,5	5,8	6,1
Afrika Sub-Sahara	5,0	1,6	4,5	5,1	5,4
Afrika Selatan	3,7	-1,8	3,1	3,4	3,9
Nigeria	5,3	5,6	6,1	5,7	6,4
Kenya	1,7	2,6	4,0	4,9	5,4

Sumber: World Bank, The Global Outlook in Summary, 2010.

Seperti ditunjukkan pada Tabel. 1 yang disusun oleh Bank Dunia, di antara negara-negara berkembang, kawasan Asia Timur dan Pasifik menunjukkan pertumbuhan yang relatif kuat jika dibandingkan di Eropa dan Asia Tengah yang saat ini dilanda resesi; perekonomian Timur Tengah dan Afrika Utara menunjukan kemampuan untuk menghindarkan diri dari dampak krisis yang sangat buruk. Negara-negara di kawasan Amerika Latin dan Karibia juga mengalami pertumbuhan yang cukup penting. Hanya negara-negara Afrika Sub-Sahara yang masih merasakan dampak berat dari krisis finansial global.[23]

Namun diakui bahwa ancaman akan terjadinya krisis tetap membayangi perekonomian dunia. Peningkatan nilai-nilai aset dan tekanan inflasi yang tinggi tetap menjadi kekhawatiran menteri-menteri keuangan negara-negara di Asia Timur. Krisis yang terjadi di Yunani merupakan peringatan bahwa resiko utang negara *(sovereign debt risks)* dapat berakibat fatal terhadap resiko yang sama yang bersifat global dan mendestabilisasikan aliran kapital internasional

23 Ibid.

di negara-negara Asia Timur.

Barangkali perekonomian telah mulai mengalami pemulihan dari krisis finansial global dan pemulihan ini berkat kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh anggota-anggota G-20. Namun krisis ekonomi yang dihadapi Yunani yang berimbas ke negara-negara di Eropa memunculkan pertanyaan seberapa jauh sebetulnya pemulihan ekonomi global bersifat stabil?

Ini pun disadari oleh menteri-menteri keuangan G-20. Dalam pernyataan yang dikeluarkan di Busan, Korea, Juni 2010 dinyatakan bahwa: *"... ketidakstabilan dalam pasar finansial saat ini mengingatkan kita bahwa tantangan besar tetap menghadang dan ini mendorong pentingnya kerjasama internasional."*[24]

> Salah seorang responden penelitian memberikan kehirauan yang sama: *"Pekerjaan G-20 belum selesai. Meski kita menyaksikan tanda-tanda pemulihan ekonomi, krisis hutang Yunani menunjukkan kerentanan pemulihan di Eropa dan potensi bagi berlanjutnya ketidakstabilan pasar finansial yang masih berlangsung saat ini. Di tahun 2010, tantangan utama bagi G-20 adalah melanjutkan pemulihan ekonomi. Kita harus sepakat bahwa upaya-upaya untuk meningkatkan dan menyeimbangkan kembali pertumbuhan global sementara membuat konsolidasi fiskal di negara-negarara dengan jumlah hutang yang tinggi. Ini tugas yang sulit yang menuntut kerjasama yang kuat."*[25]

Menteri-menteri Keuangan negara-negara anggota G-20 menyadari situasi ini dalam pertemuan mereka di Busan, Korea bulan Juni 2010: *"Keguncangan dalam pasar finansial belakangan ini mengingatkan kita bahwa masih terdapat tantangan besar dan semakin menunjukkan betapa pentingnya kerjasama internasional."*[26] Pemimpin-pemimpin G-20 secara terbuka juga mengemukakan kepedulian yang sama dalam dokumen KTT Seoul: "Sejak kita terakhir bertemu, pemulihan global terus berlanjut, tetapi tetap terjadi juga resiko sebaliknya."[27]

---

24 Wawancara dengan salah satu responden dari kedutaan besar asing untuk Indonesia tanggal 2 Juni 2010.

25 Korespendensi melalui E-mail dengan perwakilan asing di Jakarta, anggota G-20.

26 G-20 Communique, Pertemuan Menteri-menteri Keuangan dan Bank Sentral, Korea, 5 Juni 2010.

27 Dokumen KTT Seoul.

Disamping pertanyaan menyangkut stabilitas pemulihan ekonomi nasional dan global, masih terdapat pertanyaan apakah dampak sosial yang ditimbulkan oleh krisis sudah pula teratasi? Laporan Bank Dunia mencatat bahwa krisis finansial telah menciptakan impak kumulatif yang sangat serius terhadap kemiskinan. 64 juta lebih orang diperkirakan hidup dalam kondisi kemiskinan yang sangat ekstrim pada akhir tahun 2010.[28] Krisis juga telah menambah beban berat bagi negara-negara miskin untuk menangani ribuan anak-anak yang kekurangan gizi.

G-20 telah memberikan perhatian sangat besar terhadap agenda pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan-kebijakan stimulus fiskal dan moneter, terutama dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Diyakini bahwa dengan penetapan kebijakan penanganan krisis, akan terjadi perbaikan pada sektor lapangan kerja terutama bila sektor-sektor produksi bisa hidup lagi. Demikian perbaikan daya beli masyarakat akan membaik seiring dengan hidupnya kembali sektor-sektor produksi.

Nyatanya, efek rembesan ini tidak serta merta berjalan seiring sejalan. Negara-negara mengalami situasi yang berbeda-beda menyangkut tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Dalam KTT di Toronto, pemimpin-pemimpin G-20 menyadari bahwa: *"Sementara pertumbuhan sedang pulih, pemulihan tetap rentan, pengangguran masih sangat besar, dan dampak sosial krisis masih dirasakan luas."*[29]

Kesadaran seperti ini justru yang menjadikan alasan akan pentingnya G-20 dalam mempromosikan kerjasama internasional untuk memperkuat economic recovery dan termasuk untuk membantu negara-negara berkembang yang paling rentan terhadap dampak sosial krisis ekonomi. G-20 berargumen:

> *"Untuk melanjutkan pemulihan, kita harus tetap melaksanakan rencana stimulus yang ada dan berupaya menciptakan kondisi-kondisi bagi permintaan swasta yang kuat. Pada saat yang sama, kejadian-kejadian belakangan ini menunjukkan pentingnya keuangan publik dan kebutuhan bagi negara-negara kita untuk menetapkan rencana-rencana yang kredibel, bertahap dan mendukung pertumbuhan untuk mengantarkan pada*

---

28 Updated World Bank Analysis: Crisis, Finance and Growth. http://econ.worldbank.org/ diakses tanggal 8 Agustus 2010.

29 The G-20 Toronto Summit Declaration, 26- 27 Juni 2010.

keberlanjutan fiskal yang sangat tergantung pada kondisi-kondisi nasional."[30]

G-20 telah memberikan perhatian terhadap jurang perbedaan tingkat kemajuan negara-negara berkembang dan maju, serta pengurangan kemiskinan. Di era krisis, isu ini menjadi sangat sensitif terutama karena terhadap kesan umum bahwa jurang tersebut menjadi semakin lebar karena adanya krisis finansial di negara-negara maju. Dalam KTT di Toronto, pemimpin-pemimpin G-20 bersepakat untuk membentuk suatu kelompok kerja pembangunan dengan mandat untuk mengelaborasi agenda pembangunan dan rencana kerja yang kongkrit, yang selaras dengan fokus G-20 untuk mempromosikan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi. KTT Seoul menindaklanjuti agenda pembangunan dengan mengidentifikasi masalah-masalah utama yang menghambat pembangunan di negara-negara berkembang dan menetapkan agenda untuk mengatasi masalah-masalah tesebut.

f. Kritik terhadap G-20 sebagai forum utama kerjasama ekonomi

Di samping pencapaian yang telah dibuat oleh G-20, G-20 tetap menuai kritik yang muncul dari negara-negara non anggota G-20 dan LSM. Sebagian tetap menekankan pentingnya 'partisipasi yang luas' dari seluruh negara untuk membangun *global economic governance*. Kritik juga muncul terkait dengan pemilihan negara-negara yang disebut mewakili negara-negara berkembang, terutama kemampuan negara-negara tersebut untuk terlibat dalam pembentukan arsitektur finansial global dan *global governance*. Di samping itu, kritik juga ditujukan pada fokus G-20 yang lebih mengedepankan pendekatan-pendekatan ekonomik rasional dan kurang memberikan penekanan pada penanganan dampak sosial dari krisis finansial. Kritik yang lebih keras melihat G-20 sebagai kepanjangan dan instrumen dari G-7 yang sejak lebih dari tiga dekade telah mendominasi tata ekonomi global.

1. Effektivitas versus Legitimasi

Proponen G-20 yang mengedepankan pentingnya efektivitas G-20 untuk mencapai hasil maksimal dari kerjasama eksklusif internasional mendapatkan

---

30 Ibid.

tantangan dari pengkritik yang tetap melihat pentingnya legitimasi melalui partisipasi yang luas dari bangsa-bangsa di dunia untuk membangun tata kelola ekonomi global. Siapa yang mengambil keputusan tentang tata pengaturan global merupakan isu yang harus diakomodasi untuk membuat keputusan-keputusan tersebut *legitimate*.

Berbagai analisa memang menyebut bahwa ekonomi dunia telah menunjukkan pemulihan kembali; pemulihan yang relatif cepat ini dapat dilihat sebagai kontribusi G-20 untuk mengkoordinasikan kebijakan yang efektif bagi penanganan krisis dan juga menyediakan dana yang lebih besar dalam lembaga-lembaga keuangan internasional. Namun beberapa responden penelitian ini melihat bahwa efektivitas G-20 masih bisa dipertanyakan dalam hal mempromosikan pertumbuhan yang seimbang dan dalam hal reformasi lembaga keuangan internasional Bretton Woods. KTT Seoul menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin G-20 dapat mendiskusikan tentang sistem nilai tukar mata uang di antara anggota-anggotanya. Nilai tukar dipahami sebagai isu besar karena pemimpin-pemimpin G-20 berbeda dalam hal bagaimana mereka dapat mempertahankan sistem nilai tukar nasional mereka. Tidak adanya rejim moneter internasional menjadi masalah besar yang mempengaruhi stabilitas ekonomi global dan dapat menyebabkan krisis yang lain di masa yang akan datang.[31]

Kemauan penuh negara-negara besar untuk merealisasikan komitmen bagi kemudahan-kemudahan bagi negara-negara berkembang untuk program pembangunan juga masih dipertanyakan. Seorang responden menyatakan: *"Benar bahwa pemimpin-pemimpin G-20 telah membuat komitmen-komitmen dalam forum tersebut. Tetapi begitu KTT berakhir, dan pemimpin kembali ke negara masing-masing, pemimpin-pemimpin akan mengedepankan kepentingan nasional mereka dan menjalankan bisnis sebagaimana biasanya."*[32] KTT Seoul telah menindaklanjuti komitmen-komitmen tersebut, namun tindakan-tindakan yang nyata tentu saja harus segera dibuktikan oleh para pemimpin G-20.

---

31 Seperti didiskusikan secara intensif dalam Focus Group Discussion dan Lokakarya tentang G-20 dan Agenda Pembangunan, 4 Nopember 2010.

32 Wawancara dengan penasihat senior lembaga finansial internasional di Jakarta tanggal 12 Agustus 2010.

2. Lebih fokus kepada penyelesaian krisis finansial, kurang perhatian untuk menyelesaikan dampak sosial di negara-negara miskin

Sebagaimana telah disinggung di bagian terdahulu, proponen G-20 mengadopsi keyakinan akan adanya efek rembesan *(trickle down effect)* dari instrumen ekonomik rasional, makro ekonomik, kebijakan fiskal dan moneter, untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan regulasi dan reformasi lembaga keuangan. Pemulihan pertumbuhan ekonomi ternyata tidak serta merta membuka peluang kerja yang berkualitas bagi mereka yang terkena dampak langsung dari krisis finansial global. Instrumen-instrumen ekonomik tersebut juga tidak memperbaiki kemampuan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan basis mereka dan mendapatkan akses yang cukup bagi pendidikan, kesehatan dan makanan.

Namun demikian, fakta bahwa pemulihan ekonomi tidak serta merta menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi mereka yang kehilangan pekerjaan karena dampak krisis finansial. Instrumen-instrumen ekonomik tidak secara otomatis memulihkan kemampuan penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan mendapatkan akses pada pelayanan pendidikan dan kesehatan. Tidak ada reformasi struktural yang mencukupi untuk mengatasi krisis pangan, khususnya di daerah-daerah pedesaan.[33]

Negara-negara miskin menghadapi masalah ganda; di satu sisi dana pembangunannya mengecil, di sisi lain terdapat kebutuhan bagi dana yang lebih besar untuk mengatasi pengangguran dan penanganan dampak-dampak sosial krisis seperti kekurangan gizi bagi penduduk miskin. Sekalipun pertumbuhan ekonomi telah menunjukkan pemulihan, negara-negara miskin masih berada pada situasi yang sangat rentan.

G-20 dilihat sebagai suatu pertunjukan *fashion* oleh negara-negara maju untuk memperlihatkan dominasi mereka dalam perekonomian dunia, daripada secara serious untuk menangani isu-isu pembangunan utama yang menghambat negara-negara miskin.[34] Negara-negara miskin tidak dapat

---

33 Henry Thomas Simarmata, Senior Advisor, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS). A note to the event of Focus Group Discussion and Workshop, "G-20 dan Agenda Pembangunan: Formulasi Rekomendasi bagi KTT G-20 di Seoul, Korea. Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia dan Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, 4 Nopember 2010.

34 Seperti didiskusikan dalam lokakarya G-20 dan Agenda Pembangunan tanggal 4 Nopember 2011.

mengandalkan pada komitmen-komitmen G-20, tetapi harus mencari cara lain untuk membangun kekuatan nasional untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya.

Aktivis-aktivis LSM mengkritik KTT Seoul atas kegagalannya untuk menunjukan komitmen serius dalam menangani isu-isu non finansial termasuk pengentasan kemiskinan dan untuk membantu anak-anak dan pekerja-pekerja yang miskin. Meskipun KTT Toronto telah mengadopsi komitmen terhadap pengentasan kemiskinan termasuk memperkenalkan kebijakn pajak transaksi finansial yang inovatif.[35] Pajak transaksi finansial telah diakui sebagai cara yang mungkin untuk *"membantu menjamin pendanaan yang dibutuhkan bagi pengurangan kemiskinan dan pencapaian Millenium Development Goals dan membantu negara-negara dengan pendapatan rendah dalam mengatasi dampak perubahan iklim pada saat di mana defisit fiskal mereka mulai mengancam aliran bantuan."*[36] IMF telah menunjukan feasibilitas teknis mekanismenya dan komite ekspert telah menulis laporan menyangkut feasibilitasnya pada tahun 2009.

3. G-20 sebagai "pedang" negara-negara G-7 dan WTO

Kritik ketiga melihat bahwa G-20 merupakan instrumen G-7 untuk mempertahankan hegemoninya dalam pembentukan dan berfungsinya *global economic governance* pasca krisis finansial. Negara-negara G-7 mendikte keputusan-keputusan dalam G-20 yang lebih mencerminkan tradisi pengaturan yang selama ini telah disepakati dan diterapkan oleh negara-negara G-7. Dengan G-20, negara-negara non anggota G-7 dibuat terikat dalam suatu sistem yang menguntungkan negara-negara anggota G-7. G-20 memiliki fokus pada sejumlah komitmen yang membuat G-7 dapat mengurangi defisit dalam anggaran mereka.[37]

Dalam hal pemimpin-pemimpin negara dalam G-7 gagal menggolkan inisiatifnya di forum multilateral lain, pemimpin-pemimpin negara maju

---

35 http://www.korea.net. Diakses tanggal 19 Nopember 2010.

36 Dennis Howlett, Please Keep pushing on the financial transaction Tax G-20 Sherpa telss civil society, http://www.makepovertyhistory.ca. diakses tanggal 19 Nopember 2010.

37 Lihat kritik director Institute of development Studies, http://www.ids.ac.uk/go/news/G-8-and-G-20--growth-will-improve-life-of-the-poorest diakses tanggal 2 Agustus 2010.

menjadikan forum G-20 untuk mendapat dukungan bagi inisiatif mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Ini misalnya terlihat nyata terkait dengan buntunya perundingan putaran DOHA (WTO). Pemimpin-pemimpin G-7 mengajak anggota G-20 lain untuk menyusun komitmen bersama menggolkan kepentingannya. Ini dapat dengan mudah dilihat pada komunike-komunike pemimpin G-20 yang mengulang-ulang keinginan mereka bagi kesuksesan putaran DOHA.[38]

Pandangan ini misalnya dieskpresikan oleh salah satu responden dari LSM nasional:

> "…, ini sebetulnya G-20 ini seperti pedangnya WTO. Jadi semua kebijakan WTO yang tidak disepakati secara multilateral, itu kemudian dibicarakan lagi di G-20 dan diditeilkan dan menjadi otoritatif untuk dilaksanakan oleh anggota G-20. Kalau anggota-anggota G-20 melaksanakan itu, negara-negara lain yang GDP nya rendah itu mau buat apa. Mereka tidak bisa melakukan hubungan dagang dengan negara-negara anggota G-20, kalau mereka tidak punya undang-undang yang menerapkan apa yang ada di dalam substansi kesepakatan WTO. Ya itu G-20 itu sebetulnya hanya salah satu ini aja, bukan hanya perpanjangan tangan, itu ini kok palu untuk menjalankan kebijakan. Jadi kalau perhatikan misalnya kesepakatan-kesepakatan WTO yang sampai sekarang tidak disepakati secara multilateral oleh anggota-anggotanya, itu di G-20 sudah ada itu, pelan-pelan...."[39]

4. G-20 sebagai organisasi tandingan kerjasama multilateral yang *legitimate*

Kritik terkait juga diarahkan pada peran G-20 sebagai tandingan dari organisasi-organisasi yang sudah ada dan memiliki legitimasi kuat. Dengan mendeklarasikan diri sebagai 'forum utama kerjasama ekonomi', seolah G-20 menempatkan diri sebagai forum utama di atas forum-forum *intergovernmental* lain yang saat ini sudah ada.

Melalui suratnya yang ditujukan pada Perserikatan Bangsa Bangsa, pemerintah Singapura mengingatkan posisi G-20 sebagai komplemen

38 Perhatikan deklarasi-deklarasi KTT Washington, London, Pittsburgh dan Toronto.
39 Wawancara dengan perwakilan forum LSM Indonesia tanggal 27 Mei 2010.

dari organisasi global seperti PBB dan karenanya G-20 harus menegaskan pengakuannya terhadap PBB:[40]

"PBB adalah satu-satunya badan global dengan partisipasi universal dan legitimasi kuat. Proses G-20 seharusnya mengakui dan merefleksikan realitas ini.Proses G-20 dan tindakan-tindakan dan keputusan-keputusannya seharusnya melengkapi dan memperkuat PBB."

Aktivis LSM di Indonesia juga mengekspresikan kritik yang sama:

"..., posisi LSM sebetulnya secara global itu menolak kehadiran G-20, karena dia menjadi lembaga tandingan terhadap lembaga-lembaga yang selama ini diakui sebagai legitimate untuk membuat keputusan yang mengikat secara internasional, yaitu PBB. Dan dengan kehadirannya G-20, yang menguasai lebih dari 3/4 GDP dunia itu, membuat PBB tidak signifikan sebagai pengaruh dibandingkan dengan G-20. Karena itu kita harus menolak kehadiran G-20, apalagi G-20 hanya mengutamakan ekonomi, selain itu tidak ada."[41]

Perluasan isu-isu dalam proses G-20 telah memunculkan kepedulian menyangkut legitimasi G-20. Banyak organisasi multilateral telah menangani agenda yang serius bahkan sebelum G-20 dibentuk pada tahun 1999. Kritik menunjukkan bhwa G-20 tampaknya akan mengambil alih hampir semua isu-isu global dan berjanji untuk menanganinya dengan lebih efektif daripada organisasi multilateral lainnya. Kritik juga menyebut G-20 menyepelekan peran anggota dalam organisasi yang telah berumur panjang seperti IMF dan Bank Dunia. Bagaimana 19 negara dapat memutuskan reformasi IMF dan Bank Dunia dengan mengabaikan peran determinan dari ratusan anggota yang lain dari lembaga finansial tersebut?

40 Lihat Surat tertanggal 11 March 2010 dari Perwakilan Tetap Singapura untuk PBB ditujukan pada Sekjen PBB, dalam *Sixty-Fourth session, agenda item 51 (b), Macroeconomic policy questions: international Financial system and development.*

41 Wawancara dengan perwakilan forum LSM Indonesia tanggal 27 Mei 2010.

5. Retorika reformasi IMF dan Bank Dunia

Skeptisisme muncul terkait dengan komitmen bagi reformasi institusi-institusi *Bretton Woods* terutama menyangkut perubahan *voting share* dan prekondisi bagi penetapan perubahan tersebut di lembaga-lembaga keuangan internasional tersebut. Pemberian bobot yang lebih besar kepada negara-negara berkembang akan berimplikasi pada kesediaan negara-negara maju untuk mengurangi bobot suara mereka dalam IMF dan Bank Dunia. Pertanyaannya adalah apakah negara-negara maju siap untuk memberikan bobot suaranya kepada negara-negara berkembang?[42]

Pertanyaan lain muncul terkait negara berkembang manakah yang akan memiliki hak istimewa menerima bobot tersebut? Pertanyaan kedua bahkan sama sulitnya karena ini akan memicu persaingan di antara negara-negara berkembang untuk memainkan pengaruhnya dalam IMF dan Bank Dunia melalui tambahan bobot suara. Diperlukan penetapan tentang kriteria pemberian bobot tersebut. Namun penetapan ini juga akan memicu perdebatan sengit dan subjektif di antara negara-negara anggota IMF itu sendiri.

Persyaratan menyangkut besarnya kontribusi bagi IMF dan Bank Dunia akan membawa implikasi pada penambahan kontribusi dari negara-negara berkembang yang ingin mendapatkan tambahan bobot suara. Prekondisi lain seperti tingkat keterbukaan ekonomi negara daripada jumlah populasi akan memicu perdebatan soal ukuran tingkat keterbukaan tersebut. Negara kecil namun dengan keterbukaan ekonomi yang besar dan pencapaian ekonomi seperti diukur dengan tingkat GDP perkapita tentu saja akan mendapatkan hak istimewa untuk memperoleh tambahan bobot suara.[43]

g. Agenda penguatan peran representasi, komitmen substantif bagi pembangunan, dan peran kaukus regional

G-20 tidak dapat mengenyampingkan kritik-kritik yang telah disebutkan di bagian terdahulu. Sejumlah agenda perlu terus diupayakan oleh anggota-anggota G-20 yaitu *outreaching* ke non anggota G-20, pembuatan komitmen yang

42 Kritik ini disampaikan oleh beberapa responden dari lembaga penelitian dan perwakilan lembaga internasional untuk Indonesia dalam wawancara-wawancara terpisah di bulan Mei 2010 dan tanggal 12 Agustus 2010.

43 Ini misalnya diekspresikan oleh peneliti senior pada lembaga finansial Indonesia dalam wawancara tanggal 12 Agustus 2010.

lebih substantif untuk membantu negara-negara berkembang yang kesulitan dalam melakukan pemulihan ekonomi, dan pembentukan kaucus negara-negara berkembang untuk lebih menyuarakan kepentingan negara-negara non anggota G-7 dalam G-20 dan secara umum negara-negara berkembang yang tidak menjadi anggota G-20.

1. Konsultasi ke negara non-anggota G-20 dan LSM melalui formalisasi mekanisme

Agenda penting yang perlu untuk terus dilakukan adalah konsultasi yang terus menerus antara G-20 dengan negara-negara non anggota G-20 melalui saluran yang formal dan reguler. Selama ini, Ketua G-20 memiliki tugas untuk melakukan pertemuan konsultatif dan sekaligus sosialisasi ke negara-negara non anggota G-20. Anggota-anggota G-20 diharapkan berinisiatif untuk mengambil peran aktif dalam merangkul negara-negara di luar G-20.

Apa yang diusulkan oleh Singapura dan 23 negara lain yang tergabung dalam *Informal Global Governance Group* (3G) penting untuk dipertimbangkan:[44]

> *"Adalah penting bahwa G-20 melibatkan PBB dan anggota-anggotanya melalui saluran yang teratur dan reguler, termasuk konsultasi dengan anggota yang lebih luas sebelum KTT G-20. Ini akan memberikan kesempatan kepada semua negara, khususnya negara-negara yang lebih kecil, yang merupakan mayoritas dalam PBB, untuk mengemukakan isu-isu yang menjadi kepedulian mereka dan membuat suara-suara mereka didengar. Lebih lanjut, tuan rumah-tuan rumah KTT G-20 seharusnya memberikan update hasil-hasil pertemuan KTT kepada anggota-anggota PBB yang lain."*

Harapan dan penekanan pentingnya konsultasi misalnya juga diekspresikan oleh salah satu negara non anggota G-20 di Asia Tenggara:

> *"Suka atau tidak, G-20 telah menjadi forum utama kerjasama ekonomi*

---

44 Lihat surat tertanggal 11 Maret 2010 dari *the Permanent Representative of Singapore to the United Nations Addressed to the Secretary-General, Sixty-Fourth session, agenda item 51 (b), Macroeconomic policy questions: international Financial system and development.*

dengan keputusan anggota-anggotanya yang merupakan produsen dari 90% GDP dunia dan rumah dari duapertiga populasi dunia. Isu yang lebih penting lagi adalah bagaimana menjamin efektivitas dan relevansi dan tidak menjadikan G-20 sebagai suatu talk show baru. Dalam kaitan ini, kami melihat sangat pentingnya konsultasi dan koordinasi yang lebih terbuka di antara G-20 dan non anggota G-20 dan juga organisasi-organisasi internasional, khususnya PBB, lembaga-lembaga finansial internasional dan bank-bank pembangunan multilateral. Proses ini perlu dilembagakan oleh G-20 supaya dapat menjembatani jurang yang ada dalam kerjasama internasional untuk menjamin pemulihan ekonomi global yang berkelanjutan dan pertumbuhan yang seimbang."[45]

Institusionalisasi pertemuan konsultasi dengan non anggota menjadi sangat penting dan termasuk pula bagaimana membuat forum konsultasi menjadi lebih substantif bukan sekedar formalitas belaka.[46] Pertanyaannya adalah bagaimana G-20 membangun mekanisme yang lebih formal untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan konsultasi dimana non anggota dapat mengemukan pandangan mereka dan kerananya dapat memberi kontribusi pada proses G-20?

Langkah pertama untuk memformalkan konsultasi tersebut adalah bahwa pemimpin-pemimpin G-20 membicarakan dan bersepakat tentang mekanisme formal, termasuk pula menyangkut isu-isu subtantif dan kriteria untuk menyeleksi non anggota G-20 yang akan diundang.

Ada beberapa mekanisme formal yang feasibel untuk menjangkau non anggota:

Mekanisme pertama adalah memformalkan pendekatan regional dan antar kawasan melalui pembentukan kelompok kontak regional. G-20 harus membangun konsensus tentang saluran formal dengan organisasi-organisasi regional dan inter-regional yang sudah ada. Ketua G-20 seharusnya mengambil inisiatif untuk memfasilitasi pembentukan kelompok kontak regional, tetapi dapat juga memberikan mandat formal kepada anggotanya untuk melakukan

---

45 Wawancara dengan perwakilan dari Kedutaan Besar Thailand untuk Indonesia tanggal 16 Juni 2010.

46 Diskusi tentang formalisasi mekanisme outreach telah dipublikasikan dalam Thomas Fues dan Peter Woff (eds.) 2010. G-20 and Global Development. Bonn: DIE.

konsultasi dengan organisasi-organisasi regional melalui kelompok kontak tersebut.

Pembentukan kelompok kontak ASEAN-Indonesia-G-20 dapat menjadi model bagaimana G-20 dapat berinisiatif dalam memformalkan mekanisme *outreach* regional. Melalui kelompok kontak ini, Indonesia dapat menyelenggarakan konsultasi reguler dengan Ketua dan Sekjen ASEAN dalam mengkoordinasikan posisi Indonesia dan ASEAN dalam proses G-20. Pertemuan-pertemuan menteri-menteri keuangan ASEAN bertujuan untuk membangun konsensus tentang isu-isu strategis yang sedang dibicarakan dalam G-20. Indonesia kemudian bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa komitmen-komitmen G-20 tidak bertentangan dengan kepentingan negara-negara anggota ASEAN.

Afrika Selatan dan Uni Afrika didorong pula untuk membentuk forum serupa yang dapat menjadi tempat konsultasi reguler antara Afrika Selatan sebagai anggota G-20 dan anggota-anggota Uni Afrika secara formal. Telah diakui bahwa bangsa-bangsa Afrika masih belum memiliki perwakilan yang cukup dalam G-20. Konsensus saat ini tentang partisipasi perwakilan Uni Afrika dan satu negara Afrika sebagai observer permanen dalam KTT G-20 akan mendorong bangsa-bangsa Afrika untuk menekankan pentingnya kelompok kontak Uni Afrika-Afrika Selatan dan G-20. Kelompok ini dapat mengidentifikasi kepentingan-kepentingan bangsa-bangsa Afrika, khususnya dalam mendukung upaya mereka untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka kepada G-20 melalui perwakilan-perwakilan mereka yang hadir dalam KTT G-20.

Brasil, Argentina dan G-20 dapat pula membentuk kelompok kontak regional serupa bersama-sama dengan Mercado Comun del Sur (Mercosur). Konsensus G-20, yang tidak memasukkan Mercosur sebagai observer permanen dalam KTT G-20, menjadi alasan kuat untuk membentuk kelompok kontak regional tersebut. Kelompok kontak Amerika Selatan ini harus merangkul anggota-anggota tetap dan partnernya dan mungkin juga menjangkau bangsa-bangsa yang tidak menjadi anggota Mercosur.

Pendekatan kedua yang feasibel juga adalah konsultasi yang formal dengan organisasi global seperti PBB. Ketua G-20 seharusnya memainkan peran formal dalam mekanisme ini. Ini dapat difasilitasi melalui partisipasi formal Sekretaris Jenderal PBB dalam KTT G-20 atau pertemuan khusus anggota-anggota PBB dengan ketua G-20 untuk membicarakan isu-isu khusus

tertentu. Namun kehadiran Sekretaris Jenderal PBB seharusnya tidak sekedar seremonial tau simbolik, tetapi lebih substantif dengan memfokuskan pada isu-isu global yang sedang dibicarakan dalam KTT G-20. Perwakilan PBB seharusnya memiliki ruang yang cukup untuk mengemukan pandangan-pandangan mereka terhadap isu-isu yang sedang dibicarakan dalam G-20. Pandangan-pandangan mereka penting dipertimbangkan sebagai referensi untuk membuat komitmen-komitmen dalam G-20.

Praktik baik dalam mengundang non anggota G-20 untuk hadir dalam kelompok kerja G-20 perlu diformalkan oleh G-20. Ketua kelompok kerja dalam konsultasinya dengan ketua G-20 dapat menyeleksi non anggota yang ingin berpartisipasid alam pertemuan kelompok kerja. Untuk membuat pertemuan ini lebih subtantif dan efektif, seleksi partisipan dari non anggota harus didasarkan pada kemampuan negara untuk memberi kontribusi kepada kelompok kerja dan atau relevansi agenda tersebut dengan negara yang diundang. Bangsa-bangsa yang akan sangat terpengaruh oleh keputusan yang dibuat dalam G-20 perlu mendapat prioritas untuk diundang dalam kelompok kerja.

Menyusul terbentuknya Kelompok Kerja dalam Pembangunan di KTT Toronto, sangatlah penting bagi G-20 untuk melibatkan LSM yang telah menaruh perhatian serius pada agenda pembangunan dalam proses G-20. Inisiatif Korea untuk memfasilitasi diskusi dengan LSM melalui apa yang disebut Civil G-20, pertemuan outreach khusus antara Ketua-ketua Sherpa G-20 dan LSM internasional sebelum KTT Seoul, harus dilihat sebagai langkah penting untuk memformalisasikan partisipasi LSM. Civil G-20 dapat dilihat sebagai partner penting bagi G-20 untuk membantu memenuhi misi global G-20.

Pemerintah Perancis dan Meksiko yang akan masing-masing menjadi tuan rumah KTT G-20 di tahun 2011 dan 2012, seharusna mengikuti inisiatif Korea untuk menyambut Civil G-20. Formalisasi dialog antara forum intergovernmental dan pemimpin LSM dapat menjadi kesempatan bagi kontribusi yang lebih mendasar bagi G-20.

Untuk menjadikan pertemuan *outreach* efektif, KTT G-20 seharusnya merangcang suatu kerangka umum bagi konsultasi tersebut; tuan rumah KTT G-20 dan ketua-ketua Sherpa dapat mendiskusikan lebih detil kerangka tersebut. Kelompok Kerja Pembangunan dapat memainkan peran penting untuk mengumpulkan beragam perspektif terkait isu-isu kunci yang harus

dibicarakan dalam KTT-KTT berikutnya. Demikian juga Kelompok Kerja Anti Korupsi dapat mengundang non anggota G-20 untuk membicarakan pendekatan strategis dan rencana aksi untuk memerangi korupsi.

Di samping meningkatkan legitimasi dan efektivitas, mekanisme outreach yang terlembaga dan substantif, akan memperkuat peran G-20 sebagai pendekatan baru dalam tata kelola global yang dapat mengantar kesejahteraan bagi semua bangsa.

2. Komitmen bagi pembangunan di negara-negara miskin dan rentan terhadap krisis ekonomi

Lembaga-lembaga penelitian menemukan bahwa dampak krisis ekonomi sangat dirasakan di negara-negara miskin. Banyak orang kehilangan pekerjaan, sulit memperoleh makanan yang bergizi, biaya tinggi untuk membiayai hidup keluarga dan terutama juga anak-anak, kondisi kesehatan yang buruk karena fasilitas yang terbatas, dan ketegangan sosial dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kondisi ini diperparah dengan instabilitas politik dan korupsi oleh elit-elit politik di negara-negara miskin.

Karenanya G-20 harus memberikan porsi yang cukup untuk membantu negara-negara ini memperbaiki perekonomian mereka. G-20 dapat memberikan perhatian lebih dengan mengagendakan supaya lembaga-lembaga finansial memberikan porsi perhatian yang besar kepada negara-negara berkembang, bukan sekedar penambahan sumber-sumber dana bagi negara-negara maju untuk menstabilkan pertumbuhan ekonomi mereka.

KTT G-20 di Toronto menyiratkan itikad baik pemimpin-pemimpin G-20 untuk memberikan perhatian bagi orang miskin dan orang yang paling rentan yang kondisi hidupnya menjadi lebih buruk akibat terjadinya krisis ekonomi belakangan ini. Kelompok Kerja Pembangunan telah dibentuk. Deklarasi itikad ini dan pembentukan Kelompok Kerja ini harus diwujudkan dalam aksi yang nyata yang akan dilaksanakan dalam jangka pendek ini. KTT Seoul telah menunjukkan kemajuan dalam menangani isu-isu pembangunan dan menetapkan suatu rencana aksi. Bagaimanapun, pemimpin-pemimpin G-20 harus tetap mampu membuktikan komitmen mereka melalui tindakan nyata. KTT berikut di Perancis di tahun 2011 akan menunjukan seberapa jauh komitmen-komitmen terhadap agenda pembangunan telah secara serius ditindaklanjuti oleh pemimpin-pemimpin G-20.

3. Penguatan *kemitraan* Utara-Selatan dan peningkatan peran *emerging economies*

Penguatan kemitraan Utara-Selatan menjadi agenda penting untuk merespon kritik bahwa G-20 semata-mata merupakan instrumen negara-negara G-7 untuk melanjutkan dominasinya dalam perekonomian dunia. Negara-negara maju perlu bersifat toleran terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi negara-negara berkembang dalam G-20 menyangkut pemenuhan komitmen regulasi seperti misalnya Basel 3 yang masih sulit dilaksanakan; negara-negara ini juga perlu terbuka terhadap ide-ide baru menyangkut sistem finansial alternatif yang dikembangkan oleh negara-negara berkembang.

Penyelenggaraan KTT di Korea pada bulan Nopember 2010 akan memiliki arti penting karena untuk pertamakalinya KTT G-20 diselenggarakan di negara di luar anggota G-7. Pada tahun 2012, Meksiko akan menjadi tuan rumah KTT G-20 dan ini berarti menambah peran dan kontribusi *emerging economy* di luar G-7 pada pelembagaan forum G-20.

Tentu saja peran ini tidak sekedar bersifat simbolik. Harus dibuat langkah kongkrit di antara negara-negara berkembang untuk merumuskan kepentingan yang sama di antara mereka dalam G-20. Kaukus regional dapat dibangun sebagai langkah awal memperkuat posisi negara-negara berkembang dalam G-20. Ini dapat menghilangkan kesan akan ketidakmampuan negara-negara berkembang untuk duduk sejajar dengan negara-negara maju dalam G-20.

II.
INDONESIA DAN G-20

> ”Sebagai anggota G-20, kita dapat membantu mereformasi arsitektur perekonomian dunia, serta dapat berkontribusi bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi global yang kuat, berimbang dan berkelanjutan”[47]

Posisi Indonesia terhadap G-20 sebagai forum utama kerjasama ekonomi internasional sangat jelas, yaitu mendukung secara penuh wadah formal yang merangkul negara maju dan negara berkembang. Dalam pidato tahunannya di depan Dewan Perwakilan Rakyat bulan Agustus 2010, Presiden Susilo Bambang Yudoyono memperlihatkan antusiasisme yang tinggi bagi Indonesia untuk memberi kontribusi bagi penataan struktur finansial global sebagaimana tercermin dalam kutipan di atas. Indonesia mengakui bahwa dalam konteks sistem internasional yang sedang berubah pasca berakhirnya Perang Dingin, ruang gerak Indonesia dalam pentas internasional kini terbuka semakin lebar.

Indonesia sepenuhnya menyadari bahwa keterlibatannya dalam G-20 memberi peluang bagi Indonesia untuk semakin mendunia: ”Inilah saatnya prestasi, produk,budaya dan ide-ide Indonesia semakin menjadi bagian dari dinamika di tingkat global”.[48] Peningkatan kinerja diplomasi Indonesia yang bebas, aktif dan transformatif diakui oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono

---

47 Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-65 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia tanggal 16 Agustus 2010.

48 Ibid.

sebagai keharusan untuk menciptakan peluang bagi realisasi kepentingan nasional Indonesia.

Bab II ini mendeskripsikan posisi dan kepentingan Indonesia dalam G-20 dan seberapa jauh Indonesia telah memainkan perannya dalam proses G-20. Bab ini juga akan mendeskripsikan bagaimana Indonesia sebagai anggota G-20 memenuhi komitmen-komitmennya terhadap G-20 dan tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia dalam proses-G-20.

a. Posisi Indonesia: G-20 sebagai rumah ekonomi dan peradaban

Pemerintah Indonesia mengakui bahwa G-20 adalah forum yang penting dan Indonesia seharusnya berpartisipasi penuh di dalamnya. Ini menjadi dorongan kuat bagi Indonesia untuk memainkan peran serius dalam pertemuan-pertemuan G-20. Bagi Indonesia, G-20 pertama-tama adalah sebuah forum ekonomi yang penting di mana Indonesia dapat mempromosikan kepentingan ekonomi nasionalnya dan berkontribusi pada pembentukan tata kelola ekonomi global.[49] G-20 telah dibentuk tahun 1999 ketika dunia menghadapi krisis ekonomi yang terjadi di beberapa negara di Asia. Pada saat itu G-20 mendiskusikan pendekatan-pendekatan ekonomi untuk mengatasi krisis tersebut. G-20 telah memainkan peran lebih besar sejak tahun 2007 ketika krisis finansial global yang lain melanda perekonomian global.

Khususnya sejak G-20 menyelenggarakan KTT pertamanya di Washington, pemimpin-pemimpin G-20 mulai membuat kebijakan-kebijakan ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi dengan cara yang terkoordinasi. Pemimpin-pemimpin melihat pentingnya kerangka pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan dan seimbang untuk membangun perekonomian global yang tahan terhadap krisis ekonomi serupa di masa yang akan datang. Pemimpin-pemimpin G-20 juga melihat pentingnya reformasi lembaga-lembaga finansial internasional dan pembentukan arsitektur ekonomi global yang kokoh.

Namun pemimpin-pemimpin Indonesia mengakui bahwa G-20 bukan saja forum ekonomi, tetapi juga forum yang menjadi tempat pertemuan bagi

---

49 Wawancara dengan Ketua Sherpa G-20 Indonesia tanggal 2 Juni 2010 dan koordinator G-20 untuk isu-isu finansial, Kementrian Keuangan Indonesia tanggal 30 September 2010.

beragam budaya dan peradaban. Presiden Yudhoyono menyatakan G-20 tidak hanya sebagai *economic powerhouse*, tetapi juga sebagai *civilation powerhouse* dengan alasan sebagai berikut:[50]

> *"G-20 pertama kali mengakomodasi semua peradaban besar — tidak hanya negara-negara Barat, tetapi juga China, Korea Selatan, India, Afrika Selatan dan lain-lain termasuk tiga negara dengan penduduk Muslim yang besar: Arab Saudi, Turki dan Indonesia. G-7, G-8, atau bahkan Dewan Keamanan PBB tidak membesar-besarkan pemisahan ini. G-20 merupakan perwakilan dari komunitas global yang multi-peradaban. Mungkin ini yang membuat mengapa G-20 berhasil menahan hancurnya global. Pergeseran dan tindakan terkoordinasi negara-negara G-20 telah memulai stabilisasi sistem finansial kita dan memulihkan kepercayaan, menjadi tanda-tanda awal pemulihan ekonomi."*

Dengan demikian, karena G-20 merupakan suatu forum tempat bergabungnya berbagai peradaban, G-20 menjadi lebih penting lagi bagi Indonesia yang ingin mengambil peran sebagai jembatan antara perbedaan.

Menteri luar negeri Indonesia, Marty Natalegawa menekankan bahwa posisi Indonesia dalam G-20 menjadi jalan bagi Indonesia untuk memperluas jaringan diplomasi dan pada saat yang sama membantu memecahkan masalah yang dunia sedang hadapi. Pada kesempatan lain Menteri luar negeri juga menyampaikan keinginannya untuk menciptakan "Kondisi dimana Indonesia betul-betul dianggap sebagai negara yang memiliki peran dan kepentingan bersifat global". Untuk mewujudkan itu, keterlibatan Indonesia di PBB dan forum-forum multilateral lain termasuk G-20 akan dimanfaatkan untuk semakin memantapkan peran Indonesia di kancah internasional. Kemudian beliau menambahkan, "G-20 yang secara definisi adalah suatu kelompok terbatas, dimana Indonesia menjadi anggota tetap, menjadi alat untuk menampilkan sosok Indonesia sebagai pemain yang berpengaruh di

---

50 Speech by H.E. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono "Towards Harmony Among Civilizations" diambil dari http://embassyofindonesia.it/towards-harmony-among-civilizations-speech-by-sby-at-the-john-f-kennedy-school-of-government-harvard-university/, diakses pada 5 Agustus 2010.

level dunia".[51] Dengan demikian bagi Indonesia, G-20 memiliki peran penting untuk Indonesia karena dapat membantu untuk mewujudkan citra dirinya sebagai negara yang dapat menjembatani perbedaan.

Mengakui posisi penting G-20, pemerintah Indonesia harus memasukan G-20 dalam arah baru platform kebijakan luar negeri Indonesia. Arah ini menegaskan bahwa untuk memajukan kualitas diplomasi ekonomi dalam forum-forum multilateral Indonesia akan berpartisipasi aktif dalam lembaga-lembaga multilateral seperti WTO, APEC, G-20 dan G-33 untuk mempromosikan kepentingan Indonesia dan negara-negara berkembang lain.[52]

b. Kepentingan-kepentingan Indonesia dalam G-20: dari penanganan krisis ke pembentukan citra global

Penelitian ini menemukan sedikitnya tiga kepentingan spesifik yang Indonesia perjuangkan dalam proses G-20. Kepentingan tersebut mencakup: untuk mengatasi krisis ekonomi, untuk meningkatkan daya saing nasional dan untuk memajukan citra Indonesia di mata masyarakat internasional.

1. Penanganan Krisis Ekonomi

Menjadi anggota G-20 pertama-tama memberikan Indonesia suatu kepercayaan lebih untuk menjaga perekonomian mampu bertahan dalam krisis besar yang melanda dunia. Sejak G-20 menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri pertama di tahun 1999, G-20 telah memfokuskan diri pada cara-cara efektif untuk menangani krisis tersebut. Diyakini bahwa tindakan kolektif sangatlah penting untuk mengatasi krisis ekonomi.

Indonesia telah mengalami sedikitnya dua krisis ekonomi sejak tahun 1990an. Krisis pertama terparah terjadi pada 1997-1998 yang ditandai dengan jatuhnya nilai Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Krisis moneter ini kemudian berdampak sistemik pada perekonomian Indonesia secara luas,

---

51 Wawancara dengan Ketua Sherpa G-20 Indonesia tanggal 2 Juni 2010 dan koordinator G-20 untuk isu-isu finansial, Kementrian Keuangan Indonesia tanggal 30 September 2010.

52 Speech by H.E. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono "Towards Harmony Among Civilizations" diambil dari http://embassyofindonesia.it/towards-harmony-among-civilizations-speech-by-sby-at-the-john-f-kennedy-school-of-government-harvard-university/, diakses pada 5 Agustus 2010.

bahkan terjadi krisis multidimensional pada bidang sosial, politik, budaya dan ketahanan. Pada krisis pertama, angka pengangguran meledak menjadi sekitar 40 juta. Hal tersebut menjadi masalah besar karena mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya, seperti contohnya kriminalitas.[53] Gizi buruk juga akan memperburuk kondisi kesehatan masyarakat.

Krisis kedua terjadi pada tahun 2008 yang merupakan imbas dari krisis finansial yang terjadi di Amerika Serikat. Walaupun pada krisis kali ini tingkat pengangguran di Indonesia tidak setinggi krisis sebelumnya, Indonesia tetap menerima dampak negatifnya. Pada krisis ini para produsen lokal menghadapi masalah untuk menjual produk-produk di pasar global seperti Amerika Serikat, karena kemampuan *potential global buyers* (masyarakat di negara maju yang terkena krisis) rendah. Untuk dapat bertahan para produsen harus memberhentikan tenaga kerja mereka dan membuat kebijakan-kebijakan mendesak. Krisis ini lagi-lagi menjadi multidimensional karena mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial.

Setelah mengalami dua kali krisis ekonomi, Indonesia memiliki kesempatan untuk memberi kontribusi pada pembentukan arsitektur ekonomi global yang tahan terhadap krisis serupa yang mungkin terjadi di masa depan. Mengkonsolidasikan pemulihan ekonomi dan menghindarkan krisis serupa menjadi kepentingan Indonesia dalam G-20.[54] Keduanya dapat dicapai dengan membuat regulasi-regulasi mendesak dan berkoordinasi dengan anggota-anggota G-20.

Memulihkan kepercayaan pasar dan menangani dampak krisis merupakan dua sasaran utama pemerintah Indonesia dalam jangka pendek.[55] Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah Indonesia memperkenal jaminan deposit, injeksi kapital, regulasi finansial dan jaringan pengaman sosial di tingkat domestik. Pemerintah Indonesia juga memanfaatkan pendekatan

---

53 http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/803/803/1/4/, diakses tanggal 5 Agustus 2010.

54 Wawancara dengan koordinator G-20 untuk isu-isu finansial, Kementerian Keuangan Indonesia tanggal 30 September 2010.

55 Seperti dikemukakan oleh Herfan Brillianto, koordinator G-20 untuk isu-isu finansial, Kementrian Keuangan Indonesia, dalam Focus Group Discussion dan Lokakarya, G-20 dan Agenda Pembangunan tanggal 4 Nopember 2010.

bilateral ke pemerintah-pemerintah asing dan lembaga internasional untuk memperoleh *'swap agreements'* dan *standby facilities*. Di samping itu, pemerintah Indonesia juga aktif dalam forum-forum internasional untuk bersama-sama memperkenalkan kebijakan seperti *counter-cyclical*, sumber-sumber dan instrumen lembaga keuangan internasional dan standard-standard internasional. Indonesia telah konsisten dalam mendukung negara-negara miskin melalui inisiatif-inisiatifnya. G-20 telah menjadi forum paling strategis di mana pendekatan Indonesia untuk mengembalikan kepercayaan pasar dan menangani dampak krisis dapat diaktualisasikan.

2. Peningkatan daya saing bangsa di tingkat global

Indonesia mengakui bahwa daya saing nasionalnya masih lemah dan karenanya Indonesia perlu untuk membuat upaya serius meningkatkannya. Daya saing bangsa dapat ditingkatkan melalui dua pendekatan:

Pertama, produk domestik Indonesia masih sulit berkompetisi dengan produk-produk asing dalam pasar global karena produk-produk tersebut gagal untuk memenuhi standard kualitas internasional. Ini merupakan suatu ironi karena Indonesia telah dikenal baik sebagai negara yang memiliki sumber-sumber alam yang sangat kaya, tetapi kurang memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi dan membuat produk-produk yang memenuhi permintaan internasional bagi kualitas standard. Negara-negara maju telah mengembangkan industri mereka di wilaya Indonesia dan kemudian mengekspor produk-produknya ke pasar global. Situasi ini dapat dilihat di daerah Batam, dimana Singapura menjadikan Batam sebagai daerah industrinya dengan menentukan jenis, bahan dan kualitas produk sesuai dengan standar Singapura.[56] Tampaknya sangat banyak agenda bagi Indoneia untuk meningkatkan daya saing nasionalnya.[57] Dengan bergabung dalam klub besar seperti G-20, Indonesia berharap dapat memperoleh keuntungan

---

56 Adriana Elisabeth, "Kecenderungan dan Tantangan Globalisasi Ekonomi terhadap Politik Luar Negeri Indonesia" dalam Ganewati Wuryandari (ed.), Perkembangan Politik Internasional dan Pengaruhnya terhadap Politik Luar Negeri Indonesia, Jakarta, LIPI Press, 2008, hal. 87.

57 Press Release, Kementerian Luar Negeri, "Curah Gagasan: Indonesia dan arah ke Depan G-20 Pasca Krisis Ekonomi Global" di Yogyakarta pada 11-12 Maret 2010, diambil dari http://www.deplu.go.id/Pages/PressRelease.aspx?IDP=863&l=id diakses pada 26 Juli 2010.

dengan meningkatkan kemampuan saingnya bagi produk-produk domestik di pasar global.

> Daya saing Indonesia pada tahun 2006 dapat dilukiskan dengan gambaran berikut:
> *"Indonesia adalah negara dengan daya saing ranking 50 di dunia, naik 19 dari tahun sebelumnya, menurut edisi terakhir Global Competitiveness Index (GCI) World Economic Forum tahun 2006-2007. India di depan China, Rusia dan Brasil. Karena Indonesia masih di tahap awal pembangunan ekonomi, ini cukup berhasil di beberapa bidang yang perekonomiannya didorong oleh inovasi yang maju. Negara ini mulai menunjukkan keuntungan dari kemajuan sustansial dalam transfer teknologi melalui FDI, pengembangan R&D oleh perusahaan-perusahaan, dan juga peningkatan dari efisiensi pasar, terkait dengan fleksibilitas yang lebih luas dalam pasar tenaga kerja dan akses yang lebih baik pada pinjaman dan pasar ekuitas lokal."*[58]

Bergabung dalam klub besar, Indonesia mendapat suat di kesempatan untuk meningkatkan *credit rating* sebagai tempat aman bagi investasi asing. Investasi asing diyakin penting untuk mempromosikan sektor-sektor produktivitas yang berkualitas tinggi. Peningkatan *credit rating* akan menarik sejumlah besar investasi bagi Indonesia dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang menjadi kepentingan nasional vital.

Perspektif kedua untuk meningkatkan daya saing bangsa menekankan pentingnya posisi tawar-menawar *(bargaining position)* yang lebih tinggi dalam arena internasional. Kekuatan tawar merukan faktor determinan untuk memfasilitasi proses negosiasi demi kepentingan nasional Indonesia. Hal ini juga kemudian akan berdampak kepada *political influence* yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia akan mendapat *political influence* yang lebih besar daripada sebelumnya apabila ia dapat mempengaruhi negara-negara lainnya.

Ketua Sherpa G-20 Indonesia mengakui bahwa menjadi anggota G-20 telah

---

58 The World Economic Forum Press Release "Indonesia Leaps 19 Places to 50th Rank in the World Economic Forum's 2006 Global Competitiveness Index" diambil dari http://202.148.132.171/econ/2006/WEF%20press%20release%20on%20 indonesia.pdf, diakses pada 5 Agustus 2010.

membantu Indonesia untuk mendapatkan posisi tawar yang diperhitungkan masyarakat internasional.[59] Suara Indonesia sekarang didengar dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain dalam forum-forum internasional. Ini karena kenyataan bahwa Indoensia memperoleh posisi strategis, dengan memiliki akses ke klub ekonomi yang sangat berpengaruh dan memiliki kompetensi untuk mewakili kepentingan-kepentingan bangsa-bangsa lain dalam proses G-20.

Menjadi anggota G-20 menunjukkan bahwa kemampuan Indonesia untuk berkontribusi dalam upaya global menangani krisis ekonomi telah diakui oleh negara maju dan negara berkembang.[60] Pelaku-pelaku pasar global saat ini memiliki kepentingan yang lebih besar di Indonesia dan siap untuk berinvestasi lebih di negara ini. G-20 adalah forum yang prestisius yang dapat membantu Indonesia dalam menampilkan kinerja dan prestasi positifnya di arena global.

Salah satu responden dari lembaga finansial terkemuka mensharingkan pandangannya tentang keuntungan yang Indonesia dapat petik sebagai anggota G-20:

> "… G-20 adal*ah forum plus. Dari apa yang saya bisa lihat, G-20 menguntungkan Indonesia dalam dua hal. Ini lebih banyak plus daripada minusnya, tetapi tidak semuanya plus. Keuntunganya adalah 'exposure' sangat bagus. Ini seperti Indonesia sekarang berada dalam satu klub dengan anak-anak besar. Ini memberi pertanda positif. Dan karena Indonesia telah berhasil dalam mengatasi krisis, ini membuat dunia tahu apa yang sekarang terjadi di Indonesia."*[61]

3. Peningkatan citra yang luwes di forum internasional

Bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, G-20 tidak hanya forum kerjasama ekonmi tetapi juga forum dimana beragam peradaban bertemu

---

59 Seperti disampaikan oleh Ketua Sherpa G-20 Indonesia dalam pidato kunci pada diskusi panel yang diselenggarakan Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral, Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia tanggal 20 September 2010.

60 Wawancara dengan koordinator G-20 untuk isu-isu finansial, Kementrian Keuangan Republik Indonesia tanggal 30 September 2010.

61 Wawancara dengan staf ahli lembaga finansial internasional tanggal 11 Juni 2010.

satu sama lain. G-20 adalah rumah yang menjadi sumber kekuatan ekonomi dan peradaban: *"G-20 untuk pertamakali mempertemukan semua peradaban besar ... bukan saja negara-negara Barat, tetapi juga China, Korea Selatan, India, Afrika Selatan dan negara-negara lainnya, termasuk tiga negara dengan penduduk Musim yang besar: Arab Saudi, Turki dan Indonesia."*[62]

Dalam konteks rumah peradaban, Indonesia siap untuk menjembatani perbedaan di antara peradaban termasuk Barat dan Islam. Presiden Yudhoyono menekankan bahwa Indonesia siap untuk menunjukkan wajah Islam yang moderat, toleran dan modern.[63]

Dalam berbagai pidatonya yang lain, Presiden Yudhoyono seringkai menekankan pentingnya membangun citra Indonesia di mata komunitas internasional. Dia menyoroti karakteristik Indonesia yang selalu memelihara pluralisme dan demokrasi. Indonesia adalah negara yang mayoritasnya beragama Islam. Presiden bangga bahwa nilai yang dipegang Indonesia: menjadi demokrasi Muslim terbesar di dunia.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menunjukkan pentingnya peran Indonesia dalam forum-forum internasional sebagai upaya untuk membangun citra nasional. Indoensia saat ini telah mendapatkan kesempatan besar untuk semakin aktif dalam forum internasional dengan menemukan solusi terbaik bagi masalah-masalah global dan memperluas jaringannya melalui G-20: *"Di forum internasional apa pun itu, termasuk ASEAN dan G-20, Indonesia akan terus berperan secara aktif, menjembatani visi yang berbeda antar negara-negara yang berselisih serta memperlihatkan sosok Indonesia yang moderat dan teguh dalam bersikap".*[64] Indonesia jelas ingin menunjukkan citranya sebagai pencipta perdamaian dan pembangun jembatan perbedaan.

Dalam menjalankan pemulihan citra ini tentunya pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, menyisipkan kepentingan ini ke dalam

---

62 Pidato Presiden Susilo Bambang Yudoyono, Towards Harmony Among Civilizations di Universitas Harvard, http://embassyofindonesia.it/towards-harmony-among-civilizations-speech-by-sbt-at-the-john-f-kennedy-school-of -government-harvard-university/ diakses tanggal 5 Agustus 2010.

63 Pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di depan sidangbesama DPR dan DPD dalam memperingati 65 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 16 Agustus 2010.

64 http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=239964 diakses pada 5 Agustus 2010, pukul 14.16 WIB.

perangkat politik luar negerinya, antara lain ke dalam tujuan politik luar negeri, sasaran politik luar negeri, serta program dan kebijakan Kementerian Luar Negeri RI. Disebutkan bahwa salah satu tujuan politik luar negeri Indonesia adalah untuk meningkatkan citra Indonesia melalui diplomasi publik[65] dengan sasaran politik luar negeri untuk menguatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat internasional bagi terpeliharanya keutuhan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemulihan ekonomi nasional.[66] Dengan demikian, Kementerian Luar Negeri memiliki program dan kebijakan untuk:

a) Meningkatkan peran aktif indonesia untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional, pemajuan dan perlindungan HAM, serta meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial budaya, keuangan, lingkungan hidup, perdagangan, perindustrian, investasi, dan perlindungan hak kekayaan intelektual melalui penguatan kerja sama multilateral.
b) Menyinergikan partisipasi Indonesia di G-20 dengan partisipasi Indonesia pada forum-forum lainnya. Selain untuk menyosialisasikan kesepakatan G-20 untuk mengamankan implementasi komitmen G-20 di tingkat nasional, regional dan global, upaya ini juga ditujukan untuk meningkatkan legitimasi G-20 dan mengurangi stigma G-20 sebagai forum yang eksklusif.
c) Mempromosikan kompatibilitas demokrasi dengan nilai-nilai Islam kepada negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa berdasarkan pengalaman Indonesia.
d) Meningkatkan citra Indonesia di luar negeri sebagai negara demokratis dengan penduduk mayoritas Muslim.[67]

Selain dari pihak pemerintah Indonesia, kelompok LSM pun mengakui vitalnya G-20 bagi citra Indonesia. Salah satu responden dari sebuah LSM internasional menyatakan bahwa Forum G-20 menjadi peluang bagi Indonesia. Indonesia tidak dipandang sebagai *under-developed country* (negara

---

65 Tujuan Politik Luar Negeri RI diambi dari http://www.deplu.go.id/Pages/Polugri.aspx?IDP=19&l=id diakses pada 29 Juli 2010.

66 Sasaran Politik Luar Negeri RI diambil dari http://www.deplu.go.id/Pages/Polugri.aspx?IDP=22&l=id diakses pada 29 Juli 2010.

67 Program dan Kebijakan Kementerian Luar Negeri RI, http://www.deplu.go.id/Pages/Polugri.aspx?IDP=11&l=id diakses pada 29 Juli 2010.

terbelakang), tetapi benar-benar sebagai *emerging economy* yang memiliki potensi. Di forum-forum internasional seperti G-20, Indonesia menjadi dipandang sebagai Negara demokratis dan menjadi sarana promosi citra Indonesia yang mendatangkan investasi bagi perekonomian Indonesia. Tidak hanya itu, di dalam G-20, Indonesia dapat melihat kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara maju, kemudian menerapkannya pada negara sendiri.

Dalam forum-forum internasional seperti G-20, Indonesia dipandang sebagai bangsa yang demokratik dan ini memudahkan prmosi citra Indonesia; citra seperti ini akan meningkatkan kepercayaan Indonesia di mata investor asing. Lebih banyak investasi asing berarti prospek yang lebih baik bagi perekonomian Indonesia. Di samping itu, berada dalam G-20 memberikan peluang bagi Indonesia untuk melihat lebih dekat bagaimana negara-negara maju untuk membuat kebijakan-kebijakan dan kemudian menerapkannya di Indonesia jika dipandang baik dan tepat.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pemerintah Indonesia telah menempatkan G-20 sebagai forum paling strategisdalam Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia. Ini mengindikasikan suatu pergeseran dalam diplomasi Indonesia: Indonesia telah aktif dalam mempromosikan ASEAN sebagai forum utama bagi diplomasi sejak 1967. Sekarang Indonesia menambahkan G-20 sebagai forum utama lain untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia dengan cara pandang yang konsisten dengan tetap melihat ASEAN sebagai partner utama Indonesia.

c. Peran dan inisiatif Indonesia dalam proses G-20

Indonesia memang tidak pernah menjadi tuan rumah pertemuan tingkat menteri maupun KTT, tetapi komitmennya untuk memainkan peran penting sudah terlihat.[68] Karena memiliki pengalaman dalam mengatasi krisis finansial, Indonesia memiliki modalitas untuk berkontribusi dalam merumuskan cara-cara untuk menangani krisis secara efektif. Indonesia telah menawarkan inisiatifnya dalam proses G-20 dan menjadi co-chair kelompok-kelompok kerja untuk menyusun detil agenda dan rencana aksi untuk merealisasikan inisiatif tersebut. Indonesia juga memahami bahwa sebagai suatu *emerging economy*,

---

68 Wawancara dengan koordinator G-20 untuk isu-isu finansial Kementrian Keuangan Republik Indonesia tanggal 30 September 2010.

Indonesia harus mengartikulasikan kepentingan negara-negara berkembang dalam proses G-20. Indonesia adalah inisiator *"General Expenditure Support Fund"* (GESF) yang membantu untuk menyediakan likuiditas dana dari IMF dan Bank Dunia bagi negara-negara berkembang. Indonesia juga mengusulkan pertemuan konsultatif dengan non anggota G-20 di Jakarta dimana anggota dan non anggota G-20 hadir dan memiliki kesempatan untuk membicarakan beragam isu.

Inisiatif Indonesia bagi a *Global Expenditure Support Fund*[69]

Krisis global yang dialami Amerika Serikat emnyebabkan disfungsi pasar ekuitas dan pinjaman kredit internasional dan karenanya menciptakan kesulitan bagi negara-negara berkembang untuk menangani dampak krisis dan melanjutkan program-program pembangunan. Meskipun tidak semua negara berkembang mengalami dampak langsung dari krisis finansial, tetapi terdapat kondisi dimana aliran kapital ke negara maju menyebabkan inekualitas bagi kondisi ekonomi pasar di negara-negara *emerging economy*.[70] Karenanya diperlukan pendekatan untuk menembus kebuntuan untuk mengambakan pendanaan anggaran negara dalam situasi dimana kapital menjadi terbatas. Indonesia melihat GESF sebagai cara untuk mendukung negara berkembang mengamankan anggaran nasionalnya dalam konteks krisis likuiditas.[71]

Global Expenditure Support Fund merupakan mekanisme keuangan yang diusulkan Indonesia dalam pertemuan di Washington, 15 November 2008. Usulan Indonesia tersebut merupakan inisiatif untuk membantu proses pemulihan dampak krisis di negara-negara berkembang miskin. Pada dasarnya, GESF merupakan dana cair yang disiapkan untuk negara berkembang dan diharapkan aliran dana tersebut digunakan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur, perluasan dan penciptaan lahan pekerjaan, dan pembiayaan keberlangsungan program-program *Millenium Development Goals* (MDGs).

---

69 *Background Paper prepared for Indonesia's Participation in the G-20 Summit*, Washington D.C., 15 November 2008, Hadi Soesastro, *"Policy Responses in East Asia to the Global Financial Crisis", Centre for Strategic and International Studies.*

70 Press Release, Kementrian Keuangan Indonesia: "G-20 mendukung Usulan Indonesia tentang Mekanisme Dukungan Pembangunan Negara-negara Bekembang dalam Mengatasi Dampak Krisis Keuangan Internasional."

71 Wawancara dengan koordinator G-20 untuk isu-isu finansial Kementrian Keuangan Republik Indonesia tanggal 30 September 2010.

Dalam proposalnya Indonesia menyarankan bahwa G-20 seharusnya menyiapkan dana bagi negara-negara berkembang yang bukan anggota G-20. Ada beberapa alasan mengapa dana seperti ini diperlukan. Pertama, mekanisme diusulkan untuk mengantisipasi dampak jangka berkepanjangan akibat krisis global di negara berkembang dan miskin. Indonesia mengganggap dibutuhkan suatu mekanisme yang dapat mendukung negara berkembang miskin karena sistem perekenomian global masih belum berpihak pada negara berkembang miskin. Kedua, melalui mekanisme GESF ini diharapkan negara berkembang tidak akan menemui kesulitan dalam proses pembangunan infrastruktur dan pencapaian tujuan-tujuan MDGs. Ketiga, penjaminan aliran dana segar melalui GESF pada negara berkembang dan miskin akan juga menjamin percepatan pemulihan pasca krisis global. Kondisi stabil yang dirasakan negara berkembang dan miskin akan mendorong proses rehabilitasi kondisi pasca krisis global karena populasi dunia dan angka pertumbuhan ekonomi sebenarnya berpusat pada negara berkembang dan miskin. Terakhir, melalui mekanisme aliran dana segar ini diharapkan negara- diluar non-anggota G-20 yang pada umumnya adalah negara berkembang miskin akan merasakan dampak positif keberadaan forum ekonomi ini.

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan Susilo Bambang Yudhoyono mengenai inisiatif *Global Expenditure Support Fund* (GESF),

> *"Mekanisme Global Expenditure Support Fund (GESF) dibuat untuk membantu negara berkembang menangani pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan pembangunannya. Dengan aliran dana ini akan mendorong perkembangan ekonomi khususnya negara-negara di Asia terhadap pemuliihan ekonomi dunia. Dana ini akan membantu negara-negara berkembang miskin, setidaknya minimal selama tiga tahun."*[72]

Inisiatif Indonesia ini juga dikorfimasi oleh pernyataan menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati dalam pertemuan di Sao Paulo pada tanggal 10 Nopember 2008: *"Anggota G-20 mendukung usulan Indonesia mengenai*

---

72 Press Release, Kementrian Keuangan Indonesia: "G-20 mendukung Usulan Indonesia tentang Mekanisme Dukungan Pembangunan Negara-negara Bekembang dalam Mengatasi Dampak Krisis Keuangan Internasional."
Wawancara dengan koordinator G-20 untuk isu-isu finansial Kementrian Keuangan Republik Indonesia tanggal 30 September 2010.

mekanisme support bagi pendanaan pembangunan di "emerging markets" yang berfundamental baik namun terkena imbas dari tidak berfungsinya pasar akibat dampak krisis keuangan."

Sesuai dengan yang dipaparkan dalam proposal GESF yang disiapkan Indonesia untuk KTT G-20 di Washington, 2008. Indonesia mengindikasikan bahwa emerging country yang berhak mendapatkan pinjaman melalui mekanisme GESF ini harus dapat menunjukan beberapa kondisi. Beberapa kondisi tersebut, seperti negara itu dapat menunjukan kondisi fiskal yang stabil, mempraktikan komitmennya terhadap agenda pembangunan berkelanjutan, manajemen keuangan yang kokoh serta kondisi pasar yang mampu "memutar" dana pinjaman dalam kerangka kerjasama dalam jangka minimal 3 tahun kedepan.[73]

Sejauh ini, respon yang diberikan negara non-anggota terhadap mekanisme GESF yang diinisiatif oleh Indonesia, diantaranya negara berkembang dan miskin. Indonesia memaparkan inisiatif tersebut pada *leaders summit*, Washington, 2008. Mengingat, pada dasarnya usulan ini diperuntukan pada negara berkembang dengan fundamental yang baik serta memiliki potensi pertumbuhan ekonomi positif, maka tanggapan yang didapat Indonesia sendiri dirasakan positif. Kedua puluh anggota G-20 memberikan respon dan *feed back* positif dengan menyetujui usulan Indonesia ini. Sedangkan, negara diluar anggota dan lembaga keuangan internasional sendiri seperti IMF dan *World Bank* tidak memiliki keberatan sekalipun. Bahkan, tanggapan cukup baik diberikan negara-negara di Asia dan Afrika yang memang memiliki harapan besar terhadap mekanisme dana bantuan ini untuk mendukung proses pembangunan atau melancarkan arus dana selama proses pemulihan pasca krisis keuangan global. Proposal Indonesia disetujui dan diadopsi dalam komunike G-20, yang kemudian dikenal dengan inisiatif General Expenditure Support Fund.[74]

Indonesia berempati terhadap negara-negara yang mengalami kesulitan dalam likuiditas dan merasakan kebutuhan bagi suatu inisiatif internasional untuk kemudahan pendanaan dan meminimalkan dampak krisis terhadap program pembangunan dan MDGs.

---

73 Background Paper prepared for Indonesia's Participation in the G-20 Summit, Washington D.C., 15 November 2008, Hadi Soesastro, "Policy Responses in East Asia to the Global Financial Crisis", Centre for Strategic and International Studies.

74 Ibid.

Struktur finansial global saat ini tidak mendukung negara-negara miskin sebagaiman seharusnya. Ini mendorong G-20 untuk membicarakan isu pembangunan, karena terdapat hubungan erat antara pembangunan dan bagaimana likuiditas domestik mengalir. Dengan memfokuskan pada pembangunan, inisiatif ini dapat mengantisipasi masalah likuiditas yang dihadapi negara berkembang dan negara dengan pendapatan rendah.

Inisiatif untuk menyediakan likuiditas bagi negara berkembang dan khususnya negara dengan pendapatan rendah dengan kondisionalitas yang lebih ringan, yang dikenal dengan mekanisme insentif, tidak hanya diterapkan oleh lembaga keuangan internasional, tetapi juga melalui kerjasama bilateral dan regional. Dalam mekanisme sebelumnya, negara-negara berkembang selalu harus memenuhi persyaratan yang ketat dan seringkali tidak memiliki pilihan lain selain mengikutinya. Melalui inisiatif Indonesia, lembaga-lembaga finansial internasional dan negara-negara donor terdorong untuk mempertimbangkan keberlanjutan program pembangunan di negara penghutang karena jika negara-negara ini berhasil dalam proses pembangunan, seluruh dunia juga akan menikmati keuntungannya terutama terkait dengan pemulihan ekonomi dunia.

Peran Indonesia sebagai *Co-chair Working Group 4* (WG4)

Inisiatif Indonesia tidak hanya diwujudkan dalam proposal *Global Expenditure Support Fund* (GESF) dan kebijakan kemudahan likuiditas dana pinjaman yang diberikan pada negara berkembang dan miskin, tapi juga sumbangan langsung melalui ide-ide untuk mereformasi dalam *Working Group 4* (WG4) yang dimotori oleh Indonesia dan Perancis.

Indonesia bersama dengan Perancis menyelenggarakankan pertemuan WG4 di Jakarta, 2 Maret 2009. Pada dasarnya, pertemuan tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja Bank Pembangunan Multilateral (*Multilateral Development Banks*/ MDBs) dalam mengatasi krisis serta pembenahan manajemen MDB's dalam proses reformasi agar lebih tanggap dan efektif dalam menghadapi krisis lain waktu. Pertemuan tidak hanya mengundang kedua puluh negara anggota, terdapat IMF dan *World Bank* sebagai *observer* tetap G-20, anggota Bank Regional Pembangunan (*Regional Development Banks*/RDB) serta negara diluar G-20, seperti G-24, Belanda dan Uni Afrika.

Pertemuan WG4 ini merumuskan *draft* yang mengagendakan finalisasi

prinsip-prinsip umum dan *action plan* G-20 terhadap proses reformasi MDBs. *Draft* tersebut diserahkan pada pertemuan *leaders summit*, 2 April 2009. Pada dasarnya, pembahasan mengenai mekanisme reformasi MDB's ini bertujuan, pertama, meningkatkan peran Bank Pembangunan Multilateral dalam penyediaan dana cair untuk negara berkembang *(emerging markets)* khususnya jika terjadi krisis. Kedua, pembahasan mengenai peningkatan kecukupan modal bagi seluruh MDB's sebagai instrumen antisipasi dan solusi krisis keuangan akibat terhambatnya arus likuiditas. Terakhir, reformasi manajemen MDB's dalam pengelolaan dana yang bertolak ukur berdasar transparansi, efektifitas peran *country office* serta pembenahan dalam mencapai keseimbangan kuota dan respresentasi antara negara maju dan negara berkembang.

Dukungan penuh pemerintah Indonesia terhadap adanya pembahasan dalam WG4 ini terangkum oleh yang disampaikan Presiden Yudhoyono agar MDB's perlu didukung dan didorong dalam proses reformasi manajemennya serta dibutuhkannya instrumen dana *(budget support)* untuk keberlangsungan pembangunan infrastruktur di negara *emerging markets* serta program-program untuk mencapai MDGs.

Pertemuan tersebut merumuskan tiga agenda kunci untuk mereformasi manajemen MDBs dalam konteks penyediaan dana bagi negara-negara berkembang dan kurang berkembang. Dengan partisipasi yang luas dalam pertemuan Kelompok kerja tersebut, hasilnya telah mendapat dukungan luas dari banyak negara.

d. Pemenuhan Komitmen Indonesia terhadap G-20

Leading by example (memimpin dengan contoh) merupakan moto yang menunjukkan komitmen Indonesia. Sebagai anggota G-20 yang ekslusif, Indonesia pertama-tama harus membuktikan komitmen G-20 benar-benar dilaksanakan oleh anggota-anggotanya di tingkat nasional. Keseriusan untuk memenuhi komitmen dengan menerapkan beragam kebijakan dapat dilihat dengan bagaimana Indonesia membuat kebijakan-kebijakan penanganan krisis ekonomi. KTT Washington dan London telah menyepakati kebijakan stimulus fiskal, penurunan suku bunga (instrumen *counter cylical*).

1. Kebijakan stimulus fiskal untuk mengatasi krisis ekonomi

Kebijakan stimulus fiskal adalah suatu mekanisme yang telah diadopsi

oleh pemimpin-pemimpin G-20 dalam KTT Washington. Ini adalah cara jangka pendek untuk menstimulasi perekonomian nasional sehinga negara dapat menghidupkan kembali perekonomianny dari krisis. Dalam jangka panjang, stimulus fiskal seharusnya diimplementasikan bersama-sama dengan perbaikan dan penguatan sektor finansial, sehingga dapat berfungsi efektif sebagai instrumen *countercyclical policy.* Strategi kebijakan stimulus fiskal sesuai dengan UU 41/2008 Pasal 23 tentang APBN tahun 2009 yang disempurnakan dengan perumusan langkah-langkah penyesuaian darurat yang dirumuskan pemerintah dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.[75]

Tabel 2. Kebijakan Stimulus Fiskal Indonesia, 2009 (dalam triliun rupiah)

			Uraian	Alokasi
1.	Penghematan Pembayaran Pajak (Tax Saving)			43,0
	✓	Penurunan Tarif PPh:		32,0
		-	Penurunan Tarif PPh Badan	18,5
		-	Penurunan Tarif PPH Orang Pribadi	13,5
	✓	Peningkatan PTKP menjadi Rp15,8 juta		11,0
2.	Subsidi Pajak-BM/DTP kepada Dunia Usaha/RTS			13,3
	✓	PPN eksplorasi migas, minyak goreng		3,5
	✓	Bea masuk bahan baku dan barang modal		2,5
	✓	PPh karyawan		6,5
	✓	PPh panas bumi		0,8
3.	Subsidi + Belanja Negara kepada Dunia Usaha/Lapangan Kerja			15,0
	✓	PPN eksplorasi migas, minyak goreng		2,8
	✓	Bea masuk bahan baku dan barang modal		1,4
	✓	PPh karyawan		10,2
	✓	PPh panas bumi		0,6
			Jumlah Stimulus	71,3

Sumber Data: Press release Departemen Keuangan, "Mengatasi Dampak Krisis Global Melalui Program Stimulus Fiskal APBN 2009".

75 Press Release Departemen Keuangan RI, "Mengatasi Dampak Krisis Global Melalui Program Stimulus Fiskal APBN 2009".

Tabel 2 memperlihatkan aliran dana bagi stimulus fiskal. Kebijakan stimulus fiskal dan penambahan aliran stimulus melalui APBN 2009 ditetapkan sebesar 1,4 persen dari PDB atau sekitar Rp. 71,3 triliun. Kebijakan stimulus fiskal bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat, memperkuat daya tahan dunia usaha dan dana pembangunan infrastruktur padat karya. [76]

Kebijakan stimulus fiskal dialirkan kedalam program-program riil dan padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja, Indonesia memanfaatkan komitmen G-20 di isu pemberdayaan tenaga kerja, pengalihan subsidi, keamanan pangan dan pendanaan perubahan iklim. Fokus pemerintah Indonesia terhadap isu pemberdayaan tenaga kerja dan optimalisasi program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM Mandiri) .[77]

Hasilnya, pada pertengahan 2009, aliran suku bunga SUN dan Bank Indonesia mengalami penurunan signifikan melalui pengaliran dana yang berasal dari SDR sebesar 2,4 miliar US$; indeks harga saham gabungan menunjukan peningkatan diatas 2456. Melalui pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2009 yang menunjukan peningkatan hingga 4,3 persen-4,5 persen diproyeksikan berdasarkan APBN 2010 Indonesia dapat mencapai pertumbuhan perkenomian hingga 5,5 persen.

Kebijakan stimulus fiskal efektif membiayai APBN 2009, ditunjukan dengan turunnya anggaran penerimaan negara hingga 2,5 persen dari PDB, adanya penghematan belanja negara sebesar Rp. 53,2 triliun, menurunnya rasio utang menjadi 33 persen pada 2009, kepemilikan dana pinjaman siaga atau *stand by loan* yang didapatkan dari mekanisme kerjasama bilateral atau multilteral tanpa prasyaratan pinjaman yang memberatkan negara berkembang.

Untuk mendukung keberlangsungan kebijakan stimulus 2009-2010, pemerintah Indonesia melakukan beberapa tindakan. Pertama, menutup defisit APBN 2009 dengan aliran pembiayaan obligasi rupiah dan valas dan menggunakan dana siaga untuk mengantisipasi APBN 2010. Dana siaga tersebut berasal dari *World Bank*, ADB, Jepang dan Australia yang diperoleh dengan penekanan bahwa pinjaman sifatnya tanpa syarat dan bantuan tersebut murni untuk menjamin keberlangsungan program-program pencapaian MDG's di

---

76 Pidato Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, "Mengatasi Krisis Global melalui Stimulus Fiskal 2009", disampaikan di depan Komisi XI DPR-RI, pada 27 Januari 2009.

77 Press Release, Kementerian Luar Negeri RI, "Curah Gagasan: Indonesia dan arah ke Depan G-20 Pasca Krisis Ekonomi Global" di Yogyakarta pada 11-12 Maret 2010.

Indonesia.

Krisis yang terjadi pada pertengahan tahun 2008 merupakan peristiwa krisis kedua yang dialami Indonesia. Belajar dari pengalaman Indonesia terhadap terjadinya krisis ekonomi yang sulit diprediksi dan tidak ada jaminan suatu negara terhindar dari dampak krisis walaupun negara tersebut memiliki sistem dan regulasi yang ketat. Indonesia didaulat menjadi pendorong perekonomian dunia bersama China dan India sebagai negara *emerging markets* sebagai tiga negara didunia yang menunjukan angka pertumbuhan ekonomi positif saat terjadinya krisis global 2008.

Kebijakan Perbankan Indonesia

Bank Indonesia mengemban tugasnya sebagai bank sentral yang dapat berperan sebagai regulator sistemik pasca krisis global. Fungsi Bank Sentral tersebut: pertama, bank sentral sebagai jembatan langsung antara pelaku pasar untuk mengimplementasikan kebijakan moneter sentral; kedua, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjamin stabilitas sistem keuangan dengan mempertahankan stabilitas ekonomi makro; ketiga Bank Indonesia memainkan fungsi *lender of last resort* yang akan sangat bermanfaat dalam penyediaan dana darurat jangka pendek di masa krisis.

Sesuai sesuai dengan kesepakatan di KTT G-20 Washington, ditetapkan 12 agenda reformasi sektor keuangan global.

1. Penguatan rejim permodalan global dan standar likuiditas pebankan serta mitigasi *procyclicality (Building high quality capital and liquality standards)*
2. Reformasi skim kompensasi bagi eksekutif di lembaga keuangan
3. Penguatan pasar OTC derivatives markets
4. Pengaturan resolusi untuk lembaga keuangan yang berdampak sistemik
5. Penguatan kepatuhan terhadap standard internasional
6. Penguatan standar akuntansi
7. Pengembangan kerangka kebijakan makroprudensial
8. Harmonisasi regulasi pasar dan lembaga keuangan
9. Pengaturan *Hedge Funds*
10. Pengaturan Lembaga Pemeringkat *(Credit Rating Agencies)*
11. Pendirian *Supervisory Colleges*
12. Reaktivasi pasar sekuritasasi dengan landasan prudensial yang lebih kuat *(Re-launching securitization on sound basis)*

Posisi utama Bank Indonesia menyikapi kesepakatan tentang agenda reformasi adalah: menerima 12 agenda dan mendukung pelaksanaannya dengan catatan terdapat ruang untuk masa transisional. Bank Indonesia dalam hal ini mengkaji dengan seksama terutama pelaksanaan Basel 3 dan implikasinya bagi sistem perbankan nasional dan internasional bila rejim perbankan ini diterapkan.[78]

Penguatan perbankan nasional sesuai dengan standar regulasi dalam rejim perbankan internasional telah menjadi perhatian serius Gubernur Bank Indonesia yang baru, Darmin Nasution. Dalam hal ini Gubernur Bank Indonesia telah merumuskan empat kebijakan utama yang ditetapkan Bank Indonesia untuk tahun 2010. Empat kebijakan utama tersebut berbasis insentif dan disinsentif. Kebijakan pertama meliputi peningkatan ketahanan sistem perbankan dengan penguatan sistem pengawasan, penataan kompetensi perbankan dan pasar keuangan yang disesuaikan dengan peraturan permodalan, transparansi keuangan, tata kelola organisasi dan manajemen resiki dan pemantapan pengawasan.[79]

Dalam poin pertama ini dirumuskan mengenai kebijakan penguatan pengaturan peraturan permodalan terhadap efektivitas menajemen risiko dan manajemen transparansi laporan keuangan, kebijakan pemantapan sistem pengawasan bank yang melibatkan otoritas pengawas lembaga keuangan non-bank baik didalam maupun diluar negeri, kebijakan penataan kembali tingkat kompetisis industri perbankan di Indonesia dalam hal ini Bank Indonesia akan memperbaiki ketentuan teknis mencakup merjer, konsolidasi, sumber dana akuisisi bank serta ketentuan-ketentuan teknis lain. Terakhir, kebijakan pendalaman pasar keuangan sebagai alternatif sarana distribusi (penyaluran dan penempatan)dana produktif sektor riil untuk pembiayaan infrastruktur, dimana diharapkan pasar uang lebih likuid dan Bank lebih mandiri dari sumber pendapatan instrumen Bank Indonesia sendiri.

Kedua, peningkatan intermediasi perbankan melalui penyempurnaan peraturan dan penyediaan infrastruktur pendukung, dengan menyempurnakan

---

78 Reformasi Sektor Keuangan Global, Progress Repost Agustus 2011 (untuk Humas), "Global Financial Sector Reform, Progress Report 2010 (for human relations), Bank Of Indonesia, Jakarta: 2010.

79 Pidato Dr. Darmin Nasution, "Menata dan Memperkuat Perbankan Indonesia, Menyongsong Pemulihan Ekonomi Global", poin 22-26.

Giro Wajib Minimum (GWM) yang menekankan pada efisiensi operasional Bank. Kebijakan ini dapat dijadikan pedoman Bank untuk mengukur risiko. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Pjs Gubernur BI Dr. Darmin Nasution, "Hal ini dapat dijadikan pedoman untuk mngetahui anatomi *cost structure* dari *funding* serta untuk mengetahui kebijakan apa saja yang bisa dipakai untuk mendorong Bank."

Gubernur Bank yang baru tersebut juga memiliki komitmen bagi peningkatan peran perbankan syariah terhadap perekonomian nasional dan penguatan ketahanannya dengan pemberian insentif mendorong peningkatan modal dan memberikan fasilitas pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia perbankan syariah yang berkualitas dan kompeten. Ini menjadi agenda penting kebijakan perbankan indonesia 2010.[80]

Kebijakan perbankan lain yang penting lain adalah *"all inclusive financial banking system"* melalui peningkatan peran Bank Perkreditan Rakyat dalam pembiayaan keuangan mikro dan penguatan ketahanannya melalui pemberian insentif untuk mendorong peningkatan modal, memberikan fasilitas pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia BPR yang berkualitas dan kompeten serta penguatan terhadap posisi BPR sebagai *community bank*. Kebijakan dalam perbankan ini sangat penting sebagai strategi Indonesia untuk membuat lembaga perbankan dapat diakses oleh segala kalangan, termasuk kelompok marginal. Kelompok-kelompok marginal ini selama ini mendapatkan pinjaman keuangan dari lembaga-lembaga informal seperti rentenir yang seringkali merugikan kelompok tersebut; disamping lembaga perbankan nasional kesulitan untuk melakukan regulasi dan pengawasan terhadap agen-agen kredit informal tersebut.[81]

Kebijakan anti-proteksionisme Indonesia

G-20 sepakat untuk memerangi kebijakan proteksionisme yang seringkali masih dijadikan salah satu instrumen negara anggota untuk mengatasi krisis ekonomi. Proteksionisme merupakan kebijakan perdagangan yang digunakan untuk membatasi, menahan atau melarang masuknya produk impor oleh suatu negara, baik memberlakukan kebijakan tarif atau pembatasan kuota (non-tarif). Ketika krisis terjadi, negara berlomba memberlakukan kebijakan

---

80 Wawancara dengan peneliti senior BI tanggal 12 Agustus 2010.
81 Ibid.

proteksi baik alur perdagangan komoditas barang atau jasa. Hal tersebut dilakukan negara untuk melindungi produk domestiknya akibat masuknya barang impor murah atau pun membatasi masuknya tenaga kerja asing untuk memanfaatkan tenaga kerja domestiknya.

G-20 menegaskan bahwa kebijakan proteksi semakin memperburuk kondisi keuangan global, karena terhambatnya perputaran barang dalam skema perdagangan internasional, terbatasnya daya beli sehingga semakin memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, negara-negara anggota G-20 sepakat untuk memberlakukan kebijakan anti proteksionisme.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Indonesia memiliki pandangan yang sama mengenai proteksionisme. Presiden Yudhoyono menekankan bahwa pilihan kebijakan proteksionisme tidak menjadi pilihan utama untuk menangani kondisi ekonomi akibat krisis global yang melanda Indonesia.[82] Kebijakan proteksionisme yang dianggap menimbulkan hambatan dalam aliran perdagangan dan investasi harus diatasi. Presiden mengindikasikan bahwa kebijakan proteksionisme tidak tepat jika diimplementasikan saat masa-masa krisis karena hanya menimbulkan tersendatnya aliran perdagangan dan investasi macet. Oleh karena itu, peluang untuk melakukan kebijakan *'open market'* akan memberikan ruang lebih besar terhadap produk Indonesia di pasar ekspor dengan catatan kebijakan pada haluannya harus selalu berpihak pada perekonomian nasional.

Kebijakan anti-proteksionis yang disetujui Indonesia dalam hal ini memberlakukan mekanisme *"open economy"*, dengan menggarisbawahi peran negara untuk mengawasi regulation dan *supervision* pasar. Hal tersebut selaras dengan usulan Perancis untuk menentang mekanisme *free market economic* dalam arsitektur ekonomi global yang pada akhirnya menyebabkan krisis global.

Sejauh ini kementerian perdagangan Indonesia menegaskan bahwa Indonesia berjalan sesuai jalurnya atau *"on-track"*.[83] Pada prinsipnya Indonesia telah membuka dirinya terhadap masuknya produk-produk dari negara-negara lain seperti telah disepakati dalam regulasi perdagangan dalam WTO. Kebijakan-kebijakan Indonesia juga bersifat liberal dalam pengertian

82 Nur Hidayati, "Presiden Yudhoyono Berceramah di LSE", Kompas, April 2009.
83 Wawancara dengan perwakilan dari Kementrian Perdagangan RI, tanggal 27 Mei 2010.

telah membuat pengurangan ataupun penghapusan restriksi-restriksi impor produk asing ke Indonesia. Ini seperti yang ditegaskan oleh salah seorang responden dari Kementerian Perdagangan RI: *"Kebijakan kita (Indonesia) tetap harus berusaha untuk memberlakukan kebijakan "open economy" karena jika salah satu negara memberlakukan proteksi maka otomatis negara lain akan terganggu."* Kebijakan perdagangan nasional diupayakan supaya sesuai dengan koridor yang ditetapkan WTO dan sekaligus harus mengutamakan kepentingan ekonomi nasional.

Penelitian ini melihat bahwa isu anti-proteksionisme merupakan masalah yang kontroversial. Terdapat perdebatan tentang apakah Indonesia dapat memberlakukan kebijakan proteksi untuk beberapa komoditas yang dianggap penting untuk kepentingan nasional. Isu ini menjadi kontroversial karena ada pandangan analitis yang menyebut bahwa negara-negara maju pun menjalankan kebijakan proteksi yang masuk kriteria proteksionisme. Misalnya, Amerika Serikat memberlakukan *"American Recovery and reinvestment Act"*, Brasil dan Argentina yang tergabung dalam Mercosur memberlakukan proteksi dagang industri lokal dengan menetapkan tingginya bea masuk produk impor, dan Turki yang juga melakukan proteksi serupa, sedangkan China dan Jepang memberlakukan kebijakan dualisme *(double standard)* dengan melakukan liberalisasi beberapa produk dan di sisi lain memproteksi beberapa produk yang lain.

Di luar G-20, terdapat beberapa negara non-anggota G-20 yang memberlakukan kebijakan proteksi. Misalnya, Taiwan memberlakukan *double standard*; Paraguay dan Uruguay bersama Mercosur; Mesir bersama Turki; Malaysia membatasi tenaga kerja asing dan Singapura memberlakukan kebijakan yang sama dengan Malaysia, *Resilience Package*.

Kebijakan Indonesia untuk menjaga keseimbangan antara tetap mempertahankan perekonomian terbuka melalui kebijakan anti proteksionisme dan perlindungan terhadap produk-produk lokal dengan memanfaatkan kondisi perdagangan internasional dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan angka ekspor dan devisa negara. Untuk mengimbangi kebijakan tersebut Indonesia melakukan koordinasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan perdagangan domestik yang memberikan kontribusi pendapatan mencapai 80 persen.

Ketua Sherpa G-20 Indonesia mengakui kontroversi penggunaan proteksionisme dan berargumen bahwa untuk tetap konsisten dengan prinsip-

prinsip anti proteksionisme, negara-negara maju hraus menghapus hambatan-hambatan teknis.[84] Menjadi anggota G-20 memberikan Indonesia kesempatan untuk mendukung penerapan anti proteksionisme dalam segala bentuk.

e. Tantangan bagi peningkatan peran Indonesia di G-20

Paparan sebelumnya telah menunjukkan bagaimana Indonesia telah berupaya untuk memainkan peran aktifnya dalam proses G-20. Namun sejumlah tantangan muncul dan dihadapi Indonesia dalam peningkatan perannya di G-20. Tantangan-tantangan pertama bersifat internal, sementara tantangan-tantangan lain bersifat eksternal. Tantangan-tantangan internal meliputi kesulitan dalam melakukan koordinasi di antara kementrian terkait khususnya sejak G-20 memasukan agenda non finansial; perubahan politik akibat persaingan di antara politisi yang mempengaruhi kerja menteri-menteri terkait dalam melaksanakan komitmen-komitmen Indonesia dalam G-20; sistem birokrasi yang tidak efisien yang mempengaruhi penerapan aturan yang transparan dalam mendukung perekonomian terbuka. Tantangan eksternal mencakup sistem global yang kompleks, penentangan negara-negara berkembang terhadap legitimasi dan efektivitas G-20 dan keraguan atas keseriusan negara maju untuk memenuhi kepentingan negara-negara berkembang.

Koordinasi antar kementerian.

Terdapat kesan bahwa terjadi persaingan di antara kementerian untuk menjalankan tugas dalam proses G-20 khususnya sejak G-20 memutuskan untuk memperluas isu-isu dan agenda di tahun 2008. Sejak pendiriannya di tahun 1999, Menteri Keuangan dan Bank Indonesia telah menjadi pemain utama dalam menjalankan tugas Indonesia dalam proses G-20. Koordinasi tidak menjadi isu yang sulit karena masing-masing telah memperoleh tugas yang khusus: Kementrian keuangan menangani isu-isu finansial, sementara Bank Sentral menangani regulasi perbankan. Kementrian keuangan menjalankan tugas menginformasikan komitmen-komitmen G-20 ke kantor-kantor kementrian lain dan kemudian memainkan peran kunci dalam

84 Seperti dikemukakan Ketua Sherpa G-20 Indonesia dalam Diskusi Panel tanggal 2 September 2010.

mengkoordinasikan implementasi komitmen-komitmen tersebut. Kementrian tersebut membangun koordinasi reguler dengan Bank Indonesia, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Diakui bahwa masing-masing lembaga memiliki kemampuan yang berbeda untuk terlibat dalam diskusi dan melaksanakan komitmen-komitmen karena setiap lembaga memiliki tugas spesifik yang sudah rutin. Koordinasi ini disesuaikan dengan isu yang menjadi topik pembahasan sesuai dengan proses G-20.[85]

Keputusan pemimpin-pemimpin G-20 untuk memasukan isu-isu non finansial dalam agenda G-20 membuat koordinasi antar kementerian menjadi sesuatu yang tidak mudah.[86] Pemerintah Indonesia telah membentuk dua koordinator yang tugasnya adalah mengembangkan koordinasi antara kementrian-kementrian terkait. Koordinator pertama menangani masalah-masalah finansial, koordinator kedua meanngani isu-isu non finansial. Kementrian Keuangan menjalankan koordinasi isu finansial, kementrian Luar Negeri memfokuskan pada isu-isu non finansial seperti perubahan iklim, anti korupsi, turisme, dll., yang relevan dengan agenda yang dibicarakan dalam G-20.

Struktur delegasi Indonesia dalam G-20, melibatkan Ketua Sherpa G-20 Indonesia yang diwakili Marendra Siregar, yang menjabat sebagai Wakil Menteri Perdagangan. Koordinasi nasional dipimpin oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementrian Keuangan. Kementerian Keuangan memainkan peran sebagai *"focal point"* Indonesia dalam representasi G-20 karena pejabat yang berwenang telah menetapkan pada awal keikutsertaan Indonesia di G-20 bahwa pembahasan agenda G-20 berputar sekitar isu keuangan dan finansial.

Diskusi tentang ini muncul terkait dengan peran Kementrian Luar Negeri yang dirasakan masih minimal.[87] Pasal 1 point 4 UU Hubungan Luar Negeri menegaskan bahwa Menteri Luar Negeri adalah pejabat yang bertanggungjawab untuk menjalankan hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Penegasan peran Kementerian Luar Negeri ini dipertegas dalam pasal 6 butir 2 yang

---

85 Wawancara dengan perwakilan dari Kementrian Keuangan RI tanggal 27 Mei 2010
86 Pandangan ini dikemukakan oleh sebagian responden yang mewakili anggota G-20 dan lembaga finansial internasional.
87 Seperti disampaikan oleh Mantan Menteri Luar Negeri RI, Hasan Wirayuda dalam focus group discussion BPPK Kementrian Luar Negeri RI tanggal 3 Agustus 2010.

menyebut bahwa kewenangan ini merupakan limpahan dari Presiden sebagai penyelenggara dan pelaksana hubungan luar negeri. Kuatnya peran Kemenlu juga dipertegas lagi pada pasal 7. Dalam pasal 7 ini disebut bahwa Presiden dapat menunjuk pejabat selain Menteri Luar Negeri untuk menyelenggarakan hubungan luar negeri tertentu. Namun ditegaskan dalam butir 2 bahwa pejabat tersebut harus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan menteri luar negeri.[88]

Realitas bahwa ketua Sherpa Indonesia adalah wakil menteri perdagangan, bukan dari kementrian keuangan ataupun kementrian luar negeri memang menjadi isu tersendiri dalam diskusi tentang hambatan bagi koordinasi dan konsultasi. Penunjukkan ini memang didasarkan pada kompetensi individual dalam dunia diplomasi dan penguasaan pengetahuan tentang struktur finansial global yang dimiliki ketua Sherpa Indonesia merupakan nilai tersendiri bagi Indonesia.

Ketidakpastian perubahan politik

Ketidakpastian politik merupakan hambatan lain yang berpengaruh terhadap peran Indonesia dalam G-20. Sulit mengharapkan bahwa menteri yang diharuskan paling berperan dalam G-20 untuk berkonsentrasi pada peningkatan kontribusinya dalam G-20 jika posisinya dalam politik domestik terus dipertanyakan oleh para politisi di parlemen ataupun para pengamat politik.

Hal ini misalnya ditunjukan dengan munculnya penentangan besar terhadap Menteri Keuangan, Sri Mulyani atas keputusannya untuk menyelamatkan Bank Century. Penentangan ini menjadi isu politik yang menyita perhatian dan energi Kementrian Keuangan dan parlemen. Isu ini kemudian berakhir dengan pengunduran diri Sri Mulyani disertai alasan karena penugasan barunya di Bank Dunia. Kritik muncul terkait dengan seberapa jauh menteri keuangan yang baru memiliki kompetensi yang mencukupi menyangkut G-20 dan peran Indonesia di dalamnya. Menteri baru yang berlatar belakang perbankan ini dipertanyakan kompetensinya dalam hal kebijakan fiskal yang sesuai dengan komitmen dalam G-20.

Ketidakpastian serupa muncul terkait dengan status Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan Kerjasama Luar Negeri, Anggito Abimanyu. Anggito adalah orang yang memainkan peran penting dalam *Working Group 4* bersama

88 Undang-Undang no 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

dengan wakil menteri keuangan dari Perancis. Anggito Abimanyu telah menunjukkan kinerja maksimal ketika memimpin working group 4 bersama dengan Perancis pada periode 2008 hingga 2009.[89] Namun statusnya bukanlah wakil menteri keuangan.

Situasi politik yang berkembang pada bulan Juni 2010 yang kemudian berakhir dengan pergantian Menteri Keuangan membuat status Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan Kerjasama Luar Negeri tersebut menjadi semakin tidak jelas. Ini berakhir dengan pengunduran diri yang bersangkutan dan pergantian pejabat baru.

Harus diakui kompetensi individual sangat penting dalam forum-forum internasional dalam konteks di mana tidak adanya *"blue print"* yang berisikan *grand* strategi atau semacam pedoman tertulis menjadi kerangka kerja menteri dan pejabat senior terkait. Hal ini tentunya mendorong perumusan agenda baru oleh pemerintah perihal rumusan pedoman yang berorientasi jangka panjang tersebut, sehingga siapapun pejabat yang memimpin tidak akan menimbulkan kekhawatiran.

Kekhawatiran itu disampaikan Nur Hassan Wirajuda (mantan Menteri Luar Negeri Indonesia), bahwa ketidakpastian tersebut berpengaruh secara langsung pada formasi *vocal point* sendiri yang kadang menimbulkan kekhawatiran jika Indonesia harus mulai lagi dari awal,[90] karena secara logika hal tersebut akan menyita waktu dan menghambat pergerakan Indonesia.

Birokrasi yang tidak efisien dan masalah-masalah domestik

Tantangan lain adalah inefisiensi dalam birokrasi. Ini mungkin tidak mempengaruhi langsung kinerja Indonesia dalam proses negosiasi G-20, namun menciptakan hambatan serius saat Indonesia harus membuktikan komitmennya dengan prinsip 'memimpin dengan contoh'. Indonesia telah melakukan banyak hal dalam beberapa bidang dan meningkatkan efisiensi dan kapasitas inovatif dalam diplomasi internasional. Namun kelemahan utamanya terletak pada lembaga-lembaga nasional. Meskipun efisiensi

---

89 Seperti dinyatakan oleh Miranda Goeltom pada Fokus Group Discussion, BPPK Kemlu tanggal 3 Agustus 2010.

90 Focus Group Discussion Departemen Luar Negeri RI, *"Optimalisasi Peran Indonesia di G-20: Penguatan Struktur Domestik Diplomasi Kita."*, Bandung, Hotel Amarossa, 3 Agustus 2010.

pemerintahan dan lembaga-lembaga swasta, bangsa ini masih menderita karena korupsi yang luas, kemandirian peradilan yang terbatas dan rejim hak cipta yang buruk.

Demikian juga menyangkut kualitas infrastruktur. Pemerintah harus lebih banyak menjaga inflasi dibawah dua digit. Dalam sektor sosial, ini harus fokus untuk memperbaiki indikator-indikator kesehatan dasar seperti angka kematian bayi dan harapan hidup, dan untuk meningkatkan pendidikan tingkat menengah. Pemerintah saat ini seharusnya dapat mengambil keuntungan dari popularitas dan konteks ekonomik yang mendukung untuk lebih banyak berinvestasi dalm infrastruktur dan sektor-sektor lain yang menyentuh kepentingan masyarakat luas.[91]

Struktur finansial global yang kompleks

Disamping tantangan internal, Indonesia menghadapi tantangan bagaimana memahami penuh struktur finansial global yang sangat komplek dan beragam. Struktur finansial global yang sedang berlangsung saat ini menggambarkan suatu kompleksitas yang tinggi. Terdapat keberagaman sistem yang dikembangkan oleh negara-negara maju. Sistem finansial dan perbankan yang berkembang di negara-negara maju sangat rumit dan kompleks. Ini berbeda dengan sistem yang berkembang di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. *"Hedge funds"* misalnya dikenal di Amerika Serikat sebagai agen kredit yang lazim; Ini karena dipengaruhi oleh sistem politik yang kompetitif yang seringkali menguntungkan para politisi. Sementara di Eropa lebih mengandalkan lembaga keuangan perbankan yang formal.

Pertanyaannya adalah apakah representasi Indonesia memiliki pengetahuan yang cukup komprehensif terhadap struktur yang sangat kompleks tersebut?[92] Pemahaman ini sangat diperlukan supaya Indonesia dapat memberikan kontribusi yang tepat guna dalam proses G-20. Kompetensi individual representasi Indonesia menjadi sangat penting dalam hal ini.

Di samping penguasaan komprehensif terhadap sistem fiskal yang berlaku internasional, sistem moneter yang berlangsung serta rejim-rejim perbankan

91 The World Economic Forum Press Release, *Op.Cit*.
92 Keraguan ini misalnya dikemukakan oleh salah seorang responden dari lembaga finansial internasional yang melihat betapa kompleksnya sistem keuangan global yang sedang berlangsung saat ini.

yang disepakati di Basel, Swiss, diperlukan pula pemahamanan mendalam terhadap pengaruh dari implementasi komitmen-komitmen yang dibuat dalam proses G-20. Bagaimana Indonesia menghadapi tantangan keuangan global di masa depan, kelangsungan kebijakan stimulus secara global, dan kebijakan perdagangan, mekanisme aliran dana likuiditas serta proses reformasi lembaga keuangan internasional.

KTT Toronto pada bulan Juni 2010 melaporkan bahwa pertumbuhan perekonomian global menunjukan angka positif, termasuk kondisi Indonesia yang masih stabil. Indonesia harus bekerja keras untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasionalnya sesuai agenda nasional, khususnya dalam agenda pembangunan infrastruktur domestik yang pembiayaannya didukung stimulus. Pendanaan melalui stimulus adalah bersifat *ad hoc* dan karenanya Indonesia harus mempertimbangkan sumber dana yang lebih bersifat permanen.

Harus disadari pula bahwa pelaksanaan kebijakan stimulus fiskal untuk menanggulangi dampak krisis global di negara-negara maju telah menimbulkan kekhawatiran adanya tekanan terhadap *cost of financing* yang akan berimbas di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Berdasarkan kesepakatan bersama untuk menangani kekhawatiran terhadap *cost of financing* tersebut negara maju melakukan kebijakan konsolidasi fiskal bersama. Indonesia perlu mengkaji dengan seksama baik *cost of financing* dan dampak dari konsolidasi fiskal bersama tersebut.

Masih juga terdapat ketidakpastian terkait dengan imbas pelaksanaan program peningkatan permintaan domestik (untuk meningkatkan daya beli masyarakat) dan fleksibilitas nilai tukar antara negara-negara *emerging markets* seperti, China, India, Rusia, Brasil termasuk Indonesia. Aktivitas perdagangan internasional tersebut memberikan peluang bagi produk Indonesia secara besar-besaran, dan disinilah tantangan Indonesia untuk menyediakan produk yang sesuai dengan standarisasi dan meningkatkan nilai ekspor Indonesia.

Berhubungan dengan proses pemulihan kondisi keuangan global, inisiatif Indonesia terhadap akses keuangan fasilitas likuiditas lembaga multilateral melalui mekanisme likuiditas yang tanpa persyaratan berlebihan *(conditionalities aspect)* dan dapat dicairkan dalam waktu singkat terhadap negara berkembang harus terus dimonitori dan diawasi.

Terakhir, berkaitan dengan proses reformasi lembaga keuangan internasional, tanggungjawab Indonesia untuk mengawasi regulasi di

sektor keuangan, termasuk didalamnya pengawasan terhadap mekanisme transparansi, sistem akuntabiltas dan manajemen lembaga keuangan. Indonesia harus konsisten dalam melaksanakan pengawasan untuk mencegah dan antisipasi terjadinya gelombang krisis lanjutan.

Keraguan terhadap keanggotaan Indonesia dalam G-20

Masuknya Indonesia dalam G-20 menimbulkan pertanyaan bagi beberapa pihak, khususnya negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara yang merasa lebih mapan secara ekonomi, seperti Singapura dan Malaysia. Tingkat keterbukaan perekonomian Indonesia masih dipertanyakan oleh banyak negara. Birokrasi Indonesia juga dinilai belum sepenuhnya mendukung tingkat perekonomian yang terbuka. Indonesia juga tercatat sebagai negara dengan tingkat korupsi yang besar. Tingkat stabilitas politik Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan bagi investasi asing yang aman. Reformasi politik yang saat ini dikembangkan Indonesia tidak memperlihatkan suatu prestasi bagi terciptanya stabilitas politik.

Merespon keraguan ini, Indonesia perlu membuktikan bahwa Indonesia memang pantas masuk dalam G-20. Misalnya dengan menunjukan peningkatan pertumbuhan ekonomi positif. Pembuktian diri tersebut dapat dilakukan dengan mencapai target pertumbuhan ekonomi untuk 2010 agar mencapai hingga 6 persen sesuai dengan target pemerintah, sehingga dapat menciptakan 2,32 juta lapangan kerja di Indonesia dan dapat secara langsung menyerap 1,9 juta gabungan antara angkatan kerja baru dan pengangguran lama. Realisasi investasi langsung yang ditargetkan pemerintah untuk tahun 2010 sebesar Rp. 1894 triliun, sedangkan pada semester I-2010 pemerintah baru berhasil mencapai Rp. 400 triliun.[93] Harus disadari bahwa kebijakan stimulus tidak akan menciptakan kebangkitan ekonomi yang *sustainable* karena stimulus hanya berfungsi sebagai *pump pricing*. Agenda yang harus ditindaklanjuti pemerintah adalah tidak mengandalkan kebijakan stimulus berlebihan dan dalam waktu yang lama, karena APBN 2010 Indonesia masih menyebutkan kebijakan stimulus fiskal didalamnya.

Ketua Sherpa G-20 Indonesia yakin bahwa Indonesia memiliki hak untuk menjadi anggota klub tersebut yang pembentukannya berdampak signifikan pada arsitektur finansial global:

93 Pieter P. Gero, “Hambatan Utama pada Sang Pemimpin”, Kompas, 30 Juli 2010.

"Pertama dilihat dari Pendapatan Domestik Bruto dengan Purchasing Power Parity negara kita, mata total PDB nomer 16 terbesar di dunia. Kedua selama krisis di dua tahun terakhir Indonesia termasuk yang paling tahan terhadap dampak dan gelombang setelah China dan India. Yang ketiga, ada pembagian kategori negara majur surplus atau negara maju defisit, negara maju dan negara berkembang defisit, Indonesia termasuk emerging economy yang surplus. Surplusnya sedikit, tetapi termasuk satu dari tiga negara yang surplus (China dan Argentina)."[94]

Indonesia tentu saja perlu merespon skeptisime tersebut dengan membuat tindakan-tindakan nyata. Pendekatan 'memimpin dengan contoh' seharusnya membawa keuntungan dan dapat mengembalikan kepercayaan di antara negara-negara berkembang lainnya.

f. Agenda bagi penguatan koordinasi anter kementrian dan peningkatan kompetensi representasi Indonesia dalam G-20

Berdasarkan paparan di bagian terdahulu dan mempertimbangkan kondisi riil dan tantangan-tantangan yang muncul, sejumlah rekomendasi dapat diajukan untuk peningkatan peran Indonesia dalam proses G-20.

Menyelesaikan agenda nasional

Indonesia jelas telah menunjukan antusiasismenya menjadi anggota G-20. Namun Indoensia seharusnya juga memahami bahwa keanggotaan dalam forum ekonomi global ini menjadi satu-satunya obat mujarab untuk mengobati masalah-masalah pembangunan di tingkat nasional.[95] Keanggotaan

---

94 Pandangan ini dikemukakan oleh Ketua Sherpa G-20 Indonesia dalam pidato kunci yang disampaikan dalam Diskusi Panel tentang Indonesia dan G-20: Pandangan Kritis dan Strategis, 20 September 2010. Ini dikemukakan kembali pada pidato kunci dan konferensi pers pada Focus Group Discussion tentang G-20 dan Agenda Pembangunan tanggal 4 Nopember 2010.

95 Rekomendasi dari Focus Group Discussion dan Workshop tentang G-20 dan Agenda Pembangunan, diselenggarakan oleh Friedrich Ebert Stiftung Indoensai dan Universitas Katolik Parahyangan, 4 Nopember 2010.

dalam G-20 tidak secara otomatis membawa perubahan di Indonesia, kecuali Indonesia bertanggung jawab terhadap perubahan itu sendiri dalam kerangka G-20. Pemerintah Indonesia seharusnya melanjutkan tanggungjawab legalnya bagi agenda pembangunan nasional yang terbaik untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Indonesia perlu melihat masalah utama pembangunan dan menangani masalah tersebut dengan tepat. Indonesia harus menciptakan lapangan pekerjaan yang layak, mengentaskan kemiskinan di daerah perkotaan dan pedesaan, menyediakan makanan cukup bagi rakyat dan menjamin akses yang sama di bidang pendidikan dan kesehatan, dll.

Indonesia seharusnya memperbaharui komitmen pada MDGs dan memahami bahwa komitmen global ini bisa gagal dicapai pada tahun 2015 jika setiap negara di Utara dan Selatan tidak konsisten untuk menjalankan agenda nasional dalam kerangka MDGs. Kemampuan Indonesia untuk menyelesaikan agenda nasional akan memberikan legitimasi yang kuat untuk meningkatkan perannya dalam mengartikulasikan kepentingan negara-negara Selatan dalam G-20 dan forum-forum multilateral lainnya.

Peningkatan koordinasi melalui Sekretariat Bersama G-20

Peningkatan koordinasi interdepartemental berfungsi untuk kemudahan penugasan serta *job description* tiap kementrian yang terkait. Sedangkan, peningkatan komunikasi lintas lembaga politik berguna untuk mencegah kesalahpahaman dan *misunderstanding* serta penguatan dalam aspek *check and balances* pilar-pilar negara. Untuk mengatasi tantangan mengenai *intra-koordinasi* baik antara Departemen atau lintas Departemen bahkan lintas lembaga politik khususnya antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, dibutuhkan suatu sekretariat bersama yang efektif untuk mengkoordinasikan seluruh gerak Indonesia sebelum dan sesudah pertemuan G-20.[96]

Koordinasi seperti ini menjadi sangat penting karena hakikat proses dalam G-20 saat ini telah berkembang menjadi suatu jaringan yang luas. G-20 telah mengangkat pembicaraan dalam forum-forum internasional yang awalnya eksklusif dalam rejim perbankan (Basel I, II dan III), dan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia dan lembaga dana

96 Wawancara dengan perwakilan Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 27 Mei 2010.

multilateral regional. G-20 juga telah mengangkat isu yang kontroversial dalam WTO menyangkut kesepakatan-kesepakatan dalam rejim perdagangan internasional. G-20 mulai membahas soal energi dan perlindungan lingkungan hidup. Perkembangan ini jelas menunjukkan suatu agenda yang multisektoral yang selama ini ditangani secara terpisah oleh kementrian-kementrian yang berbeda-beda.

Gagasan terhadap pembentukan sekretariat bersama telah digagas oleh Presiden Yudhoyono sebagai rencana tindak lanjut yang penting menyikapi tuntutan bagi peningkatan peran Indonesia dalam proses G-20:

> *"Pembentukan gugus tugas bertugas merumuskan, mengimplementasikan dan memantau langkah-langkah yang harus dilakukan didalam negeri, yang termasuk didalamnya aspek (i) penguatan sektor keuangan dan perbankan, (ii) mengamankan APBN, (iii) mendorong ekspor, investasi serta penguatan pasar dalam negeri. Gugus tugas tersebut akan beranggotakan unsur-unsur Pemerintah, Bank Indonesia dan Asosiasi-Asosiasi terkait."*[97]

Gagasan ini tentu saja perlu segera direalisasikan secara formal oleh Presiden dengan penunjukan pejabat-pejabat yang bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan tugas. Kementrian Keuangan, Bank Indonesia, Bappenas dan Kementrian Luar Negeri menjadi lembaga-lembaga yang harus terlibat aktif dalam menggali input dari masyarakat luas, menjalin kerjasama dengan kementerian terkait dari negara-negara anggota G-20 terutama untuk menyelaraskan kepentingan, dan mengembangkan konsultasi dengan mitra-mitra non anggota G-20 seperti ASEAN dan negara-negara berkembang di ASEAN maupun kawasan lain.

Reformasi Birokrasi yang lebih efektif dan efisien bagi perekonomian terbuka

Agenda penting lain untuk menunjang partisipasi Indonesia dalam G-20 adalah penataan birokrasi Indonesia yang lebih efisien untuk menopang perekonomian terbuka dan kebijakan finansial yang transparan dan akuntable

---

97 Siaran Pers, Presiden Yudhoyono, Usul-usul kongkrit Indonesia diadopsi KTT G-20 dan Pembentukan Gugus Tugas.

sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Birokrasi yang efektif juga sangat diperlukan untuk menjamin keberlangsungan koordinasi kebijakan, penerapan regulasi dan pengawasan yang sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan dalam G-20. Indonesia telah dikenal sebagai negara dengan tingkat birokrasi yang rumit dan tumpang tindih yang disertai dengan tingkat korupsi yang tinggi. Seringkali juga terjadi tumpang tindih antara prinsip pelayanan publik dan kepentingan politik. Birokrasi seperti ini menyebabkan ijin usaha ekonomi termasuk bagi investor asing seringkali menjadi tersendat dan kurang mendukung iklim usaha yang baik bagi pertumbuhan ekonomi. Birokrasi yang tumpang tindih juga seringkali membuat ketidakpastian akan regulasi yang berlaku bagi pemasok barang-barang impor dari luar negeri.[98] Regulasi bagi masuknya produk asing seringkali diinterpretasikan berbeda menurut pejabat-pejabat pelayanan publik yang berbeda-beda. Reformasi birokrasi menjadi tuntutan yang tidak terelakkan.

Kabinet Presiden Yudhoyono telah mencanangkan program tiga tahun reformasi birokrasi.[99] Agenda reformasi birokrasi sendiri menjadi sasaran dalam pembiayaan kebijakan stimulus, hal tersebut tercantum dalam Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Indonesia Tahun 2010.

Tujuan dari reformasi birokrasi adalah ”untuk memperbaiki birokrasi agar lebih mampu berperan secara profesional dalam menciptakan kondisi yang kondusif dan mendukung terpenuhinya kebutuhan masayarakat.”[100] Ditegaskan lebih lanjut bahwa ”reformasi ini menjadi penting karena proses penataan ribuan fungsi pemerintahan yang tumpang tindih, mengubah pola pikir dan budaya, serta melibatkan anggaran yang sedikit.” dan mendukung terpenuhinya reformasi ini harus mengikuti prinsip-prinsip *good governance* yang berlandaskan pada transparansi, akuntabilitas, pengawasan dan bebas dari korupsi.

Terkait dengan hubungan ekonomi luar negeri reformasi ini akan memberikan peluang besar bagi ’sistem ekonomi yang terbuka’. Sistem pelayanan satu pintu menyangkut perijinan bagi investasi asing misalnya

---

98 Ini misalnya dikemukakan oleh seorang perwakilan lembaga asing dalam wawancara tanggal 8 Juni 2010.

99 Pieter P. Gero, “Hambatan Utama pada Sang Pemimpin”, Kompas, 30 Juli 2010.

100 http://www.bakonhumas.depkominfo.go.id diakses tanggal 30 Agustus 2010.

akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor asing. Demikian pula, ini akan memperlancar arus barang-barang masuk dari luar tanpa dibebani oleh ketidakjelasan regulasi, tumpang tindihnya kantor pelayanan dan pengawasan oleh birokrasi yang berwenang.

Peningkatan Kompetensi Indonesia melalui *research/ support group*

Masing-masing kementrian terkait telah mengembangkan kelompok *think thank* yang tugasnya adalah untuk mendukung delegasi Indonesia dalam pertemuan-pertemuan G-20. Ini tentu saja tidak mencukupi untuk menangani isu yang lintas lembaga.

Peningkatan peran Indonesia selanjutnya perlu didukung penuh oleh suatu lembaga think-thank khusus yang secara komprehensif menguasai isu-isu yang menjadi agenda dalam proses G-20.[101] *Think-thank* ini perlu mengembangkan suatu *research group* yang bertugas mengembangkan kajian menyeluruh tentang struktur finansial global yang kompleks; memahami masing-masing komitmen yang dibuat dalam G-20; memahami implilkasi dari pelaksanaan komitmen dalam G-20; menyiapkan *blue-print* kepentingan dan strategi Indonesia untuk mencapai kepentingannya dalam G-20; mem-*back up* perwakilan Indonesia dengan data yang mencukupi untuk negosiasi-negosiasi dalam G-20.

Ini akan mengatasi keraguan terhadap kompetensi Indonesia dalam proses G-20 dan mengantisipasi dampak buruk dari perubahan politik yang terjadi. Ini juga akan memperjelas posisi Indonesia dalam G-20; tidak serta merta menyepakati komitmen yang dibuat namun juga melihatnya secara kritis sehingga tidak dirugikan oleh laju proses G-20.

Kelompok riset ini dapat juga melakukan kajian serius atas inisiatif-inisiatif baru Indonesia yang akan diusulkan dalam pertemuan-pertemuan G-20. Sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian terdahulu, Indonesia telah mengembangkan kebijakan khusus menyangkut sistem bank Syariah dan Bank Perkreditan Rakya yang ditujukan bagi rakyat miskin. Praktik-praktik ini merupakan hal baik yang bisa menjadi model bagi penanganan dampak sosial krisis ekonomi.

---

101 Seperti dikemukakan oleh Miranda Goeltom dalam Focus Group Discussion, BPPK Kementrian Luar Negeri RI, 3 Agustus 2010.

Wakil Gubernur Bank Indonesia pernah mempresentasikan ide sistem bank Syariah ini dalam pertemuan G-20.[102] Namun tidak mendapatkan tanggapan positif dari anggota-anggota G-20 yang lain. Bisa dipahami bahwa sistem perbankan yang berkembang saat ini lebih didominasi oleh sistem perbankan sekuler yang mengejar profit sebagaimana berkembang di negara-negara maju. Untuk itu perlu dilakukan kajian lebih mendalam tentang sistem perbankan ini sebagai alternatif dari sistem perbankan yang selama ini telah beroperasi.

Indonesia dapat mengajak mitra anggota-anggota G-20 yang menerapkan sistem perbankan Islamik ini untuk mengembangkan sistem alternatif ini. Dalam hal ini, representasi dari negara-negara Islam dapat menjadi punya arti.

102 Wawancara dengan peneliti senior Bank Indonesia tanggal 12 Agustus 2010.

III.
INDONESIA, ASEAN DAN G-20

> "Sebagai bagian dari keluarga besar ASEAN, kita dapat memantapkan stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran di Asia Tenggara dan juga di kawasan Asia Pasifik."[103]

Indonesia telah dikenal sebagai salah satu pemrakarsa pembentukan *Association of Southeast Asia Nations* (ASEAN) di tahun 1967. Indonesia menyadari betul tanggung-jawabnya untuk turut memantapkan stabilitas, perdamaian dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara ini. Di usianya yang ke 43 tahun, ASEAN telah menunjukkan kematangannya sebagai sebuah kerjasama regional yang patut diperhitungkan di arena global. Forum G-20 tampaknya memperhitungkan potensi ASEAN untuk memberi kontribusi bagi proses G-20. Ini tercermin dalam undangan-undangan yang diberikan bagi Sekjen ASEAN dan atau Ketua ASEAN untuk menghadiri pertemuan KTT ASEAN.

Indonesia menyadari bahwa sekalipun Indonesia adalah satu-satunya anggota ASEAN dalam forum G-20, Indonesia tidak dapat serta merta mengklaim sebagai perwakilan ASEAN. Penunjukkan Indonesia atas kriteria 'perwakilan regional' tidak menjadi alasan penguat untuk memainkan perannya sebagai wakil ASEAN dalam G-20. Resistensi beberapa anggota ASEAN terhadap G-20 sebagai tandingan PBB dan lembaga multilateral lain menciptakan batasan

---

103 Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-65 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia tanggal 16 Agustus 2010.

tersendiri bagi Indonesia untuk memainkan perannya sebagai wakil ASEAN.

Dalam konteks seperti ini bagaimana Indonesia dapat membawa ASEAN dan posisinya dalam forum G-20? Bab ini akan memperlihatkan posisi Indonesia dalam ASEAN, pandangan ASEAN terhadap G-20, dan mendeskripsikan bagaimana sikap dan peran Indonesia sebagai satu-satunya negara anggota ASEAN dalam "membawa kepentingan ASEAN" pada forum G-20.

a. Organisasi regional dalam G-20

Uni Eropa *(European Union)* menjadi satu-satunya organisasi regional yang menjadi anggota G-20. Namun demikian, dengan memperhatikan aktivitas negara-negara anggota G-20 di kawasan mereka, negara-negara anggota G-20 sekaligus merupakan anggota dari aneka jenis organisasi regional. Sebagaimana sudah disebutkan dimuka, Indonesia merupakan negara anggota ASEAN *(The Association of Southeast Asian Nations)*, Afrika Selatan tergabung dalam Uni Afrika *(African Union)*, sementara Brasil dan Argentina tergabung dalam Mercosur *(Common Market of the South)*. Negara-negara lain juga memiliki status keanggotaan di organisasi regional yang ada.

Di antara organisasi-organisasi regional yang ada, Uni Eropa merupakan organisasi yang relatif maju. UE beranggotakan 27 negara yaitu Austria, Belgium, Bulgaria, Siprus, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Inggris, jelas menempati peringkat pertama sebagai organisasi regional terbesar di dunia.

Uni Eropa memiliki total populasi 492.387.344 jiwa (perkiraan Juli 2010) dan menempati luas wilayah 4.324.782 km². Dari segi ekonomi, *Gross Domestic Product* Uni Eropa berdasarkan perhitungan *Purchasing Power Parity* mencapai 12,51 triliun dollar AS sementara pendapatan per kapita penduduknya mencapai 32.600 dollar AS (perkiraan 2009). Nilai ekspor dan impor Uni Eropa yang mencapai 1,952 miliar dollar AS dan 1,69 miliar dollar AS merupakan nilai terbesar di dunia.[104]

---

104 European Union Profile. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ee.html. diakses tanggal 26 Juli 2010.

ASEAN merupakan organisasi regional yang relatif patut diperhitungkan setelah Uni Eropa. ASEAN beranggotakan Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar atau Birma, dan Kamboja. Total populasi ASEAN pada tahun 2009 mencapai 591.841.000 jiwa dengan luas wilayah 4.435.830 km². Pendapatan per kapita ASEAN pada tahun 2009 adalah 2.533 dollar AS dengan nilai ekspor dan impor mencapai 803.947 juta dollar AS dan 720.296 juta dollar AS.[105]

Uni Afrika merupakan organisasi regional lain yang merangkul 53 anggota. Organisasi ini mencakup luas wilayah 29.922.059 km² dengan total GDP 500 miliar dollar AS.[106] Organisasi ini harus menangani masalah-masalah pembangunan yang diharapi oleh anggota-anggotanya. Akumulasi hutang negara-negara anggota Uni Afrika mencapai 200 miliar dollar AS.

Di Amerika Selatan, Mercosur yang beranggotakan Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay memiliki total penduduk 242.032.800 jiwa (Juli 2009) dengan luas wilayah 12 juta kilometer persegi.[107] Total GDP Mercosur adalah 1,1 miliar dollar AS.

Di samping empat organisasi regional tersebut, terdapat sejumlah organisasi regional yang lebih kecil. Di Asia Selatan sebagai contoh, telah dibentuk South Asian Regional Cooperation (SAARC). Di Timur Tengah, terdapat Liga Arab yang sudah ada sejak tahun 1940an. Di benua Amerika, terdapat komunitas Amerika Selatan dan Komunitas Andean.

Dengan profil ini, ASEAN dapat dikatakan sebagai organisasi regional terbesar kedua setelah Uni Eropa. Selain data statistik, daya pikat ASEAN terlihat dari berbagai indikator mulai dari pengakuan dalam aneka isu, organisasi, gerakan, dan forum *intergovernmental*, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, meningkatnya nilai investasi asing, dan sebagainya. Tabel ekonomi ASEAN dalam kurun waktu 2008-2009 berikut ini merupakan salah satu indikator penting kinerja ASEAN.

---

105 Indikator dasar ASEAN tertanggal 15 Juni 2010. http://www.aseansec.org/stat/SummaryTable.pdf. diakses tanggal 26 Juli 2010.

106 African Union Profile http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/country_profiles/3870303.stm.. Diakses tanggal 26 Juli 2010.

107 Mercosur Profile. http://www.mercosur.int/msweb/Portal%20Intermediario/ diakses tanggal 26 Juli 2010.

Tabel 3. Indikator-Indikator ASEAN

Data 15 Juni 2010

Indicators	Unit	2008	2009	Keterangan
Total wilayah	Km2	4.435.830	4.435.830	
Total Penduduk	Dalam ribuan	1.532.518	591.841	Data tahun 2009 merupakan angka awal
GDP pada nilai saat ini	US$ juta	1.512.707	1.499.401	Data tahun 2009 bagi Brunei, Kamboja, Laos dan Myanmar diambil dari IMF-WEO April 2010. Data-data untuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam diambil dari BPS nasional masing-masing negara
Pertumbuhan GDP	Persen	4.4	1.5	Data ASEAN diperkirakan dengan memakai angka pertumbuhan negara dan perbadingan dengan GDP dunia yang dinilai dalam PPP$ daro Database IMF-WEO April 2010
GDP percapita pada nilai saat ini	US$	2.592	2.533	
Ekspor	US$ juta	880.766	803.947	
Impor	US$ juta	830.571	720.296	
Investasi langsung asing (FDI)	US$ juta	59.701	-	Angka tahun 2009 belum tersedia
Kedatangan pengunjung	Ribuan	65.605,5	65.437,6	Angka tahun 2009 bersifat sementara

Sumber: http://www.aseansec.org/stat/SummaryTable.pdf

b. Posisi Indonesia dalam ASEAN

Pembentukan ASEAN memiliki akar sejarah sejak tahun 1967 ketika pemimpin Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, Indonesia betemu untuk mensharingkan posisi bersama dalam menanggapi situasi global saat itu. Pertemuan tersebut menghasilkan deklarasi Bangkok yang ditandangani pada tanggal 8 Agustus 1967 yang menjadi dasar pembentukan ASEAN. Brunei Darussalam bergabung tanggal 8 Januari 1984, Vietnam pada 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar tanggal 23 Juli 1997, dan Kamboja pada tanggal 30 April 1999.

Tujuan utama ASEAN adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan budaya di kawasan Asia Tenggara serta mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara sesuai prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.[108]

Bagi Indonesia, ASEAN adalah forum utama untuk politik luar negerinya. Indonesia berinisiatif untuk mempromosikan kerjasama ekonomi, politik dan keamanan dan social budaya. Indonesia mengembangkan ASEAN untuk memfasilitasi integrasi ekonomi (yang diproyeksikan terjadi pada tahun 2015), minimilisir konflik antar negara-negara anggota ASEAN dan memformulasikan posisi ASEAN dalam menanggapi isu-isu global terkini termasuk ancaman eksternal yang potensial seperti terorisme. Melalui ASEAN, telah berupaya untuk meningkatkan Zone perdamaian, kebebasan dan Netralitas di Asia Tenggara (ZOPFAN) dan Zona bebas nuklir Asia Tenggara (NFZ).[109]

Dalam bidang Hak Asasi Manusia, Indonesia adalah negara pertama yang membentuk komisi nasional Hak Asasi Manusia. Sekalipun terdapat tantangan dari beberapa anggota ASEAN lain, Indonesia berhasil memasukan esensi demokratisasi dan HAM dalam piagam ASEAN.[110] Badan HAM ASEAN dibentuk menyusul diadopsinya piagam ASEAN.

Indonesia telah meyakinkan pemimpin-pemimpin ASEAN dalam mengembangkan tiga pilar ASEAN: komunitas politik keamanan ASEAN, komunitas ekonomi ASEAN dan komunitas social budaya ASEAN dengan argumentasi bahwa ketiganya sejalan dan menyeimbangkan dan merefleksikan masyarakat ASEAN. Bersama-sama dengan anggota-anggota ASEAN, Indonesia berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan dan energy di tingkal nasional, regional dan global.

Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT ASEAN dan memegang posisi kepemimpinan pada tahun 2011.[111] Sebagai ketua ASEAN, Indoensia dapat memainkan peraan lebih besar untuk membawa ASEAN menjadi salah satu

---

108 http://www.deplu.go.id/Pages/Asean.aspx?l=id. Diakses tanggal 26 Juli 2010.

109 http://nationstudies.us/Indonesia/98.htm diakses tanggal 26 Juli 2010.

110 Heru Utomo. "Peran Indonesia dalam ASEAN." Koran Jakarta. 2 September 2009, http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=16743 diakses tanggal 26 Juli 2010.

111 President SBY: Indonesia becomes the Host of ASEAN Summit 2011, http://www.deplu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=3354&id, diakses tanggal 26 Juli 2010.

Tabel 4. Perbandingan Indonesia dan Negara Anggota ASEAN Lainnya

Negara	Jumlah Populasi (jiwa)	Luas Wilayah	GDP (official exchange rate)	GDP Per Kapita (PPP)
Brunei	395.027 (perkiraan Juli 2010)	5.765 km²	$14.87 miliar (perkiraan 2009)	$50.100 (perkiraan 2009)
Kamboja	14.753.320	181.035 km²	$11.03 miliar (perkiraan 2009)	$1.900 (perkiraan 2009)
Indonesia	242.968.342 (perkiraan Juli 2010)	1.904.569 km²	$521 miliar (perkiraan 2009)	$4.000 (perkiraan 2009)
Laos	6.993.767 (perkiraan Juli 2010)	236.800 km²	$5.788 miliar (perkiraan 2009)	$2.100 (perkiraan 2009)
Malaysia	26.160.256 (perkiraan Juli 2010)	329.847 km²	$209.8 miliar (perkiraan 2009)	$14.800 (perkiraan 2009)
Myanmar/ Birma	53.414.374	676.578 km²	$26.83 miliar (perkiraan 2009)	$1.100 (perkiraan 2009)
Filipina	99.900.177 (perkiraan Juli 2010)	300.000 km²	$160.6 miliar (perkiraan 2009)	$3.300 (perkiraan 2009)
Singapura	4.701.069 (perkiraan Juli 2010)	697 km²	$165 miliar (perkiraan 2009)	$50.300 (perkiraan 2009)
Thailand	66.404.688	513.120 km²	$269.6 miliar (perkiraan 2009)	$8.100 (perkiraan 2009)
Vietnam	89.571.130 (perkiraan Juli 2010)	331.210 km²	$92.84 miliar (perkiraan 2009)	$2.900 (perkiraan 2009)

Sumber: CIA World Fact Book

pelaku yang paling berpengaruh di kawasan Asia Pasifik. Kepemimpinan Indonesia dapat membantu meyakinkan bahwa proses integrasi dapat berlangsung sebagaimana diharapkan.

Jika diamati lebih dekat, Indonesia memiliki kemampuan untuk memainkan peran besar, tetapi masih banyak tugas domestik yang harus diselesaikan untuk meningkatkan peran tersebut. Tabel 4 menunjukkan posisi Indonesia di antara negara-negara anggota ASEAN lainnya dari sisi jumlah populasi, luas wilayah, *Gross Domestic Product* (GDP), dan GDP per kapita. Dalam hal total penduduk, wilayah, dan GDP Indonesia tentu saja merupakan negara terbesar. Namun dalam hal GDP per kapita, ranking Indonesia terletak di bawah Singapura, Thailand dan Malaysia.

Dengan memperhatikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI), Indonesia memiliki tugas domestik yang besar jika dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. HDI adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. Hasil pengukuran ini memperlihatkan apakah suatu negara dikategorikan sebagai *Very High Human Development*, *High Human Development*, *Medium Human Development*, atau *Low Human Development*.[112] Seperti ditunjukkan dalam Gambar 4 dan 5, IPM Indonesia berada dibawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Philipina. Berdasarkan data *United Nation Development Program* (UNDP) 2009, IPM Indonesia menempati peringkat 111 dari seluruh negara di dunia. Dengan nilai ini, Indonesia berada pada kategori *Medium Human Development* dan berada pada peringkat enam dari seluruh negara anggota ASEAN. Nilai IPM tertinggi di ASEAN diraih Singapura dan terendah adalah Myanmar.

Gambar 4. Diagram IPM Indonesia tahun 2009
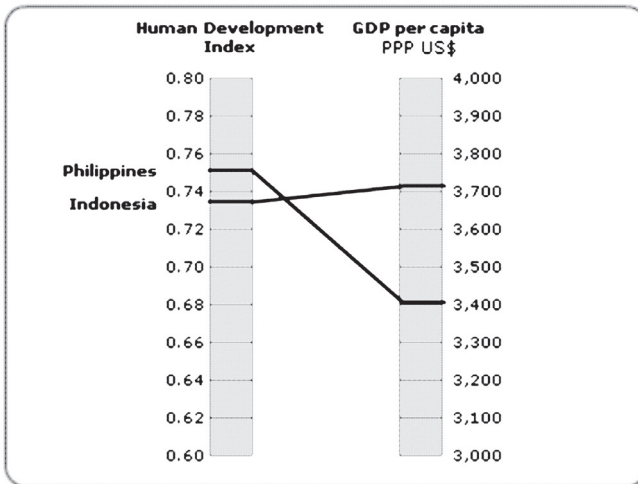
Sumber: http://hdrstats.undp.org/en/countries/country_fact_sheets/cty_fs_IDN.html. Human Development Report 2009 Indonesia

---

112 Statistics of the Human Development Report. http://hdr.undp.org/en/statistics/. Diakses tanggal 26 Juli 2010.

Tabel 5. Perbandingan IPM Indonesia dan Negara Anggota ASEAN Lainnya (2009)

Negara	Ranking Dunia	Kategori	Ranking dalam ASEAN
Singapura	23	Very High Human Development	1
Brunei Darussalam	30	Very High Human Development	2
Malaysia	66	High Human Development	3
Thailand	87	Medium Human Development	4
Filipina	105	Medium Human Development	5
Indonesia	111	Medium Human Development	6
Vietnam	116	Medium Human Development	7
Laos	133	Medium Human Development	8
Kamboja	137	Medium Human Development	9
Burma/Myanmar	138	Medium Human Development	10

Sumber: http://hdrstats.undp.org/en/countries/country_fact_sheets/cty_fs_IDN.html.
Human Development Report 2009.

Memiliki penduduk yang besar jumlahnya dan tinggal diwilayah yang luas dengan GDP yang tinggi mungkin menjadi nilai tersendiri untuk Indonesia; tetapi ini seharusnya diikuti dengan upaya serius untuk meningkatkan IPM Indonesia.

c. Pandangan ASEAN terhadap G-20

Pada dasarnya, ASEAN mendukung G-20 sebagai sebuah forum intergovernmental yang cukup menyuarakan kepentingan negara berkembang. ASEAN memberikan dukungan bagi peningkatan peran G-20 sekaligus berharap dapat memberikan kontribusi melalui partisipasi wakil resminya (Ketua ASEAN dan Sekretaris Jenderal ASEAN) secara langsung dalam KTT G-20.

Dukungan ASEAN terhadap peningkatan peran G-20 beberapa kali diumumkan dalam berbagai kesempatan. Para pemimpin ASEAN dalam KTT ASEAN ke-16 yang berlangsung pada tanggal 8-9 April 2010 di Hanoi – Vietnam, misalnya, dalam poin mengenai penguatan integrasi ekonomi ASEAN menyatakan:

"Kami menyambut baik pernyataan pemimpin-pemimpin G-20, yang dibuat di KTT Pittsburgh pada bulan September 2009 dan deklarasi pemimpin-pemimpin APEC yang dibuat di Singapura pada bulan Nopember 2009, khususnya tentang kesimpulan yang ambisius dan berimbang dari Agenda Pembangunan Doha, penolakan terhadap proteksionisme, dan kebijakan paket stimulus global untuk melanjutkan pemulihan ekonomi global. ASEAN sangat berkeyakinan bahwa ini dapat memberi kontribusi bagi proses deliberasi dalam G-20 melalui partisipasi ketua ASEAN dan Sekretaris Jenderal ASEAN dalam KTT-KTT G-20 selanjutnya." [113]

Negara-negara anggota ASEAN bahkan berharap G-20 dapat memperkuat hubungan ASEAN dengan negara-negara tetangga 'sesama Asia' seperti RRC, India, Korea, dan Jepang yang saat ini masuk dalam jajaran negara berkapasitas mapan secara ekonomi, terlebih Korea Selatan akan menjadi ketua dalam KTT G-20 tahun 2010. Sekretaris Jenderal ASEAN, Surin Pitsuwan, mengatakan: *"ASEAN akan membicarakan pengalaman mengelola isu-isu makroekonomi dan prudensia dan dapat mengambil manfaat dari sinergi negara-negara Asia Timur seperti India, China, Korea dan Jepang".* [114]

Dukunan ASEAN segera menuai respon positif dari negara-negara anggota G-20. Dalam beberapa pertemuan, G-20 telah mengundang ketua ASEAN, Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva, bersama-sama dengan sekretaris jenderal ASEAN untuk hadir dan menjadi observer dalam KTT G-20. Perdana Menteri Inggris, Gordon Brown secara resmi mengundang Ketua ASEAN untuk menghadiri KTT G-20 pada tanggal 2 April 2009. Brown mengungkapkan bahwa penyelesaian krisis global yang efektif membutuhkan sebanyak mungkin 'rekan' dari seluruh penjuru dunia.[115]

KTT ke-14 G-20 yang berlangsung London ini bertujuan memperbaiki stabilitas keuangan dunia dan menetapkan langkah-langkah perbaikan

---

113 ASEAN Leaders' Statement on Sustained Recovery and Development. http://asean2010.vn/asean_en/news/46/2DA86C/ASEAN-LEADERS-STATEMENT-ON-SUSTAINED-RECOVERY-AND-DEVELOPMENT. diakses tanggal 26 Juli 2010.

114 ASEAN hopes to strengthen ties with neighbors through G-20 Summit. http://eng.caexpo.org/news/t20100427_87293.html. diakses tanggal 26 Juli 2010.

115 Britain invites Asian, African bodies to G-20 summit. http://www.straitstimes.com/Breaking%2BNews/World/Story/STIStory_340958.html. diakses tanggal 26 Juli 2010.

ekonomi. Dalam KTT ini, para pemimpin ASEAN sepakat dengan G-20 dalam hal reformasi pasar dan lembaga keuangan internasional. Bersama anggota G-20, para pemimpin ASEAN juga sepakat bekerjasama dengan negara lainnya untuk mengatasi krisis ekonomi dan keuangan global yang terjadi.

Surin Pitsuwan menanggapi positif undangan Gordon Brown sebagai bentuk pengakuan G-20 terhadap ASEAN. Surin Pitsuwan pun berharap KTT G-20 London 2009 dapat meningkatkan koordinasi terkait kebijakan makroekonomi dalam rangka mencari solusi guna mengatasi krisis seperti mereformasi pasar dan lembaga keuangan internasional, serta menolak proteksionisme.

> *"Undangan tersebut menunjukan pertanda kuat bahwa G-20 mengakui ASEAN. Baik negara emerging economy dan negara berkembang serta negara-negara maju perlu bekerja bersama-sama untuk mengatasi krisis finansial yang sedang berlangsung. Dengan prospek ekonomi global yang menurun, KTT G-20 di London sangat tepat waktu. Pemimpin-pemimpin ASEAN menekankan pentingnya koordinasi kebijakan makroekonomik untuk mengatasi krisis dan mengupayakan reformasi mendesak dan mendasar sistem finansial internasional. Mereka juga sangat menentang proteksionisme"*116

Upaya 'menolak proteksionisme' ini bahkan kembali ditegaskan dalam Pernyataan Bersama Pertemuan Pertama Pemimpin ASEAN-AS *(Joint Statement from First ASEAN-U.S. Leaders' Meeting)* pada tanggal 15 November 2009. Pada kesempatan yang sama, AS menyatakan dukungannya pada ASEAN dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip G-20 dalam kerangka kebijakan pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang.[117]

Senada dengan Sekjen ASEAN, dalam pidato pembukaan KTT ke-15 ASEAN di Hotel Dusit Thani, Hua Hin (23 Oktober 2009), PM Thailand Abhisit Vejjajiva turut menyerukan agar ASEAN dapat mewakili suara negara berkembang dalam G-20 guna mengatasi dampak krisis keuangan global yang masih berlanjut. Ahbisit mengatakan bahwa ASEAN harus menjadi organisasi kawasan yang tanggap terhadap perubahan kondisi di tingkat regional dan

116 Press Release Secretary-General of ASEAN to attend G-20 Summit in London – ASEAN Secretariat, 6 Maret 2009.

117 Joint Statement Pertemuan Pertama Pemimpin ASEAN- AS.http://www.america.gov/st/texttrans-english/2009/November/20091116162427xjsnommis0.2769281.html&distid=ucs#ixzz0uWUFtnrZ. diakses tanggal 26 Juli 2010.

global sehingga visi ASEAN tetap hidup. Lebih lanjut Ahbisit mengatakan bahwa keterwakilan ASEAN dalam forum G-20 telah menunjukkan bahwa kepentingan ASEAN tidak hanya menjadi urusan negara-negara Asia Tenggara, tetapi juga seluruh dunia. ASEAN telah menjadi suara negara-negara berkembang lainnya dalam upaya mengatasi krisis ekonomi pada pertemuan G-20 di London dan Pittsburgh.

Dalam KTT ke-15 ASEAN ini, para pemimpin ASEAN juga mendukung isu yang diangkat dalam KTT G-20 di Pittsburgh pada September 2009 yakni mengimplementasikan reformasi lembaga keuangan internasional sekaligus memastikan transpransi dan efisiensi lembaga keuangan internasional dalam menyuarakan suara negara maju dan berkembang secara berimbang. Pada kesempatan ini, ASEAN menyambut positif undangan G-20 terhadap ketua dan Sekjen ASEAN untuk hadir dalam KTT G-20. Undangan ini dipandang positif dalam mempererat koordinasi pendekatan regional dengan global.[118]

Sebuah hal menarik yang diangkat dalam KTT ke-15 ASEAN adalah dicetuskannya Kelompok Kontak ASEAN G-20.[119] Kelompok Kontak ini beranggotakan Ketua ASEAN, Indonesia sebagai satu-satunya anggota G-20 dari ASEAN serta Sekjen ASEAN. Tujuan utama dari pembentukan kontak grup ini adalah mengkoordinasikan posisi ASEAN dalam KTT G-20. Meski belum tentu menyelesaikan persoalan seputar isu keterwakilan dalam G-20, ide ini dapat menjadi sebuah inovasi baru.

ASEAN pun turut mengambil bagian dalam KTT G-20 di Toronto, Kanada yang berlangsung tanggal 26-27 Juni 2010. KTT G-20 di Toronto berbicara seputar perbaikan dan pembangunan berkelanjutan dalam ekonomi dunia. Dalam KTT ini, ketua ASEAN, Vietnam, diundang hadir mewakili ASEAN. Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan juga turut diundang. Surin kembali mengatakan bahwa undangan ini menjadi pengakuan komunitas global terhadap potensi ASEAN sebagai sebuah organisasi regional yang sukses. Surin menggarisbawahi undangan ini sebagai bukti dukungan terhadap visi ASEAN.[120]

---

118 Pernyataan Ketua KTT ASEAN ke 15 “Enhancing Connectivity, Empowering Peoples.”http://www.15thaseansummit-th.org/PDF/24-02Chairman%27sStatementofthe15thASEANSummit_final_with_logo.pdf. diakses tanggal 26 Juli 2010.

119 Pernyataan Ketua KTT ASEAN ke 15 “Enhancing Connectivity, Empowering Peoples.” http://www.15thaseansummit-th.org/PDF/24-02Chairman%27sStatementofthe15thASEANSummit_final_with_logo.pdf. diakses tanggal 26 Juli 2010.

120 ASEAN to Attend G-20 Summit in Toronto.http://english.cri.cn/6966/2010/06/22/167s578525.htm. diakses tanggal 26 Juli 2010.

Mewakili ASEAN, PM Vietnam Nguyen Tan Dung menyampaikan beberapa hal dalam kata sambutan KTT G-20 Toronto. Pertama, ASEAN mendukung kerangka G-20 khususnya tujuan yang berfokus pada upaya maksimal mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan berimbang serta mendukung sistem keuangan yang sehat sebagai sumber pertumbuhan berkelanjutan. Kedua, ASEAN sepakat untuk mempromosikan pemulihan inklusif pada semua kelompok negara untuk memfasilitasi pemulihan dan pertumbuhan berkelanjutan yang lebih besar dalam perekonomian khususnya ketika negara-negara saat ini telah menjadi mesin pemulihan global. ASEAN juga mendukung konsolidasi fiskal yang ramah pertumbuhan, diferensial dan disesuaikan dengan kondisi nasional untuk menjamin mesin pemulihan ekonomi dan sistem keuangan yang sehat sambil menghindari dampak negatif yang umumnya terjadi dalam pertumbuhan, pinjaman asing, dan arus masuknya modal ke negara-negara berkembang. Ketiga, ASEAN berkomitmen melanjutkan usaha-usaha koordinasi kebijakan yang lebih erat dengan G-20. Proses ini berlangsung dua arah yang dimulai dengan partisipasi pro-aktif ASEAN dalam proses pembuatan kebijakan G-20 (sebagai tamu), diikuti dengan penerimaan, adaptasi dan harmonisasi kebijakan dengan kebijakan ASEAN dan berakhir pada mekanisme umpan balik. Model ini dapat menjadi contoh model bagi negara-negara non G-20 guna membangun koordinasi kebijakan yang interaktif dengan mekanisme G-20.[121]

Dalam KTT G-20 selanjutnya yang akan berlangsung bulan 11-12 November 2010 di Seoul, Korea Selatan, ASEAN pun mendapat perhatian. Presiden Komite KTT G-20 berikutnya, Dr. Changyong Rhee, memilih Sekretariat ASEAN sebagai kunjungan pertamanya untuk mempromosikan agenda G-20. Dr. Changyong Rhee mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan inisiatif Korea Selatan untuk mencari pandangan dan masukkan dari kawasan dalam mempersiapkan agenda pertemuan G-20.

> *"Puluhan tahun yang lalu, Korea Selata adalah negara berkemabng, dan sekarang negara maju. Ini mewakili masa depan yang hendak dicapai bangsa-bangsa Asia. Korea Selatan melihat kemampuannya untuk membantu mengurangi gap (mencapai konsensus) di antara anggota-anggota*

121 Sambutan Ketua ASEAN, Nguyen Tan Dung, di Pembukaan KTT G-20 Toronto, Kanada – 27 Juni 2010.http://www.aseansec.org/24828.htm. diakses tanggal 26 Juli 2010.

menyangkut isu-isu mulai dari lembaga finansial hingga pertumbuhan yang berimbang."[122]

Dr. Changyong Rhee pun menuturkan kunjungan awal ini dilakukan agar dapat sedini mungkin menyertakan pandangan ASEAN dalam pembentukan agenda G-20. Fokus utama dalam agenda G-20 berikutnya adalah agenda baru terkait jaring pengaman keuangan global dan isu perkembangan. Untuk itu, Dr. Changyong Rhee meminta pendapat mengenai topik yang diinginkan ASEAN sehingga jurang antara negara maju dan berkembang dapat teratasi.[123]

Rhee menambahkan bahwa Korea Selatan adalah negara non G-8 pertama yang menjadi tuan rumah penyelanggaraan KTT G-20. Dalam kesempatan serupa, Dr. Changyong Rhee meminta ASEAN mendukung upaya Korea Selatan untuk mempererat G-20 sebagai forum utama, bukan hanya sebagai forum manajemen krisis tetapi juga dapat menjadi forum kerjasama ekonomi di luar masalah krisis.[124]

Dilihat dari sudut 'individu' negara anggota ASEAN, Singapura menunjukkan perspektif yang sama dengan ASEAN dengan catatan kebijakan G-20 dapat memperkuat PBB. Dalam salah satu pidatonya di parlemen pada tanggal 5 Maret 2010, Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo mengatakan:

"Kami melihat bahwa G-20 sebagai agen perubahan yang positif. Kami sanat mendukung proses G-20 dan berusaha berkontribusi semampu kami. Kami berpartisipasi dalam proses Kelompok tata kelola global ini untuk membantu G-20 mendapatkan legitimasi yang lebih besar dalam komunitas bangsa-bangsa global. Ini penting bahwa keputusan-keputusan G-20 mempertimbangkan kepentingan-kepentingan negara-negara lain dan didukung oleh mereka. Proses G-20 seharusnya memperkuat PBB dan organisasi internasional lain, bukan justru memperlemah.[125]

---

122 Seoul woos ASEAN for G-20 support.http://www.thejakartapost.com/news/2010/02/19/seoul-woos-asean-G-20-support.html. diakses tanggal 26 Juli 2010.

123 Lihat "ASEAN Sought for G-20 Agenda". Sekretariat ASEAN, 10 Februari 2010. http://www.aseansec.org/24319.htm. diakses tanggal 26 Juli 2010.

124 Ibid.

125 Sambutan Menteri Luar Negeri George Yeo di Parlemen dalam debat Committee Of Supply pada 5 Maret 2010. http://www.isria.com/pages/6_March_2010_12.php. diakses tanggal 26 Juli 2010.

Pernyataan Menlu George Yeo sejalan dengan kebijakan luar negeri Singapura:

> *"Singapura berkeyakinan bahwa PBB adalah satu-satunya badan global dengan partisipasi universal dan legitimasi yang kuat, proses global lain separti G-20 seharusnya mengakui dan merefleksikan realitas ini. Dalam kaitan ini, kelompok-kelompokseperti Global Governance Group (3G), yang terdiri dari negara-negara kecil dan menengah, yang Singapura upayakan bentuk di PBB, dapat membantu memperkuat kerangka keterikatan antara G-20 dan non anggota G-20 sehingga tindakan-tindakan dan keputusan-keputusannya yang dibuat dalam proses seperti G-20 melengkapi dan memperkuat PBB."*[126]

Dukungan terhadap G-20 juga diungkapkan Thailand. Responden yang mewakili perwakilan Thailand untuk Indonesia mengemukakan bahwa G-20 merupakan solusi terbaik di mata Thailand karena forum ini mewakili suara negara maju dan negara berkembang. Meski demikian, Dubes Thailand mengatakan bahwa hasil kerja G-20 masih menunjukkan lemahnya pemulihan ekonomi.[127] Salah satu anggota ASEAN yang berpengaruh tersebut mengingatkan agar G-20 tidak terjebak menjadi suatu *"talk show eksklusif"*. Untuk itu, Thailand memandang penting upaya koordinasi dan pertemuan konsultasi antara negara anggota dan non anggota G-20 sehingga masukkan dari negara non anggota dapat terakomodasi. Thailand juga menyarankan adanya mekanisme standar sehingga pandangan negara non G-20 dapat terakomodasi guna menghindari terjadinya unilateralisme. Di sisi lain, Thailand mengaku puas dengan hadirnya Ketua ASEAN dalam setiap forum G-20 setelah saran Indonesia dalam KTT G-20 di Pittsburgh untuk memasukkan Ketua ASEAN, diterima G-20.

---

126 Foreign Policy – Menteri Luar Negeri Singapura. http://www.mfa.gov.sg/. diakses tanggal 26 Juli 2010.

127 Wawancara dengan perwakilan Kedutaan Besar Thailand untuk Indonesia pada16 Juni 2010.

d. Membawa posisi dan kepentingan bersama ASEAN dalam G-20

Dalam keanggotaan G-20, Indonesia menjadi satu-satunya negara anggota ASEAN. Meski demikian, Indonesia menegaskan bahwa keanggotaanya dalam G-20 tidak serta-merta memposisikan diri sebagai 'wakil ASEAN'. Karenanya, ASEAN seharusnya direpresentasikan oleh ketua ASEAN.

Beberapa pendekatan telah diadopsi untuk membawa ASEAN dalam G-20. Pertama, sebagai anggota G-20 Indonesia meyakinkan G-20 untuk mengundang Ketua ASEAN menghadiri KTT-KTT G-20.[128] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai contoh mengemukakan harapannya kepada pemimpin-pemimpin G-20 di Pittsburgh bahwa Ketua ASEAN sebaiknya diundang dalam setiap KTT G-20. Dalam KTT di Kanada (Juni 2010) dan di Korea Selatan (Oktober 2010) sebagai contoh, Indoensia meminta kedua tuan rumah untuk memberi kesempatan kepada ketua ASEAN dan Sekjen ASEAN berpartisipasi dan membawa suara ASEAN.[129] Bersama kehadiran ketua ASEAN, Indonesia tidak hanya membawa kepentingan individualnya tetapi juga dapat mewakili kepentingan negara-negara berkembang dan bangsa-bangsa ASEAN.

Salah satu perwakilan negara anggota ASEAN mengakui bahwa Indonesia telah memainkan peran penting untuk meyakinkan pemimpin-pemimpin G-20 untuk mengundang partisipasi Ketua ASEAN secara periodik dalam KTT G-20.[130] Dia mengakui peran Indonesia dalam pembentukan kelompok kontak ASEAN-G-20 pada KTT ASEAN ke-15 di Thailand.

Pendekatan kedua bersifat lebih substantif. Indonesia dapat memegang posisi yang sejalan dengan aspirasi ASEAN.[131] Meskipun Indonesia tidak dapat mengklaim dirinya sebagai wakil ASEAN, Indoensia memahami bahwa keanggotaaannya dapat membawa keuntungan bagi semua anggota ASEAN. Pengakuan ini misalnya disampaikan oleh kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Paskah Suzetta: "Indonesia sebagai salah satu negara

---

128 Meski Menjadi Anggota G-20, Indonesia Tetap Berperan Aktif di ASEAN. http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2009/10/25/4816.html. diakses tanggal 26 Juli 2010.

129 Ibid.

130 Wawancara dengan perwakilan Kedubes Thailand di Jakarta tanggal 16 Juni 2010.

131 Presiden SBY: Indonesia Menjadi Tuan Rumah KTT ASEAN 2011. http://www.deplu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=3354&l=id. Diakses tanggal 26 Juli 2010.

anggota ASEAN tentu saja harus mengakomodasi kepentingan-kepentingan bangsa-bangsa anggota ASEAN."[132]

Untuk tujuan tersebut, Indonesia memahami pentingnya mekanisme formal untuk memformulasikan posisi ASEAN terhadap isu-su yang sedang dibicarakan dalam G-20 seingga Indonesia dan Ketua ASEAN dapat berbicara dalam satu suara sebelum KTT G-20. Pembentukan kelompok kontak ASEAN G-20 pada KTT ASEAN ke-15 dipandang sebagai langkah strategis untuk membawa ASEAN dengan cara yang lebih substantif.[133] Kelompok kontak ini melibatkan ketua ASEAN, Sekjen ASEAN dan Indonesia sebagai satu-satunya negara anggota ASEAN, dan G-20. Tujuan terbentuknya kelompok kontak ini adalh untuk mengkoordinasikan posisi ASEAN dalam KTT G-20.

Pada KTT ke-15 ASEAN, Indonesia menyarankan bahwa menteri-menteri keuangan ASEAN bertemu secara reguler sebelum KTT G-20. Pertemuan kesepuluh menteri keuangan dapat mengkoordinasikan kebijakan mereka dan memformulasikan posisi bersama dalam merealisasikan stabilitas ekonomi dan finansial di tingkat regional dan global. Inisiatif ini akhirnya ditetapkan dalam pernyataan pemimpin-pemimpin ASEAN.[134]

Atas sikap Indonesia, para pemimpin ASEAN memberikan apresiasi sehingga pembentukan kelompok kontak ASEAN-G-20 untuk memposisikan sepuluh negara Asia Tenggara dalam G-20 mencapai titik kesepakatan. Dalam kontak grup ini, Menteri Keuangan sepuluh negara ASEAN pun wajib bertemu guna mematangkan posisi ASEAN menjelang tiap pertemuan G-20.[135] Sejalan dengan apresiasi ini, ASEAN berharap Indonesia dapat terus mendorong upaya

---

132 RI to Accommodate ASEAN''s Interests at G-20 Summit. http://www.kbri-islamabad.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=487&Itemid=1. Diakses tanggal 26 Juli 2010.

133 Chairman statement of the 15th ASEAN Summit –"Enhancing connectivity, Empowering Peoples, http://www.15thaseansummit-th.org/PDF/24-02Chairman%27sStatementofthe15thASEANSummit_final_with_logo.pdf. Diakses tanggal 26 Juli 2010

134 Indonesia usulkan pertemuan rutin Menkeu ASEAN. http://www.mediaindonesia.com/read/2009/10/25/102027/15/1/Indonesia-usulkan-pertemuan-rutin-menkeu-ASEAN diakses tanggal 26 Juli 2010.

135 Aktif di G-20, Indonesia Tidak akan Tinggalkan ASEAN.http://www.beritabaru.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5803:aktif-di-g-20-indonesia-tidak-akan-tinggalkan-asean&catid=62:nasional&Itemid=54, diakses tanggal 26 Juli 2010.

restrukturisasi lembaga keuangan dunia agar menganut sistem *voting* yang lebih mencerminkan tatanan dunia saat ini serta memastikan negara-negara berkembang memiliki akses dana untuk pembangunan. ASEAN juga meminta Indonesia berperan aktif dalam G-20 guna memastikan gejala proteksionisme dalam perdagangan dunia dapat dihindari.[136]

Pendekatan yang bertujuan untuk menjaga komitmen ASEAN sementara memainkan peran aktif dalam G-20 menuntut kemampuan membangun sinergi antara ASEAN yang agak konservatif dan G-20 yang lebih inovatif. Indoensia memahami bahwa menjadi anggota ASEAN dapat mengangkat posisi tawarnya dalam proses G-20 dan karenanya Indonesia perlu meyakinkan anggota-anggota ASEAN menyangkut peran potensial membawa kepentingan ASEAN dalam G-20.

Pernyataan ini disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa di sela-sela pertemuan KTT ke-15 ASEAN di Hotel Dusit Thani, Hua Hin – Thailand (24 Oktober 2009).

> *"Pengaruh Indonesia di G-20 bukan berarti meninggalkan ASEAN. Sulit membayangkan Indonesia berpengaruh di G-20 kalau tidak berpengaruh pula di ASEAN. Indonesia akan selalu mengedepankan kepentingan ASEAN dalam forum G-20. Indonesia berada di dua "kaki" yakni ASEAN dan G-20. Indonesia tidak semata-mata menjadi juru bicara ASEAN tapi juga bisa menyalurkan kepentingan nasional di G-20 namun tetap konsisten dengan ASEAN."*[137]

Menlu berargumen bahwa peran Indonesia dalam G-20 dan ASEAN dapat bersifat komplementer karena peran kuat Indonesia dalam ASEAN meningkatkan daya tawar Indonesia dalam G-20 dan secara bersamaan peran Indonesia dalam G-20 mempengaruhi ASEAN. Menteri Luar Negeri berargumen: " Ini yang disebut diplomasi, yaitu, bagaimana meningkatkan kapabilitas bersama-sama sehingga kita dapat memanfaatkan ASEAN dalam

---

136 ASEAN Apresiasi Sikap Indonesia Dalam G-20. http://www.antaranews.com/berita/1256401674/asean-apresiasi-sikap-indonesia-dalam-G-20. diakses tanggal 26 Juli 2010.

137 Indonesia Usulkan Pertemuan Rutin Menkeu ASEAN. http://www.mediaindonesia.com/read/2009/10/25/102027/15/1/Indonesia-Usulkan-Pertemuan-Rutin-Menkeu-ASEAN. diakses tanggal 26 Juli 2010.

G-20 dan G-20 dalam ASEAN."[138]

Indonesia sepakat dengan pemimpin-pemimpin G-20 lainnya untuk menjadikan G-20 sebagai forum utama bagi kerjasama ekonomi internasional mereka; namun ide ini tidak berarti ASEAN menjadi forum kedua bagi Indonesia. Penegasan bahwa Indonesia tak akan meninggalkan ASEAN kembali dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan para wartawan di Hotel *Grand Pacific*, Hua Hin, Thailand, 25 Oktober 2010. Dalam pernyataannya, SBY memaparkan:

> *"Harus saya akui, saya telah mendengar ada kekhawatiran bahwa karena Indonesia mempunyai klub baru, rumah baru, yaitu G-20, Indonesia tidak akan lagi menjadikan ASEAN sebagai rumah utamanya. Secara umum, pada forum yang lebih luas, Indonesia sadar bahwa dalam G-20 kita dapat mendiskusikan isu-isu global dengan cara yang lebih konklusif".*[139]

SBY memperjelas bahwa Indonesia akan tetap berperan aktif dan menjadi bagian penting dalam ASEAN karena Indonesia adalah salah satu *founding fathers*. Indonesia memiliki kepentingan terwujudnya ASEAN Community. SBY menambahkan G-20 tidak boleh hanya dirancang untuk menangani persoalan-persoalan ekonomi global. "Suatu saat kita bicara *climate change, harmony civilitation*, tentang bagaimana lebih meningkatkan *international peace and security*. Jadi masalah itu harus kita bisa bahas dengan semua yang lebih representatif," tutur SBY.[140]

Secara umum dapat disimpulkan bahwa posisi Indonesia untuk membawa ASEAN dalam G-20 tidaklah sederhana. Indonesia merupakan satu-satunya anggota ASEAN yang juga anggota G-20. Namun Indonesia menekankan bahwa posisinya tidak mewakili ASEAN, melainkan siap untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan ASEAN. Pendekatan kreatif baru dibuat untuk

---

138 Ibid.

139 Global and regional governance: the ASEAN-G-20 link. http://www.economicsummits.info/2009/10/global-and-regional-governance-the-asean-G-20-link/. diakses tanggal 26 Juli 2010.

140 Meski Menjadi Anggota G-20, Indonesia Tetap Berperan Aktif di ASEAN. http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2009/10/25/4816.html. diakses tanggal 26 Juli 2010.

membawa ASEAN dalam G-20 tanpa mengecilkan peran ASEAN sebagai forum utama kerjasama ekonomi di Asia Tenggara.

e. Agenda peningkatan peran Kelompok Kontak Indonesia dan ASEAN dalam G-20

Dari paparan dalam bagian ini, peningkatan fungsi Kelompok Kontak Indonesia dan ASEAN dalam G-20 perlu diagendakan baik oleh Indonesia, Ketua ASEAN dan Sekretaris Jenderal ASEAN. Fungsi Kelompok Kontak ini meliputi koordinasi kepentingan dan posisi negara-negara anggota ASEAN dan kepentingan dan posisi Indonesia sebagai anggota G-20. Kelompok kontak ini juga dapat menggali lebih dalam kepentingan ASEAN yang selaras dengan kepentingan negara-negara berkembang lain. Ketiga anggota kelompok kontak ini juga bertanggung jawab untuk mengkaji keselarasan komitmen-komitmen yang dibuat dalam G-20 dengan komitmen-komitmen yang telah dibuat oleh anggota-anggota ASEAN dalam KTT-KTT yang telah dibuatnya selama ini. Ini penting untuk tetap menjaga kepentingan regional dalam wadah klub global yang eksklusif. Kelompok kontak diharapkan dapat memperkuat bargaining position Indonesia dan perwakilan-perwakilan ASEAN yang turut hadir dalam KTT G-20.

Kelompok Kontak ini juga penting supaya kepentingan ASEAN juga terus dapat dijaga oleh Indonesia mengingat perwakilan-perwakilan ASEAN tidak dapat selalu hadir dalam pertemuan-pertemuan tingkat menteri dan pejabat senior yang seringkali lebih bersifat implementatif dan koordinatif kebijakan nasional. Harus diakui bahwa penguatan peran ini tidak mudah untuk dilakukan. Negara-negara anggota ASEAN yang "meragukan" kompetensi dan peran Indonesia, akan melihat penguatan peran ini sebagai penguatan legitimasi Indonesia dalam forum G-20. Bagaimanapun harus diakui adanya persaingan di antara negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan pengaruh mereka di kawasan maupun di forum-forum global.

Tantangan kedua muncul berkaitan dengan situasi politik kawasan yang mudah berubah. Tantangan ini misalnya terkait dengan isu perbatasan yang masih harus diselesaikan di antara negara-negara anggota ASEAN. Fluktuasi hubungan Indonesia dan Malaysia, hubungan Singapura dan Indonesia, serta Singapura dan Malaysia membawa dampak yang kurang kondusif bagi kerjasama kongkrit dalam bidang ekonomi. Ini akan mereduksi dukungan

keterlibatan Indonesia dalam proses G-20.

Pergantian kepemimpinan-kepemimpinan rotatif ASEAN juga merupakan tantangan yang dapat menghambat peningkatan peran ASEAN dalam proses G-20 dan kelompok kontak ASEAN-G-20; tidak semua pemimpin melihat G-20 dan peran Indonesia dengan cara pandang yang sama.

Harus diakui pula bahwa kesepakatan yang dibuat dalam G-20 juga berdampak bagi stabilitas hubungan diantara negara-negara anggota ASEAN itu sendiri. Misalnya penambahan bobot suara dalam IMF yang disepakati dalam G-20 dapat memicu persaingan negara-negara anggota ASEAN untuk mendapatkan porsi yang lebih besar dari perubahan penting tersebut. Indonesia tidak serta merta mengklaim hak untuk mendapatkan suara yang lebih besar dan sekaligus menjadi representasi regional di lembaga keuangan internasional tersebut. Thailand dan Singapura memiliki kepentingan yang sama untuk mendapat hak istimewa dalam IMF tersebut.

Dalam hal ini, peran kelompok kontak ASEAN-G-20 seharusnya dimaksimalkan dengan tindakan-tindakan kongkrit. Direktorat Jenderal Multilateral Kementrian Luar Negeri dan Ketua Sherpa G-20 Indonesia dapat memainkan peran penting dalam Kontak Grup ASEAN-G-20. Koordinasi yang efektif tentu harus dilakukan Kementrian Luar Negeri dengan Kementrian Keuangan menyangkut sikap dan posisi kementerian yang terlibat langsung dalam pertemuan-pertemuan lanjutan G-20 yang diharapkan berkesinambungan dengan pertemuan-pertemuan tingkat menteri Keuangan negara-negara Anggota ASEAN. Ini terutama untuk menjaga agar keputusan-keputusan yang dibuat di forum yang berbeda ini tidak bertabrakan satu sama lain; ini juga untuk menjaga supaya komitmen Indonesia dan perwakilan ASEAN dalam G-20 tetap mengacu pada pendekatan-pendekatan yang selama ini diadopsi ASEAN.

IV.
MEWAKILI NEGARA-NEGARA MUSLIM: SEBERAPA RELEVAN ISU MUSLIM DALAM G-20?

> "Sebagai anggota OKI, kita dapat terus menyuarakan jati diri Islam yang moderat, terbuka, toleran dan modern. Kita juga secara konstruktif dapat menjembatani antara Islam dan Barat."[141]

Isu Islam dalam politik global telah menarik perhatian sejak Samuel Huntington, seorang ilmuwan terkemuka Amerika, mempublikasikan karyanya yang berjudul Clash of Civilizations pada pertengahan tahun 1990an. Isu ini mendapatkan perhatian dunia lebih besar lagi terutama terangkat sejak terjadinya peristiwa 9/11, di mana terjadi serangan terorisme dengan menggunakan empat pesawat terbang yang dibajak menyerang Pentagon serta meruntuhkan Gedung *World Trade Center* (WTC) di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001. Kejadian ini memakan korban nyawa yang sangat banyak dengan jumlah hampir 3.000 jiwa.[142] Aksi terorisme ini disebutkan terkoordinir oleh seseorang bernama Osama Bin Laden yang adalah anggota dari gerakan

---

141 Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-65 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia tanggal 16 Agustus 2010.

142 September 11: A Memorial diambil dari http://www.cnn.com/SPECIALS/2001/memorial/ diakses pada 3 Oktober 2008 pukul 04.42 WIB.

revolusioner atas nama Islam.[143] Peristiwa ini kemudian memunculkan istilah Islamophobia karena telah menumbuhkan rasa trauma yang besar di kalangan masyarakat internasional terhadap masyarakat Muslim. Islam menjadi sering dikaitkan dengan fundamentalisme dan terorisme. Melihat hal ini tentu membuat kelompok negara-negara Muslim memiliki rasa untuk bersatu dan membenahi citra yang telah terbentuk di dunia internasional. Tentunya Indonesia juga berpartisipasi dalam pembenahan citra Islam ini.

Di dalam keanggotaan G-20, hanya terdapat tiga negara yang merupakan Muslim, yaitu Arab Saudi, Turki, dan Indonesia. Terdapat suatu pendapat mengenai bagaimana potensi Indonesia dan negara-negara dengan mayoritas Muslim untuk memainkan peran dalam G-20 untuk merepresentasikan kelompok negara tersebut. Bab ini akan membahas seberapa jauh sebenarnya relevansi isu Islam dan keterwakilan Indonesia dalam proses G-20. Pembahasan ini akan meliputi posisi Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam terbesar di dunia, peran Indonesia di dalam dunia Muslim, kemunculan isu Muslim dan suara Muslim, serta relevansi Indonesia merepresentasikan negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

a. Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam terbesar di dunia

Jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia, Indonesia adalah negara berpenduduk mayoritas Islam terbesar di dunia, di mana tercatat 88% dari penduduk Indonesia memeluk agama tersebut.[144] Karenanya Indoensia sering diasosiasikan dengan Islam dan *Islamophobia* yang telah muncul pada masyarakat internasional, khususnya pada masyarakat Barat tentunya memiliki dampak langsung maupun tidak langsung kepada Indonesia. Sayangnya Indonesia juga sering dikenal sebagai sarang teroris terutama sejak Bom Bali terjadi pada bulan Oktober 2002. Beberapa insiden terjadi di tahun-tahun berikutnya: tanggal 5 Agustus 2003 di Hotel JW Marriot di Jakarta; pada tanggal 9 September 2004 di Kedutaan besar Australia di jakarta. Pemboman

143 Charles W. Kegley, Jr dan Eugene R. Wittkopf. (2004). World Politics: Trends & Transformation. Belmont: Thompson-Wadswort., hlm. 441.

144 http://www.gtz.de/de/dokumente/enInfo_Development_Cooperation_and_Islam_in_Indonesia.pdf diakses pada 15 Maret 2009

ini diduga dilakukan oleh kelompok militan Islam yang dikenal dengan Jemaah Islamiah (JI) yang dibentuk di pertangahan tahun 1980an oleh warga Indonesia.

Indonesia sudah berbuat tindakan-tindakan untuk membuktikan bahwa Islam bukanlah agama yang sejahat yang seringkali dicitrakan orang. Sekalipun Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim terbesar, Indonesia menunjukkan dirinya sebagai negara moderat dalam pemikiran. Citra yang dilihat oleh masyarakat internasional antara lain adalah Indonesia sebagai negara yang pluralis dan toleransi terhadap keberagaman khususnya agama.

Kerukunan antaragama menjadi salah satu hal yang ingin dicapai pemerintah Indonesia. Melalui kerukunan ini, pemeluk-pemeluk agama di Indonesia tidak perlu khawatir atau merasakan takut. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berusaha untuk memunculkan sifat bahwa masyarakatnya adalah masyarakat yang moderat, sehingga tercipta keselarasan dan toleransi yang tinggi. Walaupun seringnya sifat moderat ini dicoba diterapkan pada masyarakat Muslim Indonesia, sebenarnya sifat moderat ini ditargetkan untuk pemeluk setiap agama di Indonesia mengingat bahwa bangsa Indonesia tidak terdiri dari pemeluk Islam saja.[145]

Faktor lain yang mempengaruhi citra Islam menjadi kurang baik selain terorisme adalah bahwa Islam dianggap memiliki pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan demokrasi dilukiskan dengan pendapat bahwa:

> *"Kontrol menyeluruh oleh agama (Islam) atas semua aspek kehidupan manusia, individual dan kolektif, menekankan esensi totalitarianism dan control totalitarian yang secara inheren tidak sesuai dengan konsep kebebasan individual yang menjadi jantung demokrasi liberal.*[146]

Sebagai dua sistem kepercayaan terbesar di dunia, masyarakat Barat yang demokratis-liberal dengan masyarakat Islam secara umum memiliki berbagai pandangan dan pemikiran yang bertolak belakang. Masyarakat liberal memegang pada nilai-nilai keterbukaan *(openness)* dan pluralisme, sehingga

---

145 Religious harmony safe under `Pancasila' (March 10, 2009) diambil dari http://old.thejakartapost.com/yesterda ydetail.asp?fileid=20090310.B11 diakses pada 15 Maret 2009.

146 Caroline Cox dan John Marks. (2003). The 'West', Islam and Islamism. London: Cromwell Press, hal. 31.

terbuka untuk kritik dan diskusi. Sedangkan Islam seringnya lebih bersifat dogmatis dan monolitik, sehingga kurang toleransi pada pendapat yang bertentangan atau kritik. Hal yang sama terjadi pada keberagaman, di mana Islam kadangkala tidak menunjukkan toleransi terhadap kelompok non-Islam.

Pada masyarakat liberal, terdapat pemisahan yang jelas antara negara dengan agama, tetapi pada Islam tradisional dan Islamisme, kegiatan-kegiatan politik, agama, sosial, serta pendidikan dihubungkan secara langsung *(direct)* dan sangat erat. Hak asasi manusia dalam Islam juga merupakan suatu isu besar di mata masyarakat Barat dan dunia internasional. Islam dipandang melanggar kesetaraan *(equality)* dalam berbagai hal antara lain, hak individual, hak memilih agama, hak perempuan, serta hak mengeluarkan pendapat pada media.[147]

Pada Islam terdapat kecenderungan untuk mengalahkan kebebasan individual apabila terjadi konflik antaranya dengan nilai-nilai religius, sehingga sering kali hak-hak individu terabaikan. Selain itu, disebutkan bahwa seseorang Muslim yang ingin berpindah ke agama lain harus menerima hukuman mati berdasarkan hukum syariat. Kemudian, perempuan juga mengalami hal yang kurang lebih sama. Mereka memperoleh hak-hak yang terbatas dibandingkan dengan laki-laki, seperti pada pernikahan, perceraian, warisan, dan lain sebagainya. Dalam hal media, terjadi pencegahan kebebasan berekspresi dan akses kepada informasi karena dapat menimbulkan pandangan-pandangan alternatif terhadap pandangan Islam.

Tetapi Indonesia dapat dikatakan telah berhasil untuk membuktikan sebaliknya, yaitu bahwa walaupun mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, Indonesia tetap dapat menjadi negara yang demokratis dan menjalankan asas-asas demokrasi layaknya negara demokrasi lainnya. Sebagai negara demokrasi, Indonesia telah dua kali melaksanakan pemilihan umum langsung dengan sukses. Pemerintah telah memberi hak kepada warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan aspirasinya dan memilih calon yang mereka percaya dapat bertugas dengan baik dalam pemerintahan.

Toleransi juga adalah suatu nilai yang berjalan dengan baik di Indonesia. Perlu dingat bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk yang beragam yang menggunakan berbagai macam bahasa, berasal dari berbagai suku, dan

147 Ibid, hal. 36-43.

menganut berbagai agama. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus memiliki toleransi yang tinggi. Hal ini ditunjukkan melalui slogan *'bhinneka tunggal ika'* yang telah diadopsi sebagai semboyan nasional untuk menjaga integrasi nasional sekalipun terdapat perbedaan tajam dalam penduduknya.

b. Peran Indonesia dalam dunia Muslim

Sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran terhadap negara-negara mayoritas Islam lainnya. Indonesia juga adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, sehingga Indonesia berada dalam posisi yang tepat untuk menjadi jembatan antara dua paham tersebut. Dalam menjalankan peran tersebut, *Organization of the Islamic Conference* (OKI) menjadi sarana yang tepat sebagai wadah komunikasi antar negara-negara mayoritas Islam. OKI menjadi organisasi yang paling terkemuka bagi kerjasama negara-negara Muslim. Organisasi ini pada awalnya lebih banyak menekankan pada masalah politik, terutama masalah Palestina, tetapi dalam perkembangannya OKI menjelma menjadi suatu organisasi internasional yang menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ilmu pengetahuan antar negara-negara mayoritas Muslim di seluruh dunia.

Dalam organisasi tersebut, Indonesia mengambil peran dengan menyampaikan pendapatnya mengenai berbagai hal. Indonesia senantiasa berpartisipasi aktif dalam OKI dengan tujuan akhir untuk mendorong proses *good governance* di dunia Islam untuk menjadikan OKI sebagai organisasi yang kredibel, kompeten, dan diakui perannya di dunia internasional. Peran Indonesia ini semakin diakui dengan adanya fakta bahwa Indonesia berhasil membuktikan bahwa Islam dan demokrasi itu adalah selaras dan dapat berjalan secara bersamaan. Indonesia menjalankan perannya sebagai berikut.

Pada pertemuan ke-36 Dewan Menteri Luar Negeri OKI (PTM ke-36 OKI) yang dilaksanakan di Damaskus, tanggal 23-25 Mei 2009 Menteri Luar Negeri RI menyampaikan pokok-pokok pidato antara lain mengenai perlunya diintensifkan pelaksanaan reformasi OKI, khususnya di bidang demokrasi, *good governance*, dan hak asasi manusia (HAM) termasuk hak-hak wanita. Peran pemerintah Indonesia yang menonjol lainnya dalam OKI adalah dalam rangka memfasilitasi upaya penyelesaian konflik antara Pemerintah Filipina (GRP) dengan *Moro National Liberation Front* (MNLF) dengan mengacu kepada

Final Peace Agreement atau Perjanjian Damai 1996. Indonesia selaku Ketua *Peace Committee for the Southern Philippines* (OKI-PCSP) 2009-2011 berkunjung ke Manila pada tanggal 3-6 November 2009 guna mengadakan serangkaian konsultasi informal dengan para pihak yang terkait dalam proses *Tripartite Meeting* untuk Filipina Selatan.[148]

Pada pertemuan ke-37 Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Konferensi Islam (KTM ke-37 OKI) yang telah dilaksanakan di Dushanbe, Tajikistan, tgl 18-20 Mei 2010, Menteri Luar Negeri RI menekankan kembali mengenai proses reformasi OKI yang tengah berjalan saat ini dan keperluan untuk negara-negara anggota OKI. Disampaikan pula bahwa pemerintah RI mendukung upaya OKI bagi realisasi pembentukan Komisi HAM OKI dan terhadap Statuta Organisasi Pembangunan Perempuan OKI yang telah disahkan. Kedepan, pembentukan kedua badan dimaksud akan semakin memperjelas posisi OKI dalam mempromosikan dan mengembangkan HAM dan isu perempuan di dunia internasional.[149]

Berkenaan dengan isu Islamophobia, pemerintah Indonesia menekankan mengenai perlunya untuk mengajak pihak Barat dalam proses penciptaan proses dialog lintas agama dan kebudayaan yang konstruktif guna memperkecil timbulnya pemahaman yang keliru atas Islam, disamping memperkenalkan Islam sebagai agama yang mengedepankan toleransi dalam menjawab tantangan global saat ini. Di dalam pembahasan resolusi tentang OKI *Strategy Paper on Combating Defamation of Religio*n, pemerintah Indonesia menekankan kembali perlunya untuk menjaga kesatuan sikap dan posisi kelompok OKI terhadap isu-isu yang bersifat prinsipil dan juga menghimbau agar kelompok OKI dapat lebih menunjukkan fleksibilitas melalui *engagement* yang lebih bersifat konstruktif kepada pihak dan kelompok lain.[150]

Usaha-usaha yang dilakukan oleh Indonesia di dalam OKI antara lain adalah agar Indonesia dapat mencapai perannya sebagai *bridgebuilder*, bukan hanya antara negara maju dan negara berkembang, tetapi juga antara negara-negara kelompok Barat yang demokratis dengan negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Indonesia ingin dapat menggapai perannya

---

148 Kementerian Luar Negeri RI: Organisasi Konferensi Islam, http://www.deplu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=MultilateralCooperation&IDP=4&P=Multilateral&l=id diakses pada 29 Juli 2010.

149 Ibid.

150 Ibid.

yang konstruktif bagi masyarakat internasional sebagai *peacemaker* dan *bridge-builder* untuk mendamaikan dan menjembatani hubungan-hubungan antar negara-negara di dunia. Indonesia ingin supaya negara-negara Muslim dapat dipandang sebagai moderat dan tidak disamakan dengan terorisme.

c. Munculnya isu Muslim dan Suara Islam

Aksi terorisme 9/11 telah menumbuhkan rasa trauma yang besar pada masyarakat internasional, sehingga masyarakat internasional menjadi sangat hati-hati terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya kembali aksi-aksi seperti yang telah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, masyarakat dunia akan berusaha untuk meminimalisir dan membatasi kemungkinan-kemungkinan tersebut. Apabila suatu negara dianggap dapat mengancam keamanan dunia, maka masyarakat internasional akan berusaha untuk membatasi kepemilikannya akan sumber-sumber daya penting karena dengan kepemilikan sumber daya penting ini, negara tersebut menjadi memiliki kuasa yang lebih dan menjadi lebih mudah baginya untuk melakukan suatu tindakan karena *power* suatu negara sangat menentukan.

Dengan terjadinya peritiwa 9/11, Islam menjadi sering diidentikkan dengan terorisme dan sebagai sesuatu yang mengancam, sehingga masyarakat internasional menjadi berhati-hati dengan Islam secara keseluruhan. Sebagai contoh, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya *travel warning* yang diberlakukan oleh negara-negara Barat kepada Indonesia.

Oleh karena itu, negara-negara dengan mayoritas penduduk Islam seperti menjadi memiliki suatu kepentingan bersama, yaitu untuk memulihkan citra Islam di dunia. Hal tersebut terlukiskan pada KTT Luar Biasa OKI ke-3 di Mekkah, Arab Saudi pada 7-8 Desember 2005 yang menghasilkan Program Aksi 10 tahun OKI. Di dalamnya tercantum mengenai toleransi, menentang *Islamophobia*, pembasmian ekstrimisme, kekerasan, dan terorisme. Rencana Aksi 10 tahun OKI ini tidak hanya berfokus pada masalah politik tetapi juga ekonomi seperti isu-isu pembangunan dan perdagangan, sosial, ekonomi dan ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat menjawab kesenjangan kesejahteraan umat. Di bidang politik dan intelektual, dalam 10 tahun OKI diharapkan mampu menangani berbagai isu seperti upaya membangun nilai-nilai moderasi dan toleransi; membasmi ekstrimisme, kekerasan dan terorisme; menentang *Islamophobia*; meningkatkan solidaritas dan kerjasama

antar negara anggota, pencegahan konflik, penyelesaian masalah Filipina, hak-hak kelompok minoritas dan komunitas Muslim, dan masalah-masalah yang dialami Afrika.[151]

Sebagai lanjutan dari pertemuan di atas, OKI kemudian mengadakan Pertemuan ke-37 Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Konferensi Islam (KTM ke-37 OKI) yang dilaksanakan di Dushanbe, Tajikistan pada 18-20 Mei 2010. Pertemuan ini mengesahkan apa yang disebut Deklarasi Dushanbe yang membahas dialog antar peradaban dan Islamophibia. Selain itu juga membahas perdamaian di Timur Tengah; Afghanistan; pengutukan agresi Armenia terhadap Azerbaijan; menyambut baik kesepakatan pertukaran bahan bakar nuklir oleh Iran, Turki dan Brazil; terorisme; perlucutan senjata nuklir dan senjata pemusnah massal; pengembangan SDM dan pendidikan; mendorong kelancaran barang, jasa diantara Negara OKI.[152]

Menyangkut masalah *Islamophobia*, OKI memiliki suatu mekanisme khusus untuk menangani isu tersebut, yaitu *Observatory on Islamophobia* dalam OKI Pada KTT Luar Biasa OKI ke-3, para kepala negara anggota menyetujui mendirikan sebuah badan *observatory* di Sekretariat OKI untuk menghadapi *Islamophobia* dengan cara mengawasi segala bentuk *Islamophobia* dan membangun dialog untuk menyampaikan nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Pada Konferensi Menteri-menteri Luar Negeri ke-34 (ICFM) yang diadakan pada bulan Mei 2007, badan *Observatory* ini ditugaskan untuk membuat sebuah laporan tahunan. Sesuai dengan penugasan itu, laporan pertama diterbitkan pada pertemuan Konferensi KTT ke-11 di Dakar, Senegal pada 13-14 Maret 2008.[153]

Pada uraian di atas, di dalam OKI yang menjadi pembahasan bukan hanya isu citra Islam dan politik, melainkan OKI juga membahas isu ekonomi dan perdagangan. KTT Luar Biasa OKI ke-3 membahas ekonomi seperti isu-isu pembangunan dan perdagangan; dan Pertemuan ke-37 Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Konferensi Islam (KTM ke-37 OKI) juga membahas pendorongan kelancaran barang dan jasa diantara Negara OKI. Oleh karena itu, kita dapat melihat bahwa para anggota OKI juga memiliki kepentingan

---

151 Ibid1
52 Ibid.
153 1st OIC Observatory Report on Islamophobia, http://www.theunity.org/en/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=41&Itemid=14, diakses pada 29 Juli 2010.

bersama dengan negara-negara lain di dunia, yaitu kepentingan ekonomi. Semua negara di dunia, tanpa memandang dasar negaranya: agama ataupun sekuler, memiliki kepentingan untuk adanya stabilitas ekonomi agar perekonomian negara masing-masing berjalan dengan lancar dan kebutuhan warganya dapat terpenuhi.

Untuk mewujudkan kepentingan ini, sudah lama OKI memiliki suatu badan khusus, yaitu Standing *Committee for Economic and Comercial Cooperation* (COMCEC) yang dibentuk pada tahun 1981.

> *"Komite kementrian ini dibentuk sesuai dengan resolusi 13/3-P (IS) yang diadopsi dalam Konferensi KTT Islam ke-3 di Mekkah al Mukarammah dan Taif di Arab Saudi pada bulan Januari 1981. Fungsinya adalah untuk mendorong implementasi resolusi dalam bidang ekonomi dan perdagangan, menggali cara-cara memperkuat kerjasama di antara negara-negara anggota dan menyiapkan program dan usulan-usulan yang dapat meningkatkan kemajuan di berbagai bidang."*[154]

Untuk pertama kalinya, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) COMCEC digelar di Istanbul, Turki pada 5-7 November 2009. Sidang ke-25 COMCEC ini digelar dengan melibatkan para pemimpin negara Islam. Untuk itu, sidang COMCEC kali ini mendapat perhatian tersendiri. Para pakar ekonomi pun menganalisa perkembangan tersebut sebagai upaya serius negara-negara Islam guna mengimplementasikan kerjasama ekonomi yang lebih tangguh.[155]

Selain COMCEC, OKI juga memiliki *Islamic Development Bank* (IDB) sebagai sebuah lembaga keuangan internasional. Gagasan bagi lembaga ini muncul pada Koferensi Menteri Luar Negeri Islamik kedua di Karachi di tahun 1970. Konferensi merekomendasikan kajian mendalam dari proyek ini. Deklarasi disampaikan dalam Konferensi Menteri-menteri Keuangan pertama di Jedah pada bulan Desember 1973. Bank Pembangunan Islam akhirnya diresmikan pada tanggal 20 oktober 1975. Tujuannya adalah memperkuat pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial dari negara-negara anggota dan komunitas Muslim baik secara individual maupun secara kelompok sesuai dengan

---

154 http://www.oic-oci.org/page_detail.asp?p_id=172, diakses pada 29 Juli 2010.

155 http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=16827:comcec-harapan-ekonomi-dunia-islam&catid=59:perspektif&Itemid=101, diakses pada 29 Juli 2010.

prinsip-prinsip Shariah.

Dinyatakan juga bahwa Bank berfungsi untuk:

> *"menyiapkan partisipasi ekuitas dan pinjaman grant bagi proyek-proyek dan perusahaan yang produktif. Ini juga memberikan bantuan finansial kepada negara-negara anggota dalam bentuk-bentuk lainnya bagi pembangunan ekonomi dan social dan untuk memperkuat perdagaganan di antara negara-negara anggota."*[156]

d. Relevansi peran Indonesia sebagai representasi negara-negara Muslim dalam G-20

Sebagaimana telah didiskusikan dalam Bab 1 dan 2, pemimpin-pemimpin Indonesia melihat G-20 bukan saja sekedar rumah ekonomi tetapi juga rumah peradaban. Indonesia mempersepsikan dirinya sebagai jembatan dari peradaban yang berbeda-beda. Namun demikian terdapat pernyataan seberap relevan sebetulnya persepsi tersebut menggambarkan realitas proses G-20. Tidak ada keraguan bahwa G-20 adalah suatu bentuk kerjasama ekonomi. Pemimpin-pemimpin G-20 secara berulang-ulang mendeklarasikan posisi ini. Sejak dibentuk tahun 1999, G-20 telah memfokuskan dirinya pada agenda ekonomi dan membuat komitmen-komitmen ekonomi. Sejak KTT Pittsburgh pemimpin-pemimpin G-20 mulai untuk membicarakan isu-isu relevan yang lain, tetapi menekankan juga bahwa isu-isu tersebut penting untuk mendorong pertumbuhan yang kuatm bekelanjutan dan seimbang.

Dalam proses deliberasi, tidak ada pemisahan antara Barat dan peradaban lain. Diskusi dalma G-20 tidak membicarakan ideologi khusus atau agama tertentu, tetapi isu-isu umum yang menjadi kepentingan komunitas internasional apakah mereka sekuler atau religius. Apa yang nyata dari dua KTT pertama adalah perbedaan mencolok di antara negara maju tentang pendekatan yang tepat untuk menangani dampak krisis finansial dalam perekonomian nasional mereka: apakah akan memakai regulasi dalam pasar finansial atau memperkenalkan stimulus fiskal untuk menghidupkan perekonomian nasional mereka. Dalam KTT Seoul, perbedaan yang mencolok

156 http://www.oic-oci.org/page_detail.asp?p_id=65#idb, diakses pada 29 Juli 2010.

antara negara-negara maju yang dipimpin Amerika Serikat dan negara-negara *emerging economy,* khususnya China terkait dengan nilai tukar mata uang dan stabilisasi moneter. Sekalipun muncul perdebatan besar, pemimpin-pemimpin membuat komitmen dan setuju bahwa setiap anggota G-20 dapat mengadopsi cara-cara yang cocok untuk memenuhi komitmen mereka.

Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pembelahan terjadi antara peradaban-peradaban yang berbeda: Barat versus Konfusianisme ataupun Barat versus Islam. Negara-negara Islam tidak berupaya keras untuk mempromosikan sistem finansial Islam sebagai komplemen sistem konvensional yang ada meskipun mereka telah mengembangkan sistem finansial khusus dalam kerangka Organisasi Konferensi Islam. Tidak ada juga diskusi yang menunjukkan kepedulian OKI pada upaya oleh negara-negara sekuler untuk memaksakan sistem finansial konvensional dan bahwa sistem konvensional tidak dipengaruhi oleh sistem perbankan Islam yang telah diadopsi negara-negara Muslim.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, pemimpin-pemimpin OKI telah membentuk suatu mekanisme untuk menangani isu-isu ekonomi dalam orngaisasi yang disebut Komite bagi kerjasama ekonomi dan komersial (COMCEC). Mekanisme ini, mirip dengan G-20 beroperasi pada tingkat pemimpin. Kerjasama ini dibangun pada tahun 1981 jauh sebelum G-20 memulai KTT mereka.

Mengenai G-20 dan kaitannya dengan citra Islam, tidak terdapat suatu hubungan yang signifikan di antara keduanya. Dalam perkembangannya, mungkin saja G-20 dapat membahas terorisme, tetapi isu ini lebih menyangkut isu keamanan dan stabilitas ekonomi daripada isu Muslim, di mana stabilitas ekonomi diperlukan oleh seluruh masyarakat internasional, bukan hanya negara-negara Muslim. Apabila terorisme berhasil diberantas dan stabilitas ekonomi maupun keamanan tercipta, maka dengan sendirinya citra negatif terhadap Islam akan berubah menjadi positif.

Argumentasi ini pun didukung oleh responden dari berbagai kalangan, bahkan tidak ada responden yang menjawab bahwa terdapat suatu relevansi untuk Indonesia menrepresentasikan aspirasi negara-negara Muslim. Salah satu responden penelitian berargumen bahwa:

> ”Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim terbesar dalam G-20, namun isu mewakili negara-negara Muslim tidaklah mendesak. Ini

> tidaklah mendesak untuk mewakili agama tertentu. Terorisme sebagai contoh dapat didiskusikan dalam G-20, terutama karena efeknya pada aspek ekonomi dank arena ini akan membawa pengaruh global pada kerjasama internasional."[157]

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Ketua Sherpa G-20 Indonesia, Mahendra Siregar. Dia menyatakan bahwa G-20 tidak memiliki hubungan dengan ideologi tertentu.

> "Dalam arti global, saya tidak melihat ada perbedaan antara negara Muslim dengan non-Muslim. Sebagai contoh, mengenai pencapaian MDGs pada tahun 2015 yang kelihatannya akan berat memenuhi target tempo hari. Saya rasa, Muslim atau tidaknya suatu negara tidak akan mempengaruhi tantangan yang dihadapi negara tersebut. Persoalannya tidak ada yang terkait ideologi." [158]

Pertanyaan yang perlu dijawab adalah bagaimana memuat peran yang dipersepsikan penting oleh Indonesia menjadi relevan dengan negara-negara Muslim lain di dalam G-20? Seorang perwakilan asing dari negara yang merupakan negara dimana Islam menjadi agama mayoritas menjawab hal senada:

> *"Kita harus ingat bahwa G-20 bukan hanya soal perwakilan. Ini adalah tentang siapa negara-negara yang berpengaruh dalam bidang ekonomi, atau di dalam parameter ekonomi. Sehingga ini bukan sebuah kelompok yang dapat mewakili bidang ataupun sebuah wilayah. Setiap negara hanya bisa mewakili dirinya sendiri. Indonesia menjadi bagian dari G-20 karena kapasistasnya sebagai suatu emerging economy. Sehingga tidak ada yang mewakili negara lain karena forum ini murni tentang ekonomi, bukan agama atau ideologi. Ya, sebagian besar negara-negara Asia dan Afrika adalah negara-negara berkembang menghadapi isu dan tantangan yang mirip, seperti kemiskinan, pendidikan dan perumahan. Hanya pada poin ini Indonesia dapat berbicara mengatas namakan negara-negara Muslim*

157 Wawancara dengan peneliti tanggal 19 Mei 2011.
158 Wawancara dengan Ketua Sherpa G-20 Indonesia pada tanggal 2 Juni 2010.

karena mereka menghadapi permasalahan yang sama."[159]

Persepsi tentang payung peradaban tidak sesederhana karena G-20 semata-mata merangkul baik negara maju dan berkembang yang berasal dari peradaban yang berbeda. Dari sisi penduduk yang besar, Indoensia dikategorikan sebagai negara Muslim. Indonesia berupaya untuk membutkikan kesiapannya menerima, dan membangun sistem konvensional yang sekuler dengan berargumentasi bahwa hanya negara Muslim yang toleran dan akomodatiflah yang dapat melakukannya. Ini tentu saja peran simbolik. Terdapat banyak forum internasional di mana baik negara sekuler dan negara Muslim menjadi anggotanya. PBB, dalam hal ini, adalah organisasi universal yang tidak mempermasalahkan asal muasal peradaban negara-negara anggotanya.

e. Agenda untuk mengkontekstualisasi keterwakilan dunia Muslim

Penelitian ini menemukan bahwa tidak terdapat suatu relevansi antara G-20 dan dunia Muslim atau suatu urgensi bagi Indonesia untuk mewakili suara Islam dalam G-20. Persepsi diri atas peran sebagai jembatan peradaban hanyalah bersifat simbolik daripada praktikal. Ini adalah cara Indonesia untuk membangun citra positif di mata komunitas internasional dan untuk sekaligus menunjukkan suatu 'fashion' dalam dunia global dalam konteks krisis: negara Muslim memiliki kemauan politik untuk bekerjasama dengan Barat. Dalam hal ini, OKI merupakan forum yang lebih tepat dimana Indonesia dapat mendorong negara-negara Muslim yang lain untuk mengartiklasikan suara Islam dalam dunia yang sekluer, sementara Indonesia dan negara-negara Muslim lain dapat mengembangkan suatu sistem ekonomi yang komplementer.

Namun, sebuah rekomendasi dapat diajukan disini. Partisipasi Indonesia, Arab Saudi dan Turki dapat diapresiasi jika negara-negara ini dapat menjadi anggota aktif dan konstruktif dalam proses G-20 secara keseluruhan. Partisipasi Indonesia dapat diapresiasi lagi bila dapat membawa ide baru untuk memperkuat arsitektur finansial global. Sistem yang kovensional ini

---

159 Wawancara dengan perwakilan dari Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia pada tanggal 10 Juni 2010.

sedang direformasi karena rentan terhadap goncangan finansial dan tidak cukup tahan terhadap krisis.

G-20 telah dibentuk untuk bersama-sama memperkuat sistem finansial dan perbankan yang telah diadopsi oleh negara-negara sekuler selama berpuluh-puluh tahun. Sistem konvensional saat ini telah berfungsi sesuai dengan prinsip pasar yang meminimalisir intervensi negara. Pemimpin-pemimpin G-20 mengakui bahwa sistem konvensional ini tidak dapat menjamin pertumbuhan ekonomi yang kuat. Krisis di Amerika Serikat dan kemudian Yunani menunjukan kerentantan sistem konvensional tersebut.

Negara-negara Muslim yang menjadi anggota G-20 memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam penguatan sistem konvensional dan pada saat yang sama memiliki kesempatan untuk mengembangkan mekanisme komplementer seperti sistem keuangan dan perbankan Islamik. Terdapat perbedaan di antara dua sistem tersebut, meskipul keduanya memiliki kesamaan dalam prinsip-prinsip fundamental.[160] Kedua sistem tersebut mengadopsi manajemen resko yang akurat dan tata kelola korporasi yang kuat untuk menjamin keamanan sistem perbankan internasional. Dalam hal ini, lembaga stabilitas finansial Islamik dapat memberi kontribusi lebih lanjut dalam forumalsi infrastruktur pasar finansial yang kuat yang dapat menahan dampak krisis finansial. Karenanya, Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya dapat membuktikan kontribusi merka dalam mengamankan keuangan domestik. Jika berhasil, ini akan menjadi acuan awal bagi pengembangan inisiatif lebih lanjut dalam forum G-20.

Kajian mendalam menyangkut sistem finansial Islam dan perbankan Syariah perlu dikaji feasibilitasnya untuk menjadi kompemen dari sistem yang konvensional. Anggota-anggota OKI harus pertama-tama membuktikan efektivitas sistem tersebut sebelum Indonesia dan negara-negara Muslim yang lain dapat membawa sistem tersebut dalam agenda G-20. Dengan inisiatif ini persepsi diri atas peran Indonesia sebagai pembangun jembatan peradaban tidak hanya memiliki makna simbolik tetapi lebih subtantif.

---

160 "The growing importance of Islamic finance in the global financial system", pidato Malcolm D Knight, General Manager, Bank for International Settlement, yang disampaikan dalam the 2nd Islamic Financial Services Board Forum, Frankfurt, 6 Desember 2007, http://www.bis.org/speeches/sp071210.htm. diakses tanggal 26 Juli 2010.

V.
PERAN MASYARAKAT SIPIL DALAM G-20

Telah ditegaskan di bagian pertama bahwa G-20 merupakan forum *intergovernmental* yang beranggotakan perwakilan-perwakilan pemerintah. Peran utama negara dalam forum ini memapankan struktur dominasi negara dalam pembentukan arsitektur finansial global. Struktur bentukan negara seperti ini tentu saja timpang karena mengabaikan masyarakat dan perannya dalam pembentukan arsitektur tersebut.

Hakikat *intergovernmental* ini seolah membatasi peran LSM dalam forum G-20. Pengabaian peran LSM menjadikan Forum G-20 dan produk-produk yang dibuatnya sebagai lembaga kurang menyentuh pada apa yang sesungguhnya dirasakan dan dibutuhkan oleh masyarakat akar rumput. G-20 sebagaimana telah dipaparkan di bagian pertama dalam laporan ini telah dikritik karena kegagalannya untuk mengatasi dampak sosial krisis finansial, karena lebih fokus pada penanganan krisis melalui kebijakan stimulus. Di sisi inilah, LSM seharusnya bisa mengisi gap yang ditinggalkan atau diabaikan oleh lembaga-lembaga *intergovernmental*.

Namun argumentasi pro bagi partisipasi LSM tidak serta merta tanpa memunculkan persoalan. LSM yang ada telah terfragmentasi pada ego sektoral masing-masing aktivisnya. Sulit menemukan suatu perwakilan LSM yang benar-benar memiliki legitimasi yang cukup untuk memberi kontribusi yang dapat mewakili masyarakat yang menjadi korban dari krisis finansial.

Bab ini akan mendeskripsikan peran potensial LSM dari sudut konseptual, pandangan sejarah dan perkembangannya. Bagaimana lembaga-lembaga masyarakat sipil (LSM, media massa, dan akademisi) kemudian dapat memainkan perannya sebagai pilar ketiga dalam G-20.

a. Peran potensial LSM dalam perspektif konseptual

Kajian literatur menunjukkan bahwa peran organisasi masyarakat sipil memang patut untuk diperhitungkan dalam struktur internasional yang selama ini dibentuk oleh peran negara. Masyarakat sipil atau masyarakat sipil berasal dari bahasa Latin *'civilas societas'.* Istilah masyarakat sipil mulai digunakan oleh Adam Ferguson (1723-1816) dalam karyanya yang berjudul *An Essay on History of Civil Society* (1767). Gagasan masyarakat sipil Ferguson ditujukan untuk membongkar konsep masyarakat model Marxisme yang mengedepankan kepentingan individual dan pemenuhan hak-hak individu secara bebas. Masyarakat sipil merupakan bagian dari masyarakat yang menentang struktur politik (yang monarkis, feodal atau borjuis serta membatasi diri dari lingkaran negara.[161]

Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat sipil berkembang dalam berbagai konsep. Alejandro Colas mengartikan masyarakat sipil sebagai ruang pribadi antara individu-individu, ruang social yang pelan-pelan berubah dari dunia afektif keluarga dan domain formal negara (atau ruang social antara keluarga dan negara.[162] Antonio Gramsci dengan konsep 'Gramscian'nya mengatakan bahwa masyarakat sipil adalah situs pembangunan yang kontra-hegemoni. Bagi Antonio Gramsci, masyarakat sipil berperan sebagai instrumen tindakan kolektif untuk melindungi otonomi negara non-wilayah publik serta memengaruhi tipe rezim, politik, hingga kebijakan negara dan pasar. Konsepsi ini berarti gerakan masyarakat sipil global dalam sebuah pertemuan puncak ekonomi tidak dapat dipandang sebagai sebuah putusan yang netral:

> "…masyarakat sipil *memiliki peran kunci dalam membangun ideologi hegemonik dan untuk membangun kesadaran manusia. Karenanya, pilihan gerakan dari masyarakat global yang diijinkan untuk mengemukakan pandangannya dalam KTT-KTT ekonomi tidak diyakini sebagai keputusan yang netral. In bisa menjadi cara untuk memajukan ideologi yang sudah ada dalam tatanan dunia."*[163]

---

161 Adam B. Seligman (1992). The Idea of Civil Society. New Jersey: Princeton University Press, hal. 46-55.

162 Alejandro Colas (2002). International Civil Society. Social Movements in World Politics. Cambridge: Polity, hal. 38.

163 The G-20 and the B20: "Reconsidering Global Civil Society" menurut pandangan Gramscian. http://www.economicsummits.info/2010/06/G-20-b20-global-civil-society-gramscian/.

Muthiah Alagappa (2004) menekankan peran LSM dan mengidentifikasi empat kategori LSM: (1) sebagai perantara antara negara, masyarakat politik, dan pasar; (2) sebagai wi-layah khusus pembentuk wacana dan konstruksi cita-cita normatif guna mene-kan kelompok-kelompok negara lain untuk meng-adopsi norma-norma atau cita-cita tertentu; (3) sebagai arena otonomi 'pemerintahan sendiri' oleh aktor non negara; (4) Instrumen aksi bersama untuk melindungi otonomi aktor non negara:[164]

Pengkaji lain menyoroti bahwa masyarakat sipil menjadi sektor ketiga yang tujuannya adalah meningkatkan kepedulian sosial; tempatnya adalah di sektor publik di luar pemerintah dan pasar yang mengedepankan kepedulian sosial. Sektor pertama adalah sektor negara atau pemerintah yang berkewajiban menjamin pelayanan dan menyediakan kebutuhan sosial dasar bagi warganya. Sektor kedua adakah sektor swasta yang terdiri dari kalangan bisnis dan industrial yang bertujuan mencari penghidupan dan menciptakan kekayaan.[165]

Gambar 5. Hubungan Negara Pasar dan Masyarakat[166]

V.A. Hodgkinson dan R.D. Sumariwalla (1992) mencatat bahwa LSM sebagai masyarakat sipil, berfungsi sebagai pembela kaum miskin yang terabaikan. LSM juga melakukan advokasi untuk perubahan sosial.[167] Mereka menyediakan layanan sosial dan di beberapa negara sebagai kendaraan utama

---

164 Muthiah Alagappa (2004). Civil Society and Political Change in Asia: Expanding and Contracting Democratic Space. Stanford: Stanford University Press.

165 Bob Sugeng Hadiwinata. The Politics of NGOs in Indonesia: Developing Democracy and Managing a Movement. 2003. New York: Routledge Curzon, hal. 2.

166 Ibid.

167 V.A. Hudkinson dan RD. Sumariwalla. (1992). The Nonprofit Sector and the New Global Community. Issues and Challenges.

bagi penyediaan kesejahteraan sosial. Mereka memberikan inovasi, fleksibel, dan dapat memberikan pelayanan yang lebih personal kepada kelompok tertentu atau dalam situasi lokal.

Namun LSM tidak selalu menggambarkan suatu entitas yang tunggal yang bersuara dalam satu nada. Beberapa LSM berorientasi pada sistem nilai dan menjadi asosiasi moral. LSM dapat membantu membentuk lembaga-lembaga kemasyarakat sebagai tempat dimana warga negara dapat mengkaji, bermain dan berdoa bersama dan menjadi masyarakat sipil yang kuat. Dalam kaitan ini terdapat dua tipe LSM: LSM yang bersifat "pembangunan" *(development NGOs)* dan LSM yang bersifat "gerakan" *(movement NGOs).*[168] Pembagian ini didasarkan pada orientasinya yaitu dalam hal peran, falsafah organisasi, misi dan tujuan, bidang kegiatan, pandangan atas kemiskinan, hubungannya dengan kelompok sasaran, dan hubungannya dengan pemerintah. Tabel 6 menunjukkan perbedaan antara LSM pembangunan dan LSM gerakan. Dengan hakikat ini, masyarakat sipil memiliki gaya yang sangat beraneka ragam dalam memandang suatu masalah dan menuangkan aspirasinya. LSM Pembangunan terkesan lebih *'soft'* terhadap pemerintah sementara LSM Gerakan terkesan sebagai sebuah kekuatan yang berhadapan dengan negara. Terlebih kedudukan masyarakat sipil di negara berkembang umumnya masih sangat lemah.

Tabel 6. Perbandingan LSM Pembangunan dan LSM Gerakan[169]

Orientasi	LSM Pembangunan	LSM Gerakan
Peran	Institusi pembangunan	Organisasi pergerakan sosial
Falsafah organisasi	Formal, professional	Informal, fleksibel
Misi dan tujuan	Peningkatan produktivitas	Pemderdayaan
Bidang kegiatan	Kesehatan, pertanian, mikro-kredit, industri skala kecil, dsb.	Advokasi (pendampingan), litigasi, kampanye, protes, demonstrasi, dsb,
Pandangan terhadap kemiskinan	Kemiskinan terjadi akibat malnutrisi, minimnya sumber daya (modal dan kemampuan)	Kemiskinan terjadi akibat ketidakadilan, eksploitasi, dan manipulasi
Hubungan dengan kelompok sasaran	Tidak seimbang: LSM mengambil inisiatif penuh	Relatif seimbang: LSM membangun kesadaran
Hubungan dgn pemerintah	Kemitraan, kerjasama selektif	Kritis, konfrontasi, oposisi

168 Bob Sugeng Hadiwinata (2003). *Op.Cit.*
169 Ibid.

Dalam perkembangan terkini, LSM banyak diakui sebagai aktor dalam hubungan internasional. Argumen pertama, LSM kini menyoroti aneka "masalah-masalah keamanan non-tradisional". Seperti layaknya negara, LSM sebagai aktor yang sah dalam Hubungan Internasional diyakini mampu menangani semua isu mulai dari isu lingkungan, migrasi tenaga kerja, perdagangan senjata ilegal, kemiskinan, wabah penyakit, hingga perkembangan ekonomi terkini. Argumen lain untuk mengesahkan peran LSM sebagai aktor hubungan internasional adalah keyakinan bahwa LSM muncul untuk mengubah sistem internasional dengan meningkatkan kesadaran masyarakat serta menanamkan moral dan nilai-nilai global. Pada akhirnya, LSM muncul sebagai "gerakan sosial baru" di mana negara akan diambil oleh masyarakat sipil global.

Peran LSM sebagai aktor internasional dimulai dari asumsi dasar bahwa negara yang seharusnya menjadi penjamin utama berbagai hak warga (keamanan, kepemilikan, akses menuju kesejahteraan, kebebasan berekspresi, berorganisasi, berpolitik, dsb) pada saat yang bersamaan ternyata menjadi 'penghancur' hak-hak ini. Saat negara menghancurkan atau menolak hak-hak ini, kelompok lokal dan individu akan mencari jaringan untuk menyuarakan keprihatinan mereka.

b. LSM sebagai sektor ketiga dalam G-20: Potensial tetapi terfragmentasi

Masyarakat sipil telah memberikan perhatian serius pada proses G-20 yang jelas menunjukkan dominasi peran negara dalam menetapkan fungsi pasar dalam arsitektur finansial global. Berbagai organisasi seperti *Global Campaign for Education, Save the Children, Oxfam*, WWF, *Actionaid, World Vision, Greenpeace*, dan ITUC mengambil peran terkemuka dalam mengamati proses G-20. Alasan utama keterlibatan mereka adalah bahwa isu yang diangkat dalam G-20 adalah isu global yakni krisis ekonomi global. Karena forum ini berada pada tingkat 'elit' atau aktor negara, keputusan dari forum ini akan memengaruhi tatanan ekonomi global dan akhirnya berimbas pada seluruh penduduk dunia. Itu sebabnya aneka LSM ini aktif menyuarakan aneka pembenahan dan kritik terkait proses dan hasil keputusan G-20. Media dan kaum akademisi sebagai bagian dari masyarakat sipil pun turut menyuarakan aspirasinya terhadap format, isu yang diangkat, dan hasil kesepakatan G-20.

Kedua tipologi LSM yakni LSM Pembangunan seperti WWF dan LSM Gerakan seperti *Global Campaign for Education*, *Save the Children*, dan *Greenpeace* sama-sama mengambil bagian dalam menyikapi G-20. Dalam hal ini, LSM Gerakan yang menggunakan metoda kegiatan berupa advokasi (pendampingan), litigasi, kampanye, protes, demonstrasi, dan sejenisnya nampak lebih dominan dalam pemberitaan media massa daripada LSM Pembangunan.

Penelitian ini menemukan bahwa suara LSM Gerakan dalam G-20 terbagi menjadi dua bagian besar. Pertama adalah LSM Gerakan yang masih berharap G-20 dapat menyuarakan kepentingan rakyat dan perimbangan negara maju-negara berkembang. Mereka menitikberatkan poin-poin keberatan khusus agar G-20 dapat memperbaiki diri. LSM Gerakan jenis kedua adalah LSM Gerakan yang memandang G-20 sebagai antek-antek kapitalisme.

LSM Gerakan jenis pertama misalnya *Global Campaign for Education* yang menyuarakan agar G-20 dapat menitikberatkan sektor pendidikan sebagai rencana jangka panjang berkelanjutan bagi upaya pembangunan. *Save the Children* pun menyuarakan agar G-20 memperluas dampak mereka sebagai sebuah forum dengan mendukung program-program Tujuan Pembangunan Milenium khususnya poin mengenai angka kematian ibu dan anak.[170]

LSM Gerakan yang lain mentah-mentah menolak legitimasi G-20 sebagai forum global ditunjukkan oleh Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme-Imperialisme (GERAK LAWAN) dari Indonesia yang merupakan gabungan LSM seperti Serikat Petani Indonesia, Serikat Buruh Indonesia, Koalisi Anti Utang, Institute for Global Justice, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan Sarekat Hijau Indonesia. Mereka menyatakan bahwa G-20 tidak memiliki legitimasi sebagai forum pengambilan keputusan untuk rakyat di seluruh dunia [171]

LSM yang merespon G-20 adalah mereka yang secara khusus peduli pada peningkatan produktivitas *(micro-enterprise development)*, pengarusutamaan

---

170 NGO Response to the G-20 summit. The Sherpa The Summits. http://www.sherpatimes.com/G-8/185-ngo-responses-to-the-G-20-summit.html. . Diakses tanggal 29 Juli 2010.

171 Masyarakat Sipil Indonesia Mengutuk Pertemuan G-20 di London. http://www.satudunia.net/?q=content/masyarakat-sipil-indonesia-mengutuk-pertemuan-g-20-di-london. diakses tanggal 29 Juli 2010.

(mainstreaming), dan pendampingan *(advocacy)*. Peran peningkatan produktivitas dan pendampingan lebih banyak dilakukan oleh LSM Pembangunan yang pemberitaannya dalam media cenderung tidak terlalu bergaung. Peran pengarusutamaan yang bertujuan membawa isu spesifik atau isu lokal menjadi isu internasional adalah peran LSM yang paling mengemuka dalam G-20. LSM Gerakan seperti GERAK LAWAN mempertanyakan legitimasi G-20 sementara LSM lainnya bergerak dalam pengarusutamaan pada arena masing-masing mulai dari seruan agar G-20 dapat menciptakan tatanan lembaga keuangan dunia yang lebih adil, penghapusan utang, hingga seruan-seruan khusus seperti peningkatan perhatian di bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Contoh lain dari peran pengarusutamaan yang dilakukan LSM adalah dengan menyoroti alokasi keuangan dan pengeluaran *(tracking budget allocations, transfer and expenditure)*.[172]

Dalam hal ini, GERAK LAWAN menuntut pemerintah khususnya presiden SBY agar G-20 tidak menjadi ajang penciptaan utang baru yang merugikan rakyat dan menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya. Tuntutan ini dilancarkan mengingat hutang Indonesia saat ini sudah terlampau besar dan menjadi beban ekonomi nasional dan perekonomian rakyat.[173]

Senada dengan GERAK LAWAN, INFID juga mengritik keras aksi pemerintah Indonesia yang dalam pertemuan tingkat menteri G-20 di Sao Paolo, Brazil, malah mendorong peningkatan kapasitas pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan internasional terutama dari Bank Dunia, IMF dan bank pembangunan lainnya dalam mengatasi krisis ekonomi. Padahal, beban utang swasta Indonesia yang jatuh tempo tahun 2009 mencapai RP 209,6 triliun (USD 22.6 milliar). Saat yang bersamaan, hutang pemerintah yang jatuh tempo mencapai kurang lebih RP 112,19 triliun.[174]

Peran pengarusutamaan yang lebih *'soft'* dilakukan untuk 'menggiring' agenda G-20 sejalan dengan agenda LSM-LSM ini dengan harapan G-20 tidak eksklusif tapi juga dapat mewakili kepentingan negara maju dan berkembang

---

172 Siddharta Mira. Civil Society's Role in G-20, CUTS International.

173 Masyarakat Sipil Indonesia Mengutuk Pertemuan G-20 di London. http://www.satudunia.net/?q=content/masyarakat-sipil-indonesia-mengutuk-pertemuan-g-20-di-london. diakses tanggal 29 Juli 2010.

174 Pernyataan INFID terhadap G-20. http://melampauipemilu.com/statement-infid-terhadap-pertemuan-G-20/. diakses tanggal 26 Juli 2010.

secara berimbang sekaligus mewakili seluruh kelas masyarakat dunia. *Global Campaign for Education* menggiring perhatian G-20 pada agenda pendidikan, *Save the Children* pada agenda ibu dan anak, *World Vision* pada agenda pembatalan hutang luar negeri Haiti, *Oxfam* pada agenda kemiskinan serta WWF dan *Greenpeace* pada agenda lingkungan hidup.[175]

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, LSM terbukti tidak merupakan entitas yang tunggal dalam merespon proses G-20. Mereka terbelah dalam tiga kateori. Kelompok pertama adalah mereka yang secara ekstrim terang-terangan bersikap anti globalisasi. Kelompok inilah yang umumnya melakukan vandalisme dan pembakaran dalam setiap pertemuan G-20. Kelompok kedua adalah kelompok yang skeptis terhadap G-20 namun tidak merusak. Kelompok ketiga adalah kelompok yang memandang G-20 jauh dari realitas. Kelompok terakhir adalah kelompok pragmatis yang memandang G-20 forum yang tidak sempurna, namun dapat membentuu masyarakat global jika LSM dapat membawa aspirasinya secara konstruktif.[176]

c. LSM global: menyuarakan beragam isu dalam forum ekslusif

Agenda yang diusung oleh masyarakat sipil di arena G-20 sangat beragam. Isu spesifik yang menjadi titik penekanan tiap LSM pun amat bervariasi, tidak terbatas pada isu ekonomi sebagai isu utama yang diangkat dalam forum G-20. Ragam isu yang diangkat masyarakat sipil *ini* sejalan dengan ragam isu yang dibahas dalam G-20 yang tidak hanya sebatas persoalan finansial, melainkan meluas pada isu-isu non-finansial seperti isu demografi (2004-2006), energy ramah lingkungan (2007-2008), keamanan energy dan perubahan iklim, ketahanan pangan, pasar energy dan isu-isu perburuhan (2009). Isu-isu non-keuangan ini disadari akan berdampak pada isu-isu keuangan, seperti masalah fiskal, moneter dan lain-lain.[177] Namun demikian, terbukti bahwa

---

175 NGO Responses to the G-20 Summit, http://www.sherpatimes.com/G-8/185-ngo-responses-to-the-G-20-summit.html. diakses tanggal 29 Juli 2010.

176 Wawancara dengan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) pada tanggal 12 Agustus 2010. KSBSI merupakan perwakilan Indonesia untuk ITUC (The International Trade Union Confederation) dalam pertemuan G-20.

LSM terbelah dalam hal memprioritaskan agenda yang semestinya menjadi perhatian pemimpin-pemimpin G-20.

Beberapa LSM terkemuka menekankan pentingnya agenda pembangunan. Namun mereka tidak mensharingkan pendekatan yang tunggal tentang bagaimana seharusnya mempromosikan agenda tersebut. *The Global Campaign for Education* menyatakan kekecewaannya terhadap G-20 yang dipandang tidak membawa kemajuan dalam hal *finansial transaction tax* untuk menutupi kelemahan dari G-8. Lebih lanjut, T*he Global Campaign for Education* menyerukan G-20 agar dapat menitikberatkan sektor pendidikan sebagai rencana jangka panjang berkelanjutan bagi upaya pembangunan. *Save the Children* menyerukan G-20 untuk mendukung program-program Tujuan Pembangunan Milenium dan mendesak G-20 kembali ke Rencana Aksi bersama PBB tentang kesehatan ibu dan anak. *Save the Children* turut menggarisbawahi peran penting negara donor baru seperti Korsel dan Arab Saudi.[178]

Oxfam mengatakan bahwa G-20 tidak berbuat apapun untuk mengentaskan kemiskinan. *Oxfam* menilai G-20 kehilangan kesempatan emasnya untuk menangkal kemiskinan karena hanya berbicara soal bagaimana bank dapat menanggulangi biaya tinggi akibat krisis. Menurut Oxfam, G-20 harus menempatkan sektor keuangan untuk mengatasi kemiskinan yang melanda hampr 64 juta orang akibat terjadinya krisis. *Oxfam* menuntut G-20 lebih aktif lagi dalam pembahasan isu pengentasan kemiskinan ini.[179]

Make Poverty History mengatakan bahwa kesepakatan G-20 mengenai penanganan defisit anggaran dengan memotong sektor layanan publik hanya akan menambah angka kemiskinan. Meski demikian, pembentukkan *Working Group on Development* diapresiasi sebagai langkah yang lebih baik daripada G-8 dalam mengarasi krisis kemiskinan.

The Global Call to Action Against Poverty (GCAP) menilai KTT G-20 gagal menunjukkan kemauan politik dalam melawan kemiskinan dengan menunda

---

177 G-20 Dan Pemberdayaan Posisi Indonesia dalam Setting the Agenda pada the New Global. http://tabloiddiplomasi.com/index.php/current-issue/80-news/762-g-20-dan-pemberdayaan-posisi-indonesia-dalam-setting-the-agenda-pada-the-new-global-.html. diakses tanggal 29 Juli 2010.

178 NGO Responses to the G-20 Summit, http://www.sherpatimes.com/G-8/185-ngo-responses-to-the-G-20-summit.html. diakses tanggal 29 Juli 2010.

179 Ibid.

aksi-aksi seperti *Robin Hood Tax* serta menolak penghentian subsidi bahan bakar fosil dan investasi dalam bidang *clean energy*. *The Global Call to Action Against Poverty* menyerukan dimasukkannya Afrika sebagai anggota tetap. Mereka menyambut baik pembentukkan *Working Group on Development* dan kesepakatan penghapusan hutang Haiti namun G-20 dituntut melakukan hal serupa pada negara terpuruk lainnya.[180]

Actionaid UK menyatakan para pemimpin G-20 miskin ide dan kemauan untuk berkompromi. Mereka mengatakan bahwa G-20 akan segera terlupakan. *Actionaid UK* menyimpulkan bahwa G-20 tidak menawarkan solusi matang untuk mengatasi ekonomi yang masih rentan sehingga aksi G-20 hanya akan memperparah keadaan penduduk miskin. Sebaliknya *World Vision* menyambut baik gugus tugas G-20 yang membahas masalah pembangunan sambil menuntut pencabutan hutang Haiti.[181]

The ONE Campaign mengatakan bahwa dua gugus tugas yang tercipta dari KTT G-20 di Toronto yakni Kelompok Kerja Pembangunan dan Kelompok Kerja Anti Korupsi harus berfokus pada peningkatan layanan pemerintah dan akuntabilitas publik. *The ONE Campaign* juga memperingatkan G-20 untuk mengakomodasi negara-negara terpuruk seperti Afrika dengan menjalin kemitraan.[182]

The International Trade Union Confederation (ITUC) mengatakan bahwa G-20 gagal menciptakan lapangan kerja baru sebagai prioritas.[183] ITUC menyambut positif dukungan pemerintah Jerman yang telah memberikan referensi dalam pertemuan Menteri Perburuhan negara-negara G-20 di Washington sekaligus menyerukan G-20 untuk menulis rekomendasi pada ILO terkait masalah ketenagakerjaan dan perlindungan sosial. ITUC mengritik pilihan G-20 yang pasif terhadap kelompok usaha B20 dalam KTT G-20. Poin-poin penting yang disampaikan ITUC dalam setiap pertemuan G-20[184] antara lain adalah tuntutan agar G-20 lebih berfokus pada masalah ketenagakerjaan karena indikator pemulihan internasional adalah pulihnya ketenagakerjaan berupa penciptaan dan perbaikan lapangan kerja, perbaikan jaminan keamanan

180 Ibid.
181 NGO Responses to the G-20 Summit, http://www.sherpatimes.com/G-8/185-ngo-responses-to-the-G-20-summit.html. diakses tanggal 29 Juli 2010.
182 Ibid.
183 Wawancara dengan presiden KSBSI pada 12 Agustus 2010 pk 10.00.
184 Ibid.

sosial, pengurangan kemiskinan. Ini ditegakan karena menyadari bahwa bisa saja terjadi perbaikan ekonomi tetapi tidak terjadi perbaikan di bidang ketenagakerjaan.

Karenanya sukses atau gagalnya pemulihan ekonomi harus diukur dengan indikator perbaikan dalam ketenagakerjaan, baik penciptaan lapangan kerja maupun terciptanya lapangan kerja yang layak. ITUC juga mendukung konsep *international tax* untuk perdagangan saham dan valuta asing guna mencegah terjadinya aksi spekulasi. Usul ini didukung oleh Indonesia dan Jerman.[185] ITUC juga berbicara mengenai isu perubahan iklim khususnya konsep adaptasi dan mitigasi. ITUC pun telah meminta pemerintah negara-negara G-20 agar pertemuan dengan ITUC lebih diformalkan setelah sebelumnya hanya bersifat lobi non-formal *(legal forum)* seperti yang sudah terjadi dalam Forum OECD.[186]

Beberapa LSM menyoroti pentingnya isu lingkungan hidup dan karenanya mendorong pemimpin-pemimpin G-20 untuk focus pada agenda pembangunan berkelanjutan. WWF memperingatkan G-20 untuk memperhatikan isu perbaikan ekonomi berkelanjutan yang sempat dibahas dalam KTT G-20 di Toronto. WWF mengatakan bahwa para pemimpin dunia saat ini masih menggambar ekonomi secara hitam-putih tanpa unsur hijau. Daripada melakukan aksi nyata, KTT G-20 hanya mendaur ulang dan menggunakan kembali komitmen lagi. WWF pun menyatakan kekecewaannya karena G-20 tidak setuju menambah dana untuk masalah adaptasi iklim. Senada dengan WWF, *Greenpeace* menyerukan G-20 berperan secepatnya dalam menghentikan penggunaan bahan bakar fosil. Mereka mengiritik KTT G-20 yang miskin visi dalam hal pembiayaan iklim.[187]

Tearfund mengatakan bahwa G-20 kehilangan kesempatannya untuk membahas masalah 'keadilan iklim'. Mereka menyerukan sedikitnya 200 miliar dollar AS per tahun untuk membangun dan menambah sektor keuangan publik pada tahun 2020. Tearfund menyambut positif dukungan G-20 terhadap *United Nations Convention Against Corruption* namun kecewa karena ketiadaan evaluasi. Mereka berharap G-20 dapat bekerja lebih baik daripada G-8.[188]

---

185 Ibid.

186 Ibid.

187 NGO Responses to the G-20 Summit, http://www.sherpatimes.com/g8/185-ngo-response-to-the-g20-summit.html. diakses tanggal 27 Juni 2010.

188 Ibid.

Womens Working Group menyerukan agar G-20 mengintegrasikan perspektif gender dalam arsitektur ekonomi dan keuangan baru, membawa G-20 dan IMF di bawah mandat dan otoritas PBB, menghentikan negoasiasi Putaran Doha, serta mengembalikkan kondisi awal ODA *(Official Development Assistance)* serta alokasi yang transparan dalam pendanaan baru berbasis gender, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia.[189]

Sekretaris Jenderal Amnesty Internasional, Irene Khan, menyerukan G-20 untuk memperlihatkan komitmen yang baik dalam masalah hak asasi manusia. *Amnesty Internasional* menyatakan bahwa kredibilitas catatan HAM negara-negara G-20 patut dipertanyakan untuk memimpin dunia. Dua negara terbesar dalam G-20, AS dan China hanya menerima sebagian agenda global terkait HAM.

> *"Untuk menjadi pemimpin global, G-20 harus menghormati nilai-nilai global dan mengubah catatan buruk masa lalu dan standard ganda mereka tentang Hak Asasi Manusia. … Ini adalah penguasa lama yang duduk di seputar meja dunia untuk menunjukkan contoh melalui perilaku mereka. Suatu awal yang baik bagi anggota G-20 untuk memberikan pertanda yang jelas bahwa semua hak asasi manusia, hak ekonomi, sosial budaya, politik ataupun sipil sama-sama penting."*[190]

d. LSM Indonesia: upaya menemukan pijakan bersama

Di Indonesia, aneka tuntutan terhadap G-20 turut disuarakan. Terkait KTT G-20 London 2009, misalnya, INFID menyatakan beberapa poin. Pertama, pertemuan G-20 tidak akan menghasilkan tata dunia yang adil, bahkan sebaliknya akan menciptakan tata dunia yang semakin tidak adil. Kedua, menolak penguatan peran IMF dan Bank Dunia dalam penanganan krisis keuangan karena lembaga-lembaga multilateral ini terbukti gagal dan bahkan menjadi biang keladi krisis keuangan global. Ketiga, mendesak PBB mengambil

---

189 Pernyataan the WOMEN'S WORKING GROUP ON FINANCING FOR DEVELOPMENT di KTT G-20 di Pittsburgh, September 2009, http://www.choike.org/2009/eng/informes/7637.html. diakses tanggal 19 Juli 2010.

190 G-20 must set the example and clean up their human rights record. http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/feature-stories/g-20-must-set-example-and-clean-their-human-rights-record-200905. diakses tanggal 29 Juli 2010.

peranan yang lebih besar dalam penyelesaian krisis, dengan syarat adanya reformasi di tubuh PBB dengan menghilangkan hak veto lima negara. Kelima, kehadiran Presiden SBY dalam pertemuan G-20 adalah sebuah kesia-siaan dan memperlihatkan betapa patuhnya Presiden SBY kepada keinginan pemberi utang Indonesia ketimbang pada rakyatnya. Kelima, menolak jaminan pembiayaan risiko gagal bayar utang swasta oleh pemerintah. Keenam, menolak kesepakatan-kesepakatan bilateral yang berkaitan dengan skema perubahan iklim, yang akan memberi peluang pada kehancuran alam dan lingkungan Indonesia.[191]

Salah seorang wakil INFID berharap agar pemerintah Indonesia memiliki kepastian kebijakan tentang sistem investasi, perdagangan, keamanan dalam negeri. Lebih lanjut aktivis LSM tersebut mengungkapkan bahwa ketidaksetujuan INFID terutama karena G-20 menjadi lembaga tandingan terhadap PBB yang selama ini lebih legitimate dalam membuat keputusan yang mengikat secara internasional. G-20 yang menguasai lebih dari 3/4 GDP dunia membuat pengaruh PBB menjadi tidak signifikan.[192]

Salah seorang aktivis LSM dari Koalisi Anti Hutang menggarisbawahi hal senada dengan INFID tentang legitimasi G-20:

> "Kalau G-8 atau G-20 menempatkan diri sebagai *shadow government*, seolah-olah menjadi model pemerintahan baru di tingkat global. Kalau kita *stick* dengan kesepakatan konsensus internasional, PBB seharusnya memiliki peran yang lebih besar. Ketika terjadi krisis 2007-2008, muncul perdebatan apakah masalah diselesaikan melalui mekanisme G-20 atau PBB. Kebanyakan masyarakat sipil mendorong PBB berperan lebih besar dalam menyelesaikan krisis karena mereka lebih menjamin keterlibatan semua negara."[193]

Aktivis LSM lain dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) juga menekankan agar keikutsertaan Indonesia dalam G-20 tidak hanya sekadar ikut-ikutan. Lebih baik mendorong PBB sebagai representasi global.[194]

---

191 Pernyataan INFID terhadap G-20. http://melampauipemilu.com/statement-infid-terhadap-pertemuan-G-20/. Diakses tanggal 29 Juli 2010.

192 Wawancara dengan perwakilan INFID tanggal 27 Mei 2010.

193 Wawancara dengan aktivis-aktivis LSM pada tanggal 21 Mei 2010.

194 Ibid.

Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme-Imperialisme (GERAK LAWAN) menekankan beberapa poin isu penting.[195] Pertama, G-20 tidak memiliki legitimasi sebagai forum pengambilan keputusan untuk rakyat di seluruh dunia, khususnya yang berada di negara-negara miskin dan berkembang. Kedua, mendesak negara-negara maju untuk tidak memperalat negara-negara berkembang dalam pertemuan G-20 untuk merevitalisasi Putaran Doha Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan pembukaan investasi dalam rangka eksploitasi kekayaan alam negara berkembang dan perdagangan karbon/ *offset* dalam penyelesaian krisis. Ketiga, Pertemuan G-20 tidak digunakan untuk mempromosikan utang baru bagi negara-negara berkembang melalui reformasi Lembaga Keuangan Internasional (IFIs).[196] Keempat, dibutuhkan tanggung jawab dan kewajiban negara *(state obligation)* secara langsung serta perubahan kebijakan secara mendasar dalam rangka penyelamatan rakyat. Kelima, Kami menuntut penyelesaian krisis sumber daya alam (energi, pangan, air dan perikanan), krisis lingkungan (pencemaran, perubahan iklim), dengan pengarusutamaan hak-hak rakyat terutama buruh, petani dan konsumen kecil. Keenam, Presiden SBY agar tidak membuat kebijakan yang merugikan rakyat dengan penciptaan utang baru yang dapat menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya.

Koalisi untuk Keadilan Global yang turut pula menyuarakan aspirasinya. Tuntutan yang disuarakan Koalisi untuk Keadilan Global meliputi:

1. Menolak cara-cara kapitalisme neoliberal dalam bentuk deregulasi keuangan, liberalisasi perdagangan, ekspansi investasi dan utang luar negeri sebagai strategi dalam penyelesaian krisis keuangan global.
2. Menolak penguatan peran lembaga keuangan multilateral IMF, Bank Dunia dan Penggunaan Utang Luar Negeri sebagai sumber pembiayaan krisis khususnya bagi negara-negara berkembang.

---

195 GERAK LAWAN adalah forum LSM yang terdiri dari Serikat Petani Indonesia, Serikat Buruh Indonesia, Koalisi Anti Utang, Institute for Global Justice, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Sarekat Hijau Indonesia.

196 Masyarakat Sipil Indonesia Mengutuk Pertemuan G-20 di London. http://www.satudunia.net/?q=content/masyarakat-sipil-indonesia-mengutuk-pertemuan-g-20-di-london. diakses tanggal 29 Juli 2010.

3. Menolak segala bentuk manipulasi isu-isu krisis pangan, perubahan iklim *(climate change)* dan agenda pembangunan berkelanjutan, yang ternyata upaya untuk memperpanjang neokolonialisme dan imperialism terhadap negara-negara dunia ketiga.
4. Menuntut pemerintah untuk kembali menjalankan perekonomian nasional berdasarkan amanat Proklamasi Kemerdekaan dan UUD 1945 khususnya Pasal 33 sebagai landasan ekonomi kerakyatan.[197]

e. Pendekatan-pendekatan LSM dalam menyuarakan isu-isu dalam G-20

Menemukan cara yang efektif untuk menyuarakan aspirasi LSM merupakan isu yang penting. Pendekatan yang tepat akan membantu LSM untuk meyakinkan pemimpin-pemimpin G-20 dan pemerintah nasional yang menjadi partner potensial dalam menjalankan isu-isu dan agenda global. Pendekatan tersebut merefleksikan bagaimana LSM mempersepsikan peran G-20 dan mendukung pemerintah untuk mempertimbangkan kemitraan dengan LSM sebagai agenda penting.

Pendekatan umum mencakup pendekatan yang *soft* seperti membuat pernyataan press, melobi perwakilan pemerintah dan pemimpin-pemimpin G-20, kampanye non kekerasan, dan pendekatan lebih keras seperti demonstrasi untuk melakukan tekanan-tekanan atau mengartikulasikan protes terhadap G-20. Beberapa LSM mengkombinasikan beragam pendekatan dalam aksi-aksi mereka. Untuk mendukung aksi-aksi tersebut, LSM mengembangkan pusat data sebagai instrument utama untuk memformulasikan pandangan-pandangan mereka terhadap G-20. LSM mengumpulkan informasi dari dalam masyarakat, melihat tingkat kepuasan atas kinerja pemerintah, mempelajari skema yang didiskusikan dalam KTT G-20 dan melihat dan memonitor implementasi komitmen-komitmen G-20. Beberapa LSM melobi pemerintah mereka supaya membawa usulan-usulan mereka dalam pertemuan G-20.

The Global Campaign for Education, *Save the Children*, *The Global Call to Action Against Poverty*, INFID, dan GERAK LAWAN adalah contoh gerakan masyarakat

---

197 Koalisi untuk Keadilan Global dibentuk oleh Instute Global Justice, INFID, Koalisi Anti Utang, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Migrant Care, Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air dan Serikat Petani Indonesia.

sipil yang menggunakan metoda pernyataan pers dalam menyampaikan seruan-seruannya. *Greenpeace* dan WWF menggunakan metode kampanye.

Banyak LSM menggelar pernyataan bersama dengan mengembangkan jaringan dengan LSM lainnya. Pendekatan ini sebagai contoh diadopsi oleh masyarakat sipil Indonesia seperti Serikat Petani Indonesia, Serikat Buruh Indonesia, Koalisi Anti Utang, *Institute for Global Justice*, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Sarekat Hijau Indonesia.

Dalam tataran internasional, pernyataan sikap bersama untuk menyuarakan aspirasi terkait G-20 pun dilakukan. Salah satunya adalah pernyataan sikap bersama menyambut KTT G-20 di Toronto dengan nama *'International Civil Society Statement'* pada 14 April 2010. Pernyataan sikap bersama ini merupakan gabungan dari puluhan LSM dalam tataran internasional, regional maupun nasional.

Ada lima poin utama dalam pernyataan sikap bersama ini. Pertama, menuntut G-20 mengikutsertakan negara termiskin yang dimulai dengan Uni Afrika. Kedua, G-20 harus bersifat seimbang, *legitimate*, dan kredibel dalam mewakili kepentingan seluruh negara dan ketua G-20 harus dirotasi. Ketiga, G-20 harus transparan dan akuntabel. Dalam jangka pendek, G-20 harus memperluas kerangka akuntablitas ini menjadi komitmen bersama yang didukung oleh *'expert groups'*. Keempat, G-20 harus memposisikan dirinya sebagai sebuah forum yang mengakui dan memperkuat peran PBB. Kelima, G-20 harus terbuka pada masyarakat sipil. Dalam poin ini dikatakan bahwa aktor non negara meningkat perannya sebagai pemain dalam proses internasional. Kritik dan proposal yang dilancarkan masyarakat sipil akan berpengaruh positif dalam membentuk pengertian pemerintah terhadap aneka isu, agenda kebijakan, dan mekanisme kerja. Menggandeng masyarakat sipil menjadi langkah maju yang penting bagi G-20. Untuk itu, pemerintah dan parlemen negara anggota G-20 harus berkomitmen menggelar konsultasi yang efektif dengan masyarakat sipil.[198]

Masyarakat sipil Internasional yang terlibat dalam pernyataan bersama ini adalah *ActionAid International, The Association for Women's Rights in*

---

198 Sign-On Statement for a Global Leaders Forum. International Civil Society Statement ahead of the 2010 G-20 Leaders Summit in Toronto. http://www.halifaxinitiative.org/content/towards-a-global-leaders-forum. diakses tanggal 29 Juli 2010.

Development, CIVICUS, Global Call to Action Against Poverty, Global Campaign for Education, Global Health Council, Global Movement for Children, Greenpeace, International Trade Union Confederation, Medical Mission Sisters International, Oxfam International, Third World Network, UBUNTU Forum, VIVAT International, World AIDS Campaign, dan *World Federalist Movement-Institute for Global Policy.*

Masyarakat sipil regional yang terlibat adalah *Arab NGO Network for Development, European Network on Debt and Development, dan Economic Justice Network of the Fellowship of Christian Councils in Southern Africa*. Sementara masyarakat sipil berskala nasional dalam *joint statement* ini berasal dari seluruh penjuru dunia. Masyarakat sipil asal Indonesia tidak terlibat dalam *joint statement* ini.

Bentuk pendekatan lain yang diadopsi adalah menciptakan platform masyarakat sipil seperti yang dilakukan oleh gabungan LSM yang menamakan diri *'2010 Canadian G-8/G-20 Civil Society Coordinating Committee'.* Komite ini terdiri dari aneka masyarakat sipil seperti *Africa Canada Forum*, *Amnesty International, AQOCI, Canadian Catholic Organization for Development and Peace, Canadian Council for International Co-operation, Canadian Crossroads International, Canadian Global Campaign for Education (CGCE), Canadian Labour Congress, Canadian Society for International Health, Climate Action Network Canada, G-8 2010 Interfaith Partnership, Global Treatment Access Group, Halifax Initiative Coalition, Interagency Coalition on AIDS and Development, KAIROS – Canadian Ecumenical Justice Initiatives, Make Poverty History Canada, Oxfam Canada, Oxfam Québec, The Pembina Institute, Plan Canada, RESULTS Canada, Save the Children Canada, UNICEF Canada*, dan *World Vision Canada.*[199]

Platform setebal 13 halaman ini secara lengkap menguraikan rekomendasi tentang apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kanada dalam fokus mengentaskan kemiskinan, reformasi ekonomi, dan perubahan iklim. *Platform* ini memaparkan tiga area penting utama yang saling berhubungan yakni pengentasan kemiskinan, transformasi ekonomi global dan sistem keuangan serta aksi menghadapi perubahan iklim.

ITUC, *European Trade Union Congress*, dan lain-lain tergabung dalam *Global Union*, memiliki konstituennya masing-masing. ITUC memiliki konstituen di 137 negara sehingga masing-masing memiliki mekanisme konsultasi yang

---

199 G-8/G-20 Canadian Civil Society Platform. http://www.G-7.utoronto.ca/conferences/2010/ghdp/G-8-G-20-civil-society.pdf.

hasilnya akan dikirim pada seluruh konstituen. ITUC juga sudah menulis surat untuk mengundang Susilo Bambang Yudhoyono. [200]

Pada akhirnya, kebanyakan masyarakat sipil berupaya mempublikasikan pernyataan sikap bersama, opini, rilis pers, maupun agenda kegiatan kampanye dan protes melalui media massa (udara, cetak, elektronik), selebaran, jurnal, buku, situs internet hingga aneka jejaring sosial seperti *tweeter* dan *facebook*.

Metoda masyarakat sipil yang lebih 'keras' muncul dalam wujud demonstrasi. Seluruh tuan rumah pelaksana KTT G-20 harus menangani aksi-aksi demonstrasi jalanan yang hampir seluruhnya berujung pada kerusuhan dan penangkapan demonstran. Dalam KTT G-20 di London, seorang demonstran bernama Ian Tomlinson (47 tahun) bahkan tewas tak berapa lama seusai ditangkap petugas dalam sebuah konfrontasi antara kelompok anti-kapitalis, lingkungan, dan aparat keamanan di dekat *Bank of England*.[201] Dalam aksi ini, seorang demonstran menyatakan kekesalannya: *"Orang-orang marah karena kehilangan pekerjaan mereka namun para banker tetap mendapatkan bonus. Rakyat juga mengangkat tangan mereka terhadap legislasi penghancuran lahan dengan bulldozer untuk perluasan bandara udara melalui, seperti kita lihat pada landas pacu di Heathrow."*[202]

Dalam KTT G-20 di Toronto, Kanada, pihak berwenang yang dilansir *Associated Press* mengatakan bahwa sebanyak 480 orang ditangkap karena membakar empat mobil polisi, menghancurkan kaca-kaca jendela bank dan pintu pertokoan dalam demonstrasi yang berujung rusuh. Jumlah pengunjuk rasa yang tercatat mencapai 2.000 orang. Dengan demikian, demonstrasi Toronto ini merupakan demo terbesar menentang pertemuan G-20. Para aktivis itu berasal dari kelompok tenaga kerja. Mereka menuntut anggota G-20 untuk berbuat lebih banyak untuk memerangi kemiskinan global, hak-hak perempuan, dan ketenagakerjaan. Awalnya, para pengunjuk rasa ini berjanji menggelar aksi protes damai namun berakhir bentrok dengan polisi.[203]

---

200 Wawancara dengan presiden KSBSI, Rekson Silaban, pada tanggal 12 Agustus 2010.

201 No charge for police officer over G-20 protest death. http://uk.reuters.com/article/idUKTRE66L03020100722. diakses tanggal 29 Juli 2010.

202 Ibid.

203 Dua Ribu Orang Demo Pertemuan G-20. http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/10/06/26/121820-dua-ribu-orang-demo-pertemuan-G-20. diakses tanggal 29 Juli 2010.

Tuan rumah KTT G-20 November 2010, Korea Selatan, bahkan sudah disibukkan dengan aksi demonstrasi dari *Migrant Trade Union of South Korea*. Mereka menuntut dua hal. Pertama agar pemerintah Korea Selatan, khususnya *Ministry of Justice and the Immigration Service* agar sesegera mungkin menghentikan aksi-aksi pelanggaran HAM terhadap para pekerja migran. Kedua, menuntut pemerintah Korea Selatan menghentikan misi kesuksesan penyelanggaran pertemuan G-20 sebagai alasan dan legalisasi untuk menangkap dan mendeportasi pekerja migran.[204]

Ini tentu saja bisa dipahami bahwa pemerintah tidak menyambut usulan-usulan LSM yang dikemukakan dengan cara kekerasan. Penggunaan cara demonstrasi jalanan dengan kekerasan hanya membawa citra negative tentang LSM dan menjadi alasan pemerintah untuk tidakmau duduk bersama dengan LSM dalam membahas isu-isu krusial. Pembentukan koalisi dan pernyataan bersama dipandang sebagai pendekatan yang efektif dan dapat mendorong pemerintah dan pemimpin-pemimpin G-20 untuk memformulasikan daftar prioritas isu yang harus dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan G-20. Telah dideskripsikan bahwa LSM memiliki kepentingan-kepentingan dan pandangan sendiri terhadap G-20 dan karenanya berusaha untuk mengartikulasikan posisi masing-masing. Pernyataan press bersama akan menunjukan bahwa LSM siap untuk bekerja sama dan berbicara dalam satu suara untuk menangani satu isu yang paling penting dalam agenda. Di samping itu, koalisi LSM dapat mempengaruhi pemerintah dengan lebih mudah dibanding jika mereka bergerak sendiri.

f. Respon pemimpin-pemimpin G-20 terhadap rekomendasi LSM

Respon pemerintah-pemerintah anggota G-20 terhadap peran yang dimainkan masyarakat sipil sangat beragam. Beberapa contoh tanggapan pemerintah dapat dideskripsikan disini:

Pada tanggal 14 Maret 2009, Kedutaan Inggris di Istanbul menyelenggarakan *round table meeting* dengan masyarakat sipil dalam wadah *Global and Political*

---

204 Suara untuk keadilan migran dari Korea Selatan, lokasi untuk KTT G-20 berikutnya, http://therealG-8G-20.com/featured/vOKIes-for-migrant-justice-from-south-korea-the-location-for-the-next-G-20-summit/ Diakses tanggal 29 Juli 2010.

Trends Centre (GPOT) guna mendiskusikan hasil KTT G-20 London. Pertemuan ini terselenggara dengan dukungan harian Referans, Hurriyet, pebisnis, akademisi, dan media massa.[205] Hasil diskusi ini dituangkan dalam sebuah rekomendasi. Rekomendasi ini berisi langkah penanganan krisis ekonomi global dalam tingkat umum, sistem keuangan internasional, ekonomi akar rumput, dan arsitektur keuangan internasional.[206]

Terobosan pertama pengakuan pemerintah terhadap peran masyarakat sipil dalam G-20 muncul dari Kanada. Tanggal 11 Juni 2010, Forum for Democratic Global Governance (FIM) mempertemukan aktivis-aktivis LSM dari 17 negara di Ottawa dengan Len Edwards yang mewakili PM Kanada Stephen Harper, pejabat senior Departemen Keuangan Kanada Graham Flack, serta mantan ketua Sherpa, Peter Harder. Pertemuan ini menjadi kontak resmi pertama antara G-20 dan LSM.[207] Dalam pertemuan ini, FIM meminta G-20 untuk "melihat ke depan dengan menggunakan lensa perekonomian hijau yang akan mengurangi angka kemiskinan" dan mereka berharap agar Sherpa Kanada dapat menginstitusionalkan dialog antara masyarakat sipil dengan G-20. G-20 harus menghentikan kebuntuan seputar isu IMF yang oleh sebagian negara berkembang dipandang sebagai kepanjangan tangan AS dan sekutunya.[208]

Terobosan lainnya muncul dari India. Gabungan masyarakat sipil yang terdiri dari *Centre for Budget Governance and Accountability (CBGA)*, *Oxfam*, *CENTAD*, *Christian Aid*, dan *Wada Na Todo Abhiyan*, melakukan *joint statement* bersama PM India, Manmohan Singh pada tanggal 2 April 2009.[209] Mereka menyerukan agar G-20 dapat menyuarakan kepentingan yang berimbang. G-20 harus mampu mencegah krisis di masa mendatang, melindungi pekerja,

---

205 http://www.londonsummit.gov.uk/en/global-update/cp-turkey/14279811/en-civil-society-recommendations. G-20: Civil society event in Istanbul. Diakses tanggal 29 Juli 2010.

206 TURKEY: CIVIL SOCIETY RECOMMENDATIONS TO THE LONDON SUMMIT http://www.londonsummit.gov.uk/resources/en/PDF/turkey-G-20-conclusions.. Diakses tanggal 29 Juli 2010.

207 G-20 keeps its friends close - and enemies closer. http://www.theglobeandmail.com/news/world/G-8-G-20/blog-global-view/G-20-keeps-it-friends-close-and-enemies-closer/article1603578/. Diakses tanggal 29 Juli 2010.

208 Ibid.

209 Civil society for a proactive Indian role in G-20. http://southasia.oneworld.net/todaysheadlines/civil-society-for-a-proactive-indian-role-in-G-20. diakses tanggal 26 Juli 2010.

konsumen, dan lingkungan. G-20 harus bekerjasama dengan PBB yang tetap menjadi satu-satunya pemerintahan global yang *legitimate*. G-20 juga harus segera mengucurkan paket stimulus untuk negara berpenghasilan rendah. Mereka juga nenyerukan agar negara kaya dalam G-20 tidak mencedarai prospek perdagangan negara-negara berkembang melalui hambatan non-perdagangan, lebih memperhatikan isu perubahan iklim, serta sistem keuangan yang dapat dikontrol luas oleh publik, transparan, dan akuntabel.

ITUC juga turut diundang dalam pertemuan G-20. Wakil ITUC dari Indonesia mengatakan bahwa dirinya diundang pada pertemuan G-20 di London, Pittsburgh, Toronto, dan Korea Selatan. Dalam pertemuan tersebut, ITUC bertemu dengan berbagai kepala negara seperti PM Kanada Stephen Harper dan Kanselir Jerman, Angela Merkel. ITUC juga bertemu dengan para petinggi seperti ketua OECD dan *managing director* IMF dan *World Bank*. Sebagian besar format adalah diskusi guna mewakili negara berkembang terkait berbagai isu seperti reformasi lembaga keuangan.

Beberapa pemerintah mengindikasikan dukungannya untuk memformalkan pertemuan antara LSM dan pemimpin-pemimpin G-20. Sayangnya, sebagian besar diskusi G-20 hanya berputar pada stabilitas makro ekonomik, tidak banyak berbicara tentang isu sosial, pekerjaan, hak-hak buruh, ketenagakerjaan.

Permintaan ITUC mengenai masuknya klausul ketenagakerjaan dalam agenda G-20 juga sudah tertampung dalam komunike akhir G-20. Kemajuan lain yang terlihat adalah terselanggaranya Pertemuan Menteri-menteri Tenaga Kerja G-20 yang bertuuan untuk membicarakan isu-isu tenaga kerja dalam negara-negara anggota G-20.

Respon lainnya ditunjukkan pemerintah dalam menghadapi para demonstran. Meski terbuka dan secara resmi telah membuka komunikasi dengan masyarakat sipil, pada saat bersamaan pemerintah Kanada menindak tegas para demonstran jalanan dengan memobilisasi aparat kepolisian untuk menghadapi lebih dari 400 pendemo.[210]

Salah satu responden penelitian dari perwakilan asing di Indonesia mengemukakan perasaannya bahwa keikutsertaan LSM disambut dengan

---

210 http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/10/06/26/121820-dua-ribu-orang-demo-pertemuan-G-20. Dua Ribu Orang Demo Pertemuan G-20.

tangan terbuka, namun proses yang lambat dapat dipahami karena G-20 adalah *forum government to government*.[211] Masukkan-masukkan dari LSM sebaiknya dilakukan dalam bentuk diskusi. Tapi ada masalah lain:

> *"…ini menjadi rumit untuk mencapai segala macam bentuk kesepakatan. Sehingga sementara kita harus terbuka pada pandangan-pandangan LSM, sektor swasta, dan setiap orang yang lain atau negara-negara lain yang bukan anggota; jika G-20 menjadi organisasi pembuat keputusan dan berorientasi pada aksi, mereka tidak dapat mendengar setiap orang dan tida dapat memasukan semua dalam organisasi. Karenanya biarkanlah pemerintah yang memainkan perannya. Ini tidak berarti bahwa kita seharusnya menutup telinga kita dan tidak mendengar pa yang setiap orang katakana. Dua puluh negara sudah merupakan jumlah yang besar. Jika kamu menambah jarak dan kategorisasi, saya tidak berpikir mereka akan dapat mencapai sebuah keputusan. Dua puluh anggota sudah cukup banyak."*

Seorang responden lain berpendapat bahwa konsultasi dengan masyarakat sipil menjadi bahan pertimbangan penting untuk memenuhi tuntutan aneka pemangku kepentingan *(multi-stakeholder)*:[212]

> *"Kita dapat membayangkan konsultasi masyarakat sipil dimasukkan dalam KTT G-20 atau pertemuan-pertemuan terkait pada tahap berikutnya ketika forum dilembagakan dan berkembang dari peran ad hoc saat ini untuk menangani krisis finansial global. Seperti disinggung sebelumnya, deliberasi seharusnya dilakukan menyangkut isu pembangunan di G-20 sebagai forum ekonomi internasional utama. Sehingga, konsultasi dengan masyarakat sipil penting untuk memenuhi deliberasi multi-pemangku kepentingan."*

Responden lain dari sebuah organisasi regional terkemuka menyetujui bahwa aspirasi-aspirasi dari masyarakat sipil perlu diakomodasi dalam G-20.[213]

---

211 Wawancara dengan perwakilan organisasi internasional di Indonesia tanggal 22 Juni 2010.
212 Wawancara dengan perwakilan asing di Indonesia tanggal 16 Juni 2010.
213 Wawancara dengan perwakilan dari Komisi Eropa pada tanggal 8 Juni 2010.

Pertanyaan pentingnya yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara G-20 mengakomodasi suara-suara masyarakat sipil ini? Dalam wawancara melalui korespondensi elektronik, salah seorang responden menyarahkan G-20 seharusnya melibatkan masyarakat sipil dan LSM dalam kelompok-kelompok kerja.[214] Responden tersebut mencontohkan partisipasi masyarakat sipil yang diselenggarakan oleh *Finance Inclusion Expert Groups* yang telah memberikan rekomendasi bagi pengembangan akses-akses layanan keuangan. LSM telah menunjukan kompetensi mereka dalam pengembangan jasa-jasa layanan finansial.

Salah seorang responden dari perwakilan asing untuk Indonesia[215] memandang keterlibatan masyarakat sipil dalam G-20 mungkin diperlukan, namun peran masyarakat sipil ini seharusnya hanya terbatas pada pembahasan ekonomi. Suara-suara masyarakat sipil dalam G-20 sebaiknya dimulai dari level nasional karena jelas bahwa G-20 adalah forum *government to government*.

Praktik baru diperkenalkan oleh pemerintah Korea Selatan dalam menanggapi tuntutan-tuntutan LSM bagi dialog dalam forum formal. Tuan rumah KTT G-20 memunculkan ide penyelenggaraan Civil G-20 dengan mengundang lebih dari seratus aktivis LSM global yang mewakili 70 LSM dari 40 negara-negara yang berbeda untuk berdialog dengan Sherpa G-20 yang mewakili negara-negara anggota G-20. Pertemuan ini diselenggarakan oleh Komite Persiapan G-20 dan "Global Call to Action Against Poverty (GCAP).[216]

Dialog di antara perwakilan-perwakilan LSM merupakan yang pertama kali sejak G-20 menyelenggarakan KTT di tahun 2008 atau bahkan sejak pertemuan tingkat menteri G-20 diselenggarakan di tahun 1999. Satu peserta pertemuan mengakui nilai historic pentingnya Civil G-20 naun mengkritik bahwa dialog tersebut sangat kering karena isu-isu substantive tidak secara intensif didiskusikan dan bahwa disetujui oleh LSM dan Sherpa G-20.[217] Ini bukan dialog yang benar-benar diharapkan, tetapi seperti ceramah oleh Sherpa dengan waktu yang sangat terbatas; LSM tidak memiliki kesempatan untuk merespon kembali tanggapan dari Sherpa.

---

214 Wawancara dengan perwakilan asing melalui surat elektronik (email).

215 Wawancara dengan perwakilan asing tanggal 4 Juni 2010.

216 http://www.korea.net diakses tanggal 15 Nopember 2010.

217 Seperti yang disampaikan oleh satu satu peserta Civil G-20 dari Indonesia pada Focus Group Discussion tentang G-20 dan Agenda Pembangunan tanggal 4 Nopember 2010.

Deskripsi tentang beragam respon dari pemerintah terhadap aspirasi LSM telah dikemukakan. Dapat dilihat bahwa respon pemerintah tergantung pada persepsi mereka terhadap peran LSM dan pada sistem politik dan juga latar belakang sejarah. Pemimpin-pemimpin G-20 kiranya perlu untuk membangun suatu dialog yang substansial dan dengan pendekatan yang lebih terkoordinasi untuk memformulasikan posisi bersama terhadap G-20 dan agendanya.

g. Respon pemerintah Indonesia terhadap peran LSM dalam G-20

Dalam konteks G-20, pemerintah Indonesia merespon gerakan masyarakat sipil dengan moderat. Ini misalnya ditunjukkan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono yang menganggap demonstrasi di KTT G-20 sudah menjadi model dan wajar terjadi. Demonstrasi bukan sesuatu yang luar biasa dan tidak menjadi masalah selama dapat berlangsung dengan tidak anarkis dan tertib. Menurut Presiden, tuntutan para demonstran baik karena bertema tujuan pembangunan milenium seperti kelaparan, kerusakan lingkungan, perdagangan yang tidak adil, dan biaya perhelatan yang mahal. Namun dia sangat menyayangkan aksi anarkis yang terjadi.[218]

Mantan Kepala Badan Koordinasi Fiskal, Anggito Abimanyu, menyesalkan tuntutan demonstran dalam pertemuan KTT G-20 yang tidak relevan dan tidak terkait dengan perkumpulan kapitalisme. Anggito menilai G-20 tak terkait dengan perkumpulan kapitalis karena isu pembangunan juga dibahas dalam setiap pertemuan KTT G-20. Dia menjelaskan bahwa "Yang dibahas tidak hanya sektor keuangan tapi juga regulasi untuk melindungi rakyat yang selama ini justru terlalu liberal."[219]

---

218 SBY Anggap Demonstrasi di KTT G-20 Bukan Luar Biasa. http://www.detiknews.com/read/2010/06/29/045808/1388886/10/-sby-anggap-demonstrasi-di-ktt-G-20-bukan-luar-biasa-. Civil society for a proactive Indian role in G-20. http://southasia.oneworld.net/todaysheadlines/civil-society-for-a-proactive-indian-role-in-G-20. diakses tanggal 26 Juli 2010.

219 Sering Didemo, G-20 Masih Dibutuhkan oleh Negara Berkembang. http://www.detikfinance.com/read/2010/06/28/075058/1387958/4/sering-didemo-G-20-masih-dibutuhkan-oleh-negara-berkembang. Civil society for a proactive Indian role in G-20. http://southasia.oneworld.net/todaysheadlines/civil-society-for-a-proactive-indian-role-in-G-20. diakses tanggal 26 Juli 2010.

Salah seorang responden dari LSM berpendapat bahwa pemerintah Indonesia belum serius memandang LSM sebagai partner setara dalam G-20. dia telah berhasil bertemu dengan pemimpin-pemimpin lain dari negara-negara lain, tetapi belum bertemu langsung degnan delegasi Indonesia dalam pertemuan-pertemuan G-20.

> "Dalam G-20, kita belum bisa bertemu dengan pemerintah Indonesia, China, Turki, dan Arab Saudi. Arab Saudi tidak memiliki serikat buruh, possibility China rendah karena serikat buruhnya hanya satu dan masih menjadi bagian partai komunis China sehingga tak banyak hal yang akan kami dapatkan, Turki memiliki kecenderungan politik ke Eropa, sementara Indonesia ternyata sulit sekali bersuara."[220]

Menurut pandangan aktivis LSM tersebut, Indonesia belum terlalu paham mengenai materi ITUC sehingga tidak siap. Juga ada kekhawatiran Indonesia bahwa pertemuan-pertemuan dengan ITUC akan menghasilkan komitmen-komitmen yang sulit ditindaklanjuti. Kedua adalah manajemen waktu. Meski ITUC termasuk *global player*, presiden Indonesia lebih memilih hadir dalam pertemuan keluarga besar Indonesia di New York, berbicara di *Harvard University*, dan seterusnya. Di sisi lain, pemimpin Brazil, Argentina, Australia, Jerman, Jepang, justru menyediakan waktu untuk bertemu dengan LSM.[221]

Keengganan pemerintah Indonesia terhadap masyarakat sipil dipengaruhi oleh cara pandang yang konservatif terhadap peran LSM. Indonesia masih lambat dalam menerima masyarakat sipil sebagai *genuine partner* dalam G-20.[222] Pemerintah Indonesia lebih mendengar kelompok-kelompok kepentingan seperti pelaku bisnis, Ikatan Dagang, Asosiasi Pengusaha Indonesia, NU, Muhammadyah, dan lain-lain yang merupakan pemain lama.[223] Kolaborasi dengan kelompok-kelompok kepentingan dilihat lebih memperkuat peran negara dan rejim saat ini. Dalam konteks ini, politik domestik membentuk cara pemerintah Indonesia merespon organisasi masyarakat sipil.[224]

---

220 Wawancara dengan presiden KSBSI tanggal 12 Agustus 2010.
221 Ibid.
222 Ibid.
223 Ibid.
224 Ibid.

Pemerintah Indonesia sebenarnya memiliki banyak inisiatif dan mekanisme dalam merangkul masyarakat sipil di tanah air. Persoalannya, Indonesia belum memandang masyarakat sipil sebagai partner yang bersifat simbiosis mutualisme (saling menguntungkan). Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, memang pernah menghadiri Kongres Serikat Buruh juga mengundang KSBSI saat memperingati Hari Buruh. Masyarakat sipil diterima sebagai keniscayaan yang tak mungkin diabaikan, namun belum terlalu optimal. Sifatnya masih seremonial dan mengandalkan pendekatan *ad-hoc*, bukan kerjasama yang berumur panjang.[225]

Dalam hal ini, perlu ada inisiatif baru untuk mempertemukan LSM dan pemerintah. FGD tentang G-20 dan Agenda Pembangunan dapat dilihat sebagai terobosan baru yang perlu ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan serupa.[226] FGD mendapatkan apresiasi baik dari aktivis LSM maupun perwakilan pemerintah dan dilihat sebagai forum penting bagi dialog antara pemerintah dan LSM. Di satu sisi LSM dapat mengemukakan pandangan mereka terhadap proses G-20 dan mengusulkan posisi yang pemerintah perlu perjuangkan dalam pertemuan denga pemimpin-pemimpin G-20 yang lain. Di sisi lain, perwakilan pemerintah dapat membuktikan bahwa pemerintah siap untuk mendengar usulan-usulan LSM dan dapat membawanya ke proses G-20. Dalam forum tersebut, koordinator G-20 untuk isu-isu finansial menginformasikan kepada peserta bahwa dia telah menerima surat ITUC dan menjadikannnya referensi dalam memformulasikan posisi Indonesia dalam G-20.[227] Ini meyakinkan aktivis ITUC bahwa pemerintah Indonesia telah melihat kepedulian ITUC dengan serius.[228] Satu aktivis LSM yang hadir dalam Civil G-20 di Seoul menyebut bahwa “ini adalah kali pertama kami bertemu sama lain.”[229]

Ketua Sherpa G-20 Indonesia mendukung inisiatif tersebut dan menyambut

225 Ibid.
226 Focus Group Discussion tentang G-20 dan Agenda Pembangunan, diselenggarakan oleh FES Indonesia dan Universitas Katolik Parahyangan tanggal 4 Nopember 2010.
227 Seperti dikemukakan Koordinator G-20 untuk isu-isu financial kementerian Keuangan RI pada versitas Katolik Parahyangan tanggal 4 Nopember 2010.
228 Seperti dikemukakan oleh pembicara dari perwakilan LSM dalam FGD tentang G-20 dan Agenda Pembangunan, tanggal 4 Nopember 2010.
229 Seperti dikemukakan oleh pembicara dari perwakilan LSM dalam FGD tentang G-20 dan Agenda Pembangunan, tanggal 4 Nopember 2010.

kontribusi serupa oleh LSM, akademisi dan unsur masyarakat sipil lain:

> "Untuk kolega-kolega lain dan pemimpin LSM, ini yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. G-20 telah memberikan perhatian khusus pada isu-isu finansial sejak pendiriannya di tahun 1999. Namun sekarang kita ingin untuk memberikan perhatian lebih dengan membicarakan isu anti korupsi, perubahan iklim dan agenda pembangunan yang menjadi kepentingan negara-negara berkembang. Karenanya kita ingin melibatkan semakin banyak pemangku kepentingan untuk mensharingkan perhatian besar pada isu-isu ini. Saya menyambut baik upaya menyelenggarakan diskusi ini."[230]

Sebagai kesimpulan, meskipun peran LSM dalam proses G-20 masih terbatas, LSM telah mencoba memainkan peran mereka. Mereka telah berinisiatif untuk mengangkat isu-isu bersama dalam jagnkauan internasional. Banyak LSM menuntuk G-20 mengakomodasi kepentingan baik negara maju maupun negara berkembang. Mereka telah menunjukkan kepedulian mereka pada keadilan ekonomi global, reformasi sistem finansial internasional, pendidikan, perbedaan budaya, dan isu-isu lingkungan.

Beragam pendekatan telah dipakai LSM dalam memainkan pengaruh mereka. LSM telah mengeluarkan pernyataan pers bersama dan mempublikasikan di media. Banyak pernyataan dibuat menyusul diskusi antara LSM dan pemerintah. LSM yang lain menyelenggarakan kampanye global dan demonstrasi besar-besaran.

Beberapa pemerintah seperti Kanada, Turki dan India telah secara resmi membuka dialog dengan LSM. Mereka telah berupaya mengakomodasi perkembangan ini dan menjadikan LSM gerakan yang akomodatif sebagai partner pemerintah daripada yang garis keras yang sering membuat demonstrasi jalanan yang anarkis dan kekacauan.

---

230 Seperti dikemukakan oleh Ketua Sherpa G-20 Indonesia dalam FGD tentang G-20 dan Agenda Pembangunan, tanggal 4 Nopember 2010.

h. Agenda pembentukan Kelompok Kontak Pemerintah Nasional dan LSM dan bagaimana menjadikan Civil G-20 lebih substansial

Untuk meningkatkan peran Masyarakat sipil dalam G-20 ada sejumlah agenda penting yang perlu dilakukan oleh pemerintah ataupun Masyarakat sipil.

Pertama, pemerintah perlu membuka dialog dengan Masyarakat sipil melalui 'kontak grup' formal masyarakat sipil-pemerintah. Pemerintah perlu menyelenggarakan pertemuan konsultatif yang melibatkan lembaga-lembaga masyarakat sipil oleh pihak-pihak ketiga seperti LSM, universitas, dan lembaga-lembaga riset. Hasil pertemuan ini dapat menjadi masukan yang akan diolah dan dirumuskan sebagai bagian dari agenda hubungan luar negeri dalam G-20 sehingga 'kontak grup' ini tidak semata-mata menjadi ajang pertukaran informasi. Pemerintah perlu memandang masyarakat sipil sebagai mitra setara yang bersifat simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan.

Untuk itu, pemerintah perlu melakukan *mapping* masyarakat sipil untuk mengidentifikasi LSM yang peduli pada agenda G-20 dan kemudian membangun kemitraan dengan mereka. Pemetaan ini diperlukan untuk memfasilitasi kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dan LSM secara khusus untuk implementasi G-20 dalam tingkat yang lebih mikro. Seleksi LSM merupakan sesuatu yang problematik.[231] Kriteria seleksi merupakan isu yang sensitive yang bisa memicu perdebatan panjang di antara pemerintah dan LSM sebagaimana juga di antara aktivis-aktivis LSM.

Pemerintah harus menyelenggarakan pertemuan dengan LSM, universitas, lembaga riset melalui kelompok kontak pemerintah LSM. Kelompok kontak ini pertama-tama berfungsi sebagai tempat pertukaran informasi. Pertemuan juga dapat membangun kesepahaman tentang isu-isu besar dalam G-20 dan posisi pemerintah terhadap isu-isu tersebut. LSM dapat berkontribusi untuk membantu pemerintah memformulasikan suatu agenda yang dapat menguntungkan semua warga negara.

LSM perlu pula meyakinkan pemerintah bahwa mereka memiliki kompetensi untuk menjadi partner dalam menjalankan agenda G-20. Penetapan

231 Seperti dikemukakan oleh Direktur International NGO Forum on Indonesian Development dalam presentasinya dalam Focus Group Discussion tentang G-20 dan Agenda Pembangunan tanggal 4 Nopember 2010.

pendekatan yang efektif seharusnya diambil secara serius untuk menunjukan citra positif mereka sebagai partner dalam berhubungan dengan pemerintah dan forum G-20. Penggunaan cara-cara kekerasan seharusnya dihindari karena ini justru akan merusak citra LSM. Mereka harus membuktikan kemampuan mereka dengan mengusulkan rekomendasi yang relevan, logis dan dapat diterapkan. Rekomendasi seharusnya didasarkan atas kajian intensif dan empiric yang didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan valid.

LSM perlu duduk bersama untuk mensharing pandangan mereka dan kepentingan terkait dengan isu-isu G-20, dan memformulasikan pandangan dan inisiatif bersama yang akan diusulkan pada pemerintah nasional dan pemimpin-pemimpin G-20. Ini secara khusus penting untuk memperbaiki citra LSM yang terbelah oleh kepentingan-kepentingan, program dan aktivitas masing-masing dan karenanya tidak dapat berbicara dalam satu suara. Masyarakat sipil perlu memperkuat jaringan dengan masyarakat sipil lainnya misalnya melalui *joint statement* sehingga memiliki gaung yang lebih kencang dalam menyuarakan aspirasinya. LSM harus memiliki visi-misi yang jelas dan mampu menilai G-20 secara objekktif.

Kelompok kontak pemerintah LSM hanya dapat berfungsi dalam kondisi di mana LSM berkehendak untuk melihat G-20 secara objektif dan positif. LSM seharusnyua tidak hanya mengemukakan kritik normative tetapi juga dapat memberi kontribusi bagi G-20. Sulit bagi pemerintah nasional untuk melibatkan LSM jika pemimpin-pemimpinnya menentang peran G-20.

Agenda lain yang harus diupayakan adlah pengembangan Civil-G-20 yang lebih substansial sebagai kelompok kontak global antara pemimpin-pemimpin G-20 dan LSM global. Civil G-20 merupakan inisiatif pemerintah Korea sebelum KTT Seoul. Pemerintah Perancis dan Meksiko seharusnya mempertimbangkan Civil G-20 sebagai partner yang saling menguntungkan utnuk membuat G-20 menjadi lebih responsive kepada kebutuhan masyarakat sipil di dunia.

Terdapat kritik yang mengatakan bahwa pertemuan Civil G-20 sangatlah kering dan karenanya tidak ada komitmen oleh Ketua Sherpa G-20 untuk membawa posisi LSM dalam KTT G-20. Beberapa pemimpin G-20 tampak enggan untuk menyambut dialog dan terbelah dalam merespon usulan-usulan G-20 seperti ide tentang pajak transaksi finansial untuk membantu negara-negara berkembang untuk mendapatkan dana bagi pengentasan kemiskinan. Namun aktivis-aktivis LSM mengakui bahwa dialog ini merupakan pertemuan

pertama yang cukup bersejarah; yang mengindikasikan kemauan politik tuan rumah G-20 membangun kontak dengan LSM.

Beberapa ketua Sherpa G-20 mengakui prean penting LSM untuk mendukung G-20 dalam menjalankan agenda baru dalam prosesnya. Salah satu perwakilan negara anggota G-20 berpendapat: "Mohon tetap memberi dorongan bagi pajak transaksi finansial. Kami perlu dukungan anda. Ini seperti traktat ranjau darat. Pemerintah mengatakan ini tidak bisa. Kamu LSM tetap memberi dorongan. Dan ini bisa terjadi. Inipun bisa terealisasi jika anda tetap memberi dorongan pada kami."[232] Ini mengindikasikan bahwa deliberasi dalam G-20 menyangkut isu tertentu kadang-kadang berlangsung alot di antara pemimpin-pemimpin G-20 dan perdebatan tersebut sering membuat pertemuan G-20 gagal melahirkan komitmen baru. Tekanan LSM dapat membantu mendorong pemimpin-pemimpin G-20 untuk melihat urgensi isu-isu tertenu dan menyambut inisiatif untuk mengagendakan isu tersebut.

Untuk meyakinkan bahwa dialog menyentuh isu yang substantive dan solusi yang konstruktif, Civil G-20 seharusnya diselenggarakan beberapa hari sebelum KTT G-20. Civil G-20 perlu diselenggarakan bersama-sama dengan pertemuan G-20 dan diterima sebagai partner dalam kelompok kerja G-20. G-20 dapat memfokuskan pada isu tertentu yang diangkat dalam Civil G-20. Untuk menjadi lebih efektif aktivis-aktivis LSM perlu diskusi dulu di antara mereka dan memformulasikan pandangan bersama dan inisiatif sebelum pertemuan Civil G-20. Civil G-20 dapat lebih efektif dan substansial jika LSM memiliki pandangan yang sama terhadap isu tertentu yang kemudian akan dibicarakan dengan ketua-ketua Sherpa G-20 sebagai wakil dari negara anggota G-20.

Civil G-20 dapat lebih efektif lagi dan substansial jika kelompok kontak pemerintah-LSM dapat mendukung dan berkontribusi dalam Civil G-20. Karenanya diperlukan suatu jaringan yang terintegrasi antara Civil G-20 dan kelompok kontak pemerintah nasional-LSM. Dialog tentang isu-isu spesifik dapat mulai pada tingkat nasional dan hasil dari dialog tersebut dapat dibawa dalam dialog global di Civil G-20. Jaringan tersebut dapat menyediakan kesempatan bagi partisipasi LSM yang lebih luas dan membawa perasaan

---

232 Ben Phillips, Will the G-20 deliver for the world's poor?, http://www.guardian.co.uk/.../g-20-summit-seoul-financial-transaction-tax diakses pada tanggal 15 Nopember 2010.

kuat bagi keterlibatan internasional. Tentu saja pengembangan institusional tidak akan berjalan mulus. Dunia LSM tetap sesuatu yang kompleks ketika dunia negara-negara bangsa yang kepeduliannya selalu terhadap bagaimana membawa kepentingan-kepentingan nasional. Baik pemerintah nasional dan LSM harus belajar dari pelajaran yang mereka buat dari dialog dan mengetahui resiko jika mereka gagal membuat langkah awal untuk memulai dialog: G-20 mungkin gagal untuk menangani isu-isu utama yang menjadi perhatian serius masyarakat global.

VI.
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini telah mengkaji G-20 sebagai forum utama bagi kerjasama ekonomik dan perannya dalam menangani krisis ekonomik; Indonesia dan perannya dalam G-20; keterwakilan ASEAN dalam G-20; keterwakilan negara Muslim dalam G-20; dan keterwakilan LSM dalam G-20.

Penelitian ini secara umum menemukan:

Tentang peran G-20 sebagai forum utama kerjasama ekonomi internasional

- Sebagian besar responden dan analisis tertulis mengakui peran penting G-20 dalam mengangani krisis terkini. Dengan merangkul negara maju dan emerging economies, G-20 memiliki kemampuan untuk menangani krisis dengan cara-cara terkoordinasi. Sebagian responden mengakui bahwa G-20 telah mampu membuktikan kompetensinya untuk menyelematkan perekonomian dunia dari krisis besar global yang mengakibatkan krisis finansial tersulit di negara-negara maju, pengaruh yang telah dirasakan di seluruh dunia. Perekonomian saat ini sedang mengalami pemulihan meskipun pertumbuhan masing belum kuat dan berkelanjutan dan tahan terhadap krisis yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

- G-20 merupakan forum *intergovernmental* yang merefleksikan pendekatan multilateral baru dalam menjawab masalah global. G-20 adalah lebih daripada sekedar klub eksklusif, namun klub dengan keanggotaan terbatas dengan mandat global yang sistemik. Lahir sebagai lembaga *ad hoc* dalam merespon krisis-krisis ekonomi tahun 1990an, namun menjadi sangat penting di dekade awal abad ke-21 dengan munculnya krisis finansial tahun 2007. Munculnya krisis ekonomi di Yunani yang berdampak sistemik ke beberapa negara di Eropa menjadikan forum *intergovernmental* ini semakin diperlukan. Pentingnya forum ini dalam mendiskusikan solusi bagi krisis ekonomi merupakan dasar argumentasi bagi institusionalisasi G-20, setidaknya dalam pengertian permanen.

- Beberapa responden mempertanyakan secara kritis legitimasi G-20 dan fokusnya eksesif terhadap reformasi struktural finansial daripada pada solusi terhadap dampak sosial dari krisis ekonomi. Beberapa melihat bahwa G-20 hanyalah sekedar alat negara-negara anggota G-7 untuk mempertahankan dominasinya dalam struktur ekonomi global. Beberapa responden peduli terhadap pembentukan G-20 yang dapat mengurangi fungsi kerjasama multilateral yang lebih legitimate seperti PBB. Beberapa responden tidak yakin terhadap komitmen serius untuk mereformasi institusi-institusi Bretton Woods.

Tentang peran Indonesia dalam proses G-20

- Responden sepakat bahwa keanggotaan dalam G-20 memiliki arti penting bagi Indonesia. Keanggotaannya pada forum yang sangat memiliki prestise memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk meningkatkan daya saingnya, yang penting untuk mempromosikan kepentingan nasional vitalnya.

- Kepentingan nasional Indonesia memiliki dimensi domestik dan global. Yang berdimensi domestik adalah meningkatan daya saing bangsa di tingkat internasional dan menjaga stabilitas ekonomi nasional yang tahan terhadap krisis global dan dampak sistemiknya. Menjadi anggota G-20 yang tujuan utamanya untuk mengatasi krisis ekonomi, Indonesia terbantu untuk menangani dampak krisis finansial pada perekonomian

nasional dan untuk membangun struktur ekonomi nasional yang tahan dari krisis serupa dimasa yang akan datang (jika terjadi). Yang berdimensi global adalah 'tanggung jawab Indonesia untuk turut menjaga ketertiban dunia sebagaimana diatur dalam konstitusi dan perundang-undangan nasional.

- Kepentingan Indonesia juga dapat dibedakan antara prakmatis dan simbolis. Kepentingan prakmatis Indonesia adalah cara efektif untuk mengatasi krisis ekonmi dan 'mengantisipasi krisis ekonomi;', kepentingan simbolis adalah meningkatkan citra Indonesia sebagai negara yang kooperatif dan akomodatif yang siap mengakomodasi bangsa-bangsa lain dalam arena internasional. Dalam kaitan ini, Indonesia menekankan karakteristiknya sebagai negara Muslim yang sedang mengkonsolidaikan demokrasinya. Pidato yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di berbagai kesempatan mengindikasikan kepentingan kuat Indonesia untuk membangun citra positif di mata komunitas internasional.

- Melihat pentingnya G-20 bagi kepentingan strategis Indonesia, pemerintah Indonesia mendukung penuh G-20. Indonesia telah mengusulkan beragam inisiatif seperti General Expenditure Support Fund dan telah aktif menjadi co-chairperson kelompok-kelompok kerja untuk mereformasi MDBs (2008-2009) dan anti korupsi (2009). Dalam kaitan ini sejumlah perwakilan asing di Jakarta mengapresiasi peran Indonesia dalam G-20.

- Indonesia telah melakukan upaya serius untuk memenuhi komitmennya pada G-20. Indonesia telah membuat penyesuaian terhadap kebijakan nasionalnya termasuk di sektor fiskal dan perbankan untuk memenuhi kerangka G-20 bagi pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan dan seimbang.

- Namun terdapat beberapa tantangan yang menghambat peningkatan peran Indonesia dalam proses G-20. Tantangan tersebut meliputi masalah-masalah dalam koordinasi antar kementrian, situasi politik yang penuh perubahan, pertanyaan akan pemahaman Indonesia

terhadap struktur finansial global yang komlek dan keraguan terhadap keanggotaan Indonesia dalam G-20.

- Beberapa responden mengemukakan kritik mereka terhadap sejauh mana Indoensia telah berupaya memenuhi komitmennya pada G-20. Ini tidak hanya pertanyaan menyangkut kompetensi Indonesia untuk membuat kebijakan strategis di tingkat nasional dalam kerangka G-20, tetapi juga isu kondisi-kondisi ekonomi dan politik yang mendukung penerapan komitmen G-20. Beberapa reformasi lembaga-lembaga domestik sangat penting sehingga Indonesia dapat menjadi anggota komunitas ekonomi terbuka dunia. Pemerintah Indonesia telah dikritik karena keengganannya untuk berdialog dengan LSM.

Keterwakilan ASEAN dalam G-20

- Pertanyaan bagaimana Indonesia dapat membawa ASEAN dalam G-20 cukuplah menantang. Ada beberapa keterbatasan yang terbukti menghambat Indoensia dalam memainkan perannya untuk "mewakili" ASEAN dalam G-20. Meskipun Indonesia adalah anggota pendiri ASEAN dan hanya anggota ASEAN dalam G-20, Indonesia tidak dapat mengklaim dirinya mewakili ASEAN dalam G-20.

- Keterbatasan lain terkait dengan cara anggota ASEAN mempersesikan pmbentukan G-20 sebagai forum utama kerjasama ekonomi internasional. Beberapa anggota terkemuka ASEAN telah menunjukkan kritik mereka secara formal menyangkut legitimasi G-20 dan tindakan-tindakan kolektif untuk menunjukkan kepedulian mereka pada PBB. Ini dapat mengindikasikan bahwa anggota-anggota ASEAN memilii pandangan yang berbeda terhadap G-20.

- Namun terdapat kesempatan yang dapat menciptakan kondisi yang tepat bagi Indoensia untuk memainkan peran strategis pada tingkat regional. ASEAN secara formal memberikan dukungan bagi peningkatan peran G-20 untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan dan seimbang seperti diindikasikan dalam pernyataan pemimpin-pemimpin ASEAN tentang Pemulihan dan Pembangunan yang berkelanjutan di ASEAN dalam KTT ke-16 di Hanoi bulan

April 2010. Anggota-anggota ASEAN telah bersepakat bahwa ASEAN seharusnya memberi kontribusi pada proses G-20.

- Sebuah kesempatan juga muncul dari cara anggota G-20 melihat pentingnya ASEAN dalam arena global. Tuan rumah KTT G-20 memahami bahwa partisipasi perwakilan ASEAN dalam KTT G-20 akan memperkuat legitimasi G-20 terkait dengan mandat global yang diklaimnya sendiri. Banyak pemimpin mengakui ASEAN sebagai satu dari organisasi-organisasi regional yang sangat berpengaruh.

- Ketua ASEAN dan Sekretaris Jenderal ASEAN secara langsung dan reguler menjadi pengamat dalam KTT G-20 sejak KTT di London. Pemimpin-pemimpin G-20 juga telah sepakat bahwa ASEAN seharusnya menjadi satu dari lima pengamat tetap dalam KTT-KTT G-20, di samping Uni Afrika dan negara-negara terpilih lainnya. Ini menciptakan kesempatan besar bagi Indonesia untuk mempromosikan kepentingan ASEAN dalam proses G-20.

- ASEAN perlu meyakinkan bahwa G-20 mempertimbangkan kepentingan-kepentingan anggota ASEAN dalam membuat komitmen-komitmen G-20. Pembentukan kelompok kontak ASEAN-G-20 merupakan langkah penting untuk meyakinkan bahwa suara ASEAN akan didengar oleh pemimpin-pemimpin G-20. Karenanya Indonesia sebagai satu-satunya anggota ASEAN dalam G-20 dapat berpartisipasi di semua tingkat dapat memberikan keuntungan bagi semua negara anggota ASEAN khususnya jika Indonesia mengakomodasi posisi negara-negara anggota ASEAN.

Tentang relevansi negara-negara Muslim yang diwakili dalam G-20

- Indonesia mengakui bahwa G-20 bukan hanya rumah ekonomi, tetapi juga rumah peradaban karena G-20 adalah forum yang mengakomodasi semua peradaban di dunia. Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar di dunia karenanya mempersepsikan bahwa keanggotaannya dalam G-20 berarti tidak saja untuk meningkatkan kepentingan ekonomi nasional tetapi juga mendemonstrasikan hubungannya dengan isu-isu identitas global.

- Namun penelitian ini menemukan terdapat keraguan terhadap isu Islam dalam G-20. Semua responden melihat bahwa isu Islam tidak memiliki relevansi dalam proses G-20. G-20 pada hakikatnya menekankan pada commonalitas yang menjadi kepedulian dan kepentingan negara-negara baik negara maju maupun berkembang. Para responden melihat bahwa baik negara Islam maupun sekuler memiliki kepentingan yang sama untuk membangun struktur finansial global yang dapat memfasilitas pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan dan seimbang. Pembedaan peradaban Muslim dari dunia Barat tidak sepenuhnya relevan dalam proses G-20. Konsepsi mewakili dunia Muslim karenanya tidak berdasar.

- Daripada membawa isu peradaban dalam G-20, Indonesia seharusnya mendorong Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk menunjukkan wajah Islam yang moderat dan bersahabat dan kesiapan mereka untuk mempromosikan kerjasama proaktif dengan negara-negara lain. Reformasi dalam masing-masing negara anggota OKI jelas dibutuhkan dan dalam hal ini, Indonesia dapat mendorong reformasi tersebut.

- Beberapa responden menyarankan bahwa terdapat isu aktual yang Indonesia, Turki dan Arab Saudi dapat bawa dalam proses G-20. Negara-negara tersebut bersama-sama dapat mensharingkan pengalaman mereka dalam menerapkan sistem perbankan dan keuangan Islamik. Sistem tersebut dapat bersifat komplementer dengan sistem konvensional yang berfungsi saat ini yang oleh pemimpin-pemimpin G-20 sedang diupayakan untuk direformasi sejak KTT di Washington. Namun rekomendasi ini seharusnya dikaji lebih mendalam oleh Indonesia dan dua negara Muslim lainnya sebelum diusulkan pada G-20.

Tentang peran LSM dalam G-20

- Kajian literatur menemukan peran potensial LSM yang dapat dimainkan dalam proses G-20 khususnya dalam mengangkat isu-isu yang terkait dengan dampak sosial dari krisis finansial. Namun demikian, peran aktual LSM dalam forum global masih terlihat minimal.

- LSM terbelah dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah LSM yagn mengakui bahwa G-20 dapat mempromosikan kepentingan-kepentingan masyarakat dan dapat mencapai pembangunan ekonomi yang seimbang baik di negara maju maupun negara-negara berkembang. Namun LSM ini menekankan beberapa kondisi yang sangat penting untuk menjamin bahwa G-20 dapat membawa mandat globalnya. Kelompok kedua melihat G-20 sebagai alat negara-negara kapitalis untuk memapankan hegemoni mereka dalam politik dan ekonomi global.

- Beragam pendekatan telah dipakai LSM untuk memainkan pengaruhnya dalam G-20. Pendekatan-pendekatan tersebut termasuk membuat pernyataan melalui media massa, kampanye untuk menunjukan penentangan terhadap G-20 dan berdemonstrasi. Beberapa LSM memanfaatkan cara-cara yang lebih moderat seperti membuat pertemuand engan pemerintah mereka dan delegasi pada KTT G-20. Pendekatan tersebut menunjukkan keseriusan LSM untuk terlibat dalam proses G-20 dan menekan pemimpin-pemimpin G-20 untuk mempertimbangkan masukan-masukan dari LSM.

- Sebagianbesarrespondenyangmewakililembaga-lembagapemerintahan mengingatkan bahwa G-20 adalah forum intergovernmental dan Masyarakat sipil tidak memiliki tempat secara formal dalam proses deliberasi dalam pertemuan-pertemuan pejabat senior, Kementrian, Sherpa dan KTT G-20. Namun mereka menyambut baik semua inisiatif utuk melibatkan masyarakat sipil dalam proses G-20. Sehingga seharusnya ada mekanisme untuk mengakomodasi keinginan LSM untuk berkontribusi dalam proses G-20.

- Sementara G-20 tidak memberikan tempat formal bagi LSM, beberapa tuan rumah KTT telah berinisiatif untuk menyelenggarakan pertemuan informal dengan LSM sebeluma tau sesudah KTT. Beberapa pemerintah secara individual melalukan konsultasi dengan LSM nasional untuk mengumpulkan pandangan yang dapat dibawa dalam pertemuan-pertemuan G-20. Pemerintah yang lain dan aktivis LSM membuat kesepakatan untuk mempublikasikan pernyataan bersama dalam

menanggapi isu-isu tertentu yang sedang dibicarakan dalam KTT.

- Inisiatif Korea Selatan untuk menyelenggarakan Civil G-20 sebelum KTT Seoul dilihat sebagai pendekatan baru untuk melibatkan LSM dalam proses G-20. Baik LSM dan perwakilan pemerintah mengakui pentingnya dialog tersebut, khususnya setelah G-20 memutuskan untuk memasukkan isu-isu non finansial seperti penciptaan lapangan kerja atau penanganan masalah-masalah pembangunan nasional. Namun terdapat kritik bahwa Civil G-20 bukanlah benar-benar dialog tetapi satu briefing satu arah oleh ketua-ketua Sherpa, di mana ketua-ketua Sherpa bahkan berbeda padnangan untuk menanggapi inisiatif LSM. Sehingga Civil G-20 harus dibuat lebih substansial.

Berdasarkan temuan tersebut beberapa rekomendasi dapat diusulkan untuk meningkatkan peran peran G-20 dalam membangun tata kelola global yang dapat membawa keuntungan bagi semua bangsa di dunia:

- Mekanisme konsultasi outreaching dengan non anggota G-20 perlu diformalkan oleh pemimpin-pemimpin G-20. Mekanisme strategis dan esensial adalah penting untuk menggali masukan-masukan dari non-anggota G-20 dan sekaligus untuk mensosialisasikan hasil-hasil pertemuan-pertemuan G-20. Mekanisme formal penting untuk memperkuat legitimasi G-20 sebagai suatu forum ekslusif yang membawa mandat global.
  Sejauh ini mekanisme outreaching sangat tergantung pada inisiatif tuan ruman KTT. Terdapat alasan kuat untuk mendorong setiap anggota G-20 dapat mengambil peran penting untuk melakukan perluasan konsultasi dengan negara-negara di kawasan baik secara bilateral maupun pertemuan-pertemuan yang dirancang khusus untuk menggali masukan dari non anggota G-20.
  Mekanisme yang mungkin adalah pendekatan regional dan interregional melalui pembentukan kelompok kontak regional dan kerjasama erat antara G-20 dan PBB dan organisasi-organisasi multilateral lainnya. Pendekatan ini memerlukan kontak formal dengan organisasi regional terkemuka yang ada saat ini seperti ASEAN, Uni Afrika dan Mercosur.
  Setiap anggota G-20 didorong untuk melakukan konsultasi dengan

unsur-unsur lembaga masyarakat sipil yang aktif dalam menangani isu relevan dengan agenda G-20 di masing-masing negara. Inisiatif pemerintah Korea untuk menyelenggarakan pertemuan dengan LSM dan media massa dalam forum formal harus dilihat sebagai langkah positif untuk memperluas partisipasi komponen-komponen masyarakat sipil. Tuan rumah KTT G-20 seharusnya menyelenggarakan pertemuan serupa dan membuat konsultasi menjadi lebih subtantif.

- Dalam jangka dekat, G-20 harus mampu membuktikan kompetensinya untuk mengatasi krisis-krisis ekonomi yang saat ini melanda negara-negara di dunia. Karenanya dalam jangka dekat dan menengah forum ini akan memfokuskan pada agenda penanganan krisis finansial melalui koordinasi kebijakan fiskal, kebijakan stimulus, dan penguatan institusi-institusi finansial internasional, dan kemudian pada agenda penyusunan strategi keluar dari krisis *(exit strategy)*.

  Namun fokus pada agenda finansial harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan seharusnya tidak menciptakan kerugian pada sektor lain (seperti lingkungan, energi) yang dampaknya harus ditanggung oleh negara non anggota ataupun generasi yang akan datang.

  Upaya penyelesaian krisis ekonomi juga harus menyentuh dampak sosial yang dirasakan luas masyarakat khususnya di negara-negara miskin. Indikator penyelesaian krisis ekonomi bukan hanya semata-mata pada kembalinya pertumbuhan ekonomi negara-negara maju dan berkembang tetapi juga penyediaan lapangan kerja, perbaikan hak-hak pekerja dan penguatan daya beli masyarakat yang luas. KTT G-20 seharusnya menetapkan rencana aksi yang jelas tentang bagaimana membantu negara-negara miskin untuk melanjutkan agenda pembangunan. KTT berikutnya di Perancis dan Meksiko seharusnya mengevaluasi kemajuan tentang isu-isu pembangunan dan memperkuat komitmen untuk menangani isu-isu tersebut secara lebih efektif.

  Dalam konteks isu pembangunan, LSM dapat berkontribusi secara positif terhadap agenda pembangunan G-20. G-20 dalam hal ini harus merespon masukan dari LSM yang menekankan pentingnya membantu

penduduk yang paling merasakan dampak krisis pada tingkat akar rumput. Untuk itu, LSM harus lebih terbuka pada proses G-20.

- Pemerintah negara-negara anggota G-20 seharusnya menyelenggarakan koordinasi antar kementrian menyusul KTT G-20 untuk mendiskusikan bagaimana menerapkan komitmen yang dibuat dalam KTT G-20 secara efektif. Ini penting jika G-20 ingin meyakinkan bahwa kesepakatan dan implementasi komitmen benar-benar menjawab kepentingan rakyat termasuk mereka yang paling dipengaruhi oleh krisis ekonomi.

- Kemitraan antara emerging economies dalam G-20 harus diperkuat. Terdapat alasan kuta bagi emerging economies untuk mengkoordinasikan posisi mereka dan bertindak searah sejalan untuk memperjuangkan kepentingan mereka dalam proses G-20. Ini penting untuk berbicara dalam satu suara dan mewakili kepentingan negara berkembang yang tidak dapat berpartisipasi dalam proses G-20. Kemitraan tersebut juga membantu G-20 menangani kritik yang menyebut G-20 hanyalah alat negara industry maju untuk mendominasi dunia.

Beberapa rekomendasi dapat diusulkan untuk meningkatkan peran Indoenia dalam proses G-20 sehingga Indonesia mendapatkan keuntungan dari partisipasi aktifnya dan meyakinkan bahwa G-20 juga memberi keuntungan yang sama bagi negara-negara berkembang.

- Pemerintah Indonesia perlu lebih perhatian dan konsisten dalam menjalankan agenda nasional di tengah-tengah keterlibatan aktifnya dalam forum internasional termasuk G-20 yang prestisius. Indonesia perlu memahami bahwa keanggotaannya dalam forum internasional tidak secara otomatis menjadi solusi bagi semua masalah nasional. Dalam kaitan ini, Indonesia perlu memahami masalah utama yang menghambat pembangunan nasional dan menemukan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apa yang ditangani oleh G-20 tidak selalu merefleksikan masalah inti Indonesia. Sehingga solusi yang ditawarkan forum global tidak selalu tepat untuk kasus Indonesia.

- Indonesia harus menyadari kewajibannya untuk mengartikulasikan

kepentingan nasionalnya terutama yang telah dipromosikan dalam kerjasama multilateral lain dan mengartikulasikan situasi bangsa-bangsa di negara-negara Selatan. Indonesia memerlukan asesmen menyeluruh dan integrative dalam mendefinisikan kepentingan dan tujuannya dalam cetak biru nasional.

- Komitmen Indonesia harus dibuktikan dengan kemampuannya untuk menerapkan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuatnya dalam forum G-20. Namun demikian, ini penting bagi Indonesia untuk memformulasikan cara-cara khusus untuk implementasi komitmen yang sesuai dengan tingkat domestik. Implementasi tersebut pertama-tama harus mengacu pada konstitusi nasional dan sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia yang telah diperjuangkan melalui forum-forum internasional lain seperti ASEAN, OECD dan WTO. Pemahaman menyeluruh atas implikasi komitmen G-20 di tingkat nasional sangat penting sehingga Indoensia dapat memaksimalkan keuntungan sebagai anggota G-20.

- Indonesia telah mengupayakan koordinasi yang efektif di antara kementrian dengan membentuk secretariat bersama. Sekretariat perlu melibatkan lembaga-lembaga yang relevan seperti Badan Fiskal dan kerjasama internasional Kementrian Keuangan, Bank Indonesia, Bappenas, Kementrian Perdagangan, Kementrian tenaga kerja dan Kementrian Luar negeri. Kementrian Luar Negeri dapat menjadi coordinator kerjasama antar kementrian; kementrian keuangan dapat melanjutkan perannya dalam memperjuangkan isu-isu ekonomi dalam G-20, tetap sangat penting untuk melakukan konsultasi dengan biro yang relevan dalam kementrian Luar Negeri. Ketua Sherpa G-20 Indonesia dapat memainkan peran memimpin dalam secretariat bersama tersebut.

- G-20 merupakan forum yang dihadiri oleh Kementrian Keuangan dan Gubernur Bank Sentral; namun demikian komitmen yang dibuat jelas bersifat dan berimplikasi multisektoral. Koordinasi konsultatif inter-kementrian perlu diperluas dengan dukungan dari koordinasi inter-komisi dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Selama ini mekanisme

konsultasi pemerintah dan DPR masih sangat sektoral dan karenanya berimplikasi parsial/kurang komprehensif: seperti Komisi I dan Kementrian Luar Negeri RI dalam isu-isu kerjasama luar negeri; Komisi VI dan Kementrian keuangan termasuk perihal partisipasi Indonesia dalam G-20; Komisi IX dan Kementrian Perdagangan. Fungsi Sekretariat Bersama akan membantu komisi-komisi dalam parlemen untuk lebih peduli terhadap perkembangan hubungan luar negeri yang bersifat multisektoral.

- Indonesia perlu lebih proaktif dalam mekanisme outreaching. Pemangku kepentingan pertama yang perlu dilibatkan adalah negara-negara non anggota G-20 di kawasan Asia Tenggara. Ini dapat dilakukan oleh kementrian luar negeri, Ketua Sherpa dan Sekretaris bersama melalui pertemuan-pertemuan debriefing atau melalui agenda formal pertemuan di ASEAN. Kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN dapat dimaksimalkan untuk mensinergikan promosi agenda nasional dan kepentingan regional dalam forum-forum global seperti G-20.

- Disamping konsultasi dengan negara-negara non anggota G-20 di kawasan, pemerintah Indonesia melalui Sekretariat Bersama dan Ketua Sherpa ataupun melalui Kementrian Keuangan, Kementrian Luar Negeri, Kementrian Perdagangan dan kementrian terkait lainnya perlu menjalin pertemuan konsultatif dengan lembaga-lembaga masyarakat sipil yang memiliki kepedulian pada masalah-masalah yang menjadi pusat perhatian G-20. Dialog tersebut dapat membantu mengembangkan disksui tentang isu-isu pembangunan dalam G-20 yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat akar rumput.

- Terdapat kebutuhan mendesak untuk membangun kelompok kontak pemerintah LSM untuk membawa LSM dalam G-20. Pembentukan kelompok kontak tersebut dapat memfasilitasi dialog antara pemerintah dan LSM. Inisiatif membentuk kelompok kontak dapat dibuat baik oleh pemerintah ataupun LSM atau keduanya. Ini dapat pula dimulai oleh akademisi. Sekali terbentuk, kelompok kontak nasional dapat mengambil bagian dalam Civil G-20 yang telah dimunculkan oleh pemerintah Korea Selatan.

- Reformasi birokasi diperlukan untuk membuat birokrasi lebih efektif dan efisien untuk mendukung kebijakan ekonomi yang terbuka seperti juga untuk menjamin berjalannya koordinasi kebijakan yang efektif, implementsi regulasi dan supervise sesuai dengan kerangka dan prinsip-prinsip G-20. Melalui reformasi ini, pelayanan satu pintu, misalnya, dapat dijalankan untuk menarik investor asing tanpa kekhawatiran oleh regulasi yang tidak menentu dan lembaga-lembaga yang tumpang tindih.

Beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk membawa ASEAN dalam G-20 sehingga G-20 dapat memberikan keuntungan bagi semua anggota ASEAN.

- Kelompok kontak ASEAN perlu memaksimalkan fungsinya. Kelompok ini penting untuk mempertahannkan kepentingan ASEAN dalam proses G-20. Ini dapat menjadi mekanisme konsultatif yang efektif bagi G-20 dan jug abagi ASEAN untuk membangun kepentingan bersama dan untuk menjamin bahwa tidak ada komitmen yang dibuat dalam G-20 akan bertentangan denagn kebijakan ASEAN untuk memajukan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

- Untuk mendukung fungsi kelompok kontak ASEAN-G-20, pertemuan antar menteri keuangan ASEAN perlu mendiskusikan isu-isu yang sedang menjadi pusat perhatian G-20. Ini penting untuk membuat partisipasi Ketua ASEAN lebih bermakna potensial bukan sekedar simbolik semata. Ketua ASEAN dapat mengemukakan posisi bersama ASEAN dalam KTT G-20.

- Sebagai anggota tetap G-20, Indonesia perlu berkoordinasi era dengan Ketua ASEAN sebelum KTT G-20. Bersama-sama dengan ketua ASEAN, Indonesia bertanggungjawab untuk meyakinkankan bahwa komitmen-komitmen dalam G-20 mencerminkan kepentingan ASEAN dan tidak menghambat komitmen ASEAN untuk memajukan integrasi regional.

- Peran Indonesia dalam G-20 dan ASEAN dapat ditingkatkan saat Indonesia menjadi Ketua ASEAN di tahun 2011. Ini akan menjadi suatu peran unik bagi Indonesia karena akan menjembatani kerjasama

regional dan global. Pertama-tama harus ada ruang bagi kompromi di antara agenda nasional, kepentingan regional dan mandat global G-20. Agenda pembangunan dapat menjadi titi temu di antara isu-isu yang berkembang, yang ASEAN dan G-20 seharusnya berkonsentrasi di tahun-tahun mendatang. Kelangkaan pangan, kesempatan kerja yang hilang, gizi buruk dan sanitasi yang buruk, jebakan hutang dan isu-isu pembangunan lainnya dapat terus menghantui negara-negara berkemabng dan ini mengingatkan bahwa bangsa-bangsa Selatan mungkin tidak dapat memenuhi target Millennium Development Goals (MDGs) seperti yang ditargetkan pada tahun 2015.

Beberapa rekomendasi dapat diajukan terkait dengan dunia Muslim:

- Indonesia perlu mengetahui bahwa fakta pembagian dunia Barat edan Islam atau peradaban-peradaban lain tidak relevan dalam G-20. Ini harus diakui bahwa G-20 tidak hanya forum di mana berbagai peradaban bertemu. Dengan menyoroti peran G-20 sebagai rumah peradaban, Indonesia justru dapat mengurangi peran PBB yang keanggotaannya justru lebih beragam dalam pengertian politik, sosio-kultural dan ideologis sebagaimana juga dalam bidang ekonomi.

- Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya dalam G-20 dapat membuat kajian mendasar terhadap sistem keuangan dan perbankan Islam sebagai pelengkap dari sistem konvensional yang ada. Diakui bahwa G-20 telah berupaya untuk merestrukturisasi sistem finansial dan perbankan konvensional dalam upaya membuatnya lebih kuat dan tahan terhadap krisis ekonomi. Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya perlu membuktikan efektivitas sistem tersebut dalam merespon krisis dan dalam membawa kemaslahatan bagi seluruh bangsa.

Beberapa rekomendasi dapat diusulkan untuk mempromosikan peran LSM dalam proses G-20 sehingga G-20 dapat lebih memberi keuntungan bagi seluruh masyarakat di dunia.

- Sangatlah penting bahwa pemerintah Indonesia dan pemerintah negara-negara anggota G-20 untuk menyambut baik pertemuan

konsultatif yang melibatkan LSM melalui kelompok kontak formal pemerintah-LSM. Kelompok kontak tersebut dapat berfungsi sebagai saluran untuk berkomunikasi dengan pemerintah. Pertemuan tersebut dapat mempromosikan pemahaman bersama tentang isu-isu besar G-20 dan posisi pemerintah terkait dengan isu-isu tersebut. Dalam hal ini pemerintah, LSM dan lembaga-lembaga riset dapt memformulasikan rekomendasi yang mendasar bagi G-20.

- Pembentukan kelompok kontak pemerintah dan LSM tidak akan mungkin jika LSM tidak bersikap moderat dan mengedepankan pandangan objektif, dan cederung bersikap oposisi yang radikal terhadap kebijakan pemerintah dan peran G-20. LSM dapat mengubah citra mereka dari kritik keras terhadap pemerintah dengan membangun kesepahaman tentang isu-isu pembangunan. Citra positif dapat membantu pemerintah untuk menyambut dialog yang konstruktif dengan LSM. Daripada menentang peran pemerintah dalam G-20, LSM dapat memberikan kontribusi yang positif untuk membantu pemerintah mendapatkan keuntungan maksimal dari keanggotaannya dalam G-20.

- LSM seharusnya memiliki visi yang jelas dengan dukungan kajian empirik yang kuat untuk mendukung rekomendasi mereka kepada pemerintah nasional dan G-20. LSM juga perlu membangun jaringan yang efektif di antara mereka dan saluran yang dapat dipercaya untuk berkomunikasi dengan pemerintah. Jaringan tersebut akan menyatukan suara-suara LSM terhadap agenda tertentu dan dapat membantu negara-negara berkemabgn untuk mencapai MDGs. Pendekatan ini dapat memperbaiki citra LSM yang dilihat terbelah dan lebih tertarik untuk mengedepankan program-program dan aktivitas mereka masing-masing.

- Civil G-20 yang telah dibentuk pemerintah Korea sebelum KTT G-20 di Seoul dan juga inisiatif lainnya untuk menyelenggarakan pertemuan konsultatif degnan masyarakat sipil dan media massa harus dilanjutkan dan dibuat lebih substantive. Harus ada mekanisme untuk meyakinkan bahwa pandangan LSM dan jurnalis dilihat secara positif oleh pemimpin-pemimpin G-20 dalam KTT mereka. Tuan rumah KTT-KTT

berikutnya (Perancis dan Meksiko) seharusnya menerima pertemuan konsultatif dengan LSM dan media sebagai kontribusi positif terhadap penguatan peran G-20. Untuk membuat dialog antara G-20 dan LSM substansial, pertemuan-pertemuan tersebut harus diselenggarakan jauh sebelum KTT dilaksanakan. Harus ada ruang yang lebih besar bagi LSM untuk mengemukakan usulan-usulan mereka dan bagi ketua-ketua Sherpa G-20 untuk menanggapinya sehingga forum LSM-G-20 tidak akan berlangsung satu arah tetapi dapat menarik kesimpulan yang konstruktif untuk kemudian dibawa dalam pertemuan tingkat KTT.

Referensi

Literatur (buku, artikel, opini)

Alagappa, Muthiah (2004). *Civil Society and Political Change in Asia: Expanding and Contracting Democratic Space.* Stanford: Stanford University Press.

Cable, Vincent (1999). *Globalization and Global Governance.* London: Pinter

Cox, Caroline dan Marks, John. (2003). *The 'West', Islam and Islamism*. London: Cromwell Press.

Colas, Alejandro. (2002). *International Civil Society. Social Movements in World Politics.* Cambridge: Polity.

Elisabeth, Adriana (2008). *"Kecenderungan dan Tantangan Globalisasi Ekonomi terhadap Politik Luar Negeri Indonesia" in Ganewati Wuryandari (ed.), Perkembangan Politik Internasional dan Pengaruhnya terhadap Politik Luar Negeri Indonesia,* Jakarta: LIPI Press.

Fues, Thomas dan Wolf, Peter (eds). (2010). *G-20 and Global Development.* Bonn: DIE.

Gero, Pieter P. (2010). *"Hambatan Utama pada Sang Pemimpin", Kompas,* July 30, 2010.

Hadiwinata, Bob Sugeng. (2003) *The Politics of NGOs in Indonesia: Developing Democracy and Managing a Movement*. 2003. London and New York: Routledge Curzon.

Hermawan, Y.P (2009). "Global Governance or 'Global Clubbing': Can an exclusive club deliver benefits for all nations," conference paper, presented at the 8th FES-SWP *Dialogue on Global Governance for Global Market: Moving beyond G8?* Berlin June 17, 2009.

Hermawan, YP. (2010). "Formalizing the G20 outreaching contact groups and Civil G20", in Fues, Thomas and Wolf, Peter (eds). *G-20 and Global Development.* Bonn: DIE.

Hidayati, Nur (2009).*"Presiden Yudhoyono Berceramah di LSE", Kompas*, April 2009.

Hudkinson, VA. dan Sumariwalla, RD. (1992). "The Nonprofit Sector and the New Global Community. Issues and Challenges," In K.D. McCarthy, V.A. Hodgkinson and R. D Wumariwalla and Associates (eds.). *The*

Nonprofit Sector in the Global Community: Voices from Many Nations. San Fransisco: Jossey-Bass.

Lechner, Frank J. dan Boli, John (eds.) (2000). *The Globalization, Reader.* Massachusetts, MA dan Oxford: Blackwell.

Karns, Margaret P dan Mingst, Karen A (2004) *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance.* Boulder, Co: Lynne Rienner Publisher

Kegley, Jr. Charles W. dan Eugene R. Wittkopf, Eugene R. (2004). *World Politics: Trends & Transformation. Belmont:* Thompson-Wadsworth

Keohane, Robert .O (2002) *Power and Governance in A Partially Globalized World.* London: Routlegde.

Scholte, Jan Art (2000) *Globalization: A Critical Introduction*. New York: St. Martin's Press.

Seligman, Adam B. (1992) *The Idea of Civil Society.* New Jersey: Princeton University Press.

Simarmata, Henry Thomas, (2010) "A note to the event of Focus Group Discussion and Workshop, G-20 and Development Agenda: Formulating Recommendations for G-20 Summit in Seoul, Korea"– Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Indonesian Office & Department of International Relations, Catholic Parahyangan University (UNPAR) / –Gran Melia, November 4, 2010.

Soesastro, Hadi, (2008), "Policy Responses in East Asia to the Global Financial Crisis", Background Paper prepared for Indonesia's Participation in the G-20 Summit, Washington D.C., November 15, 2008. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.

Utomo, Heru. (2009) "The role of Indonesia in ASEAN." *Koran Jakarta.* September 2, 2009

Dokumen (Deklarasi, laporan kemajuan, pernyataan bersama, pernyataan pers)

Dokumen G-20:

The G-20 Seoul Summit Leaders' Declaration, November 11-12, 2010.

The G-20 communique, Meeting of Finance Ministers and Central Bank Governeors, Busan, Republic of Korea, June 5, 2010.

The G-20 Toronto Summit Declaration, June 26-27, 2010.
Communiqué - UK, November 7, 2009.
Progress report on the Economic and Financial Actions of the London, Washington and Pittsburgh G-20 Summits, prepared by the UK Chair of the G-20, St, Andrews, November 7, 2009.
Leaders' statement, the Pittsburgh Summit, September 25, 2009.
Progress report on the Actions to promote Financial Regulatory Reform issued by the US Chair of the Pittsburgh G-20 Summit – September 25, 2009.
Communiqué - UK, September 5, 2009.
Declaration on further steps to strengthen the financial system, September 5, 2009.
Progress report on the actions of the London and Washington G20 Summits, September 5, 2009.
Leaders Statement The Global Plan for Recovery and Reform - London, 2 April 2, 2009.
Declaration on strengthening the financial system - London, April 2, 2009.
Declaration on delivering resources through the international financial institutions - London, April 2, 2009
Progress Report on the actions of the Washington Action Plan, April 2, 2009
Communiqué UK, March 14, 2009
Communiqué Annex - Restoring lending: a framework for financial repair and recovery, March 14, 2009
Progress report on the immediate actions of the Washington Action Plan prepared by the UK Chair of the G20, March 14, 2009
Declaration Washington, USA, November 15, 2008
G-20, Declaration, Summit on Financial Markets and the world economy, November 15, 2008
Communiqué São Paulo, Brazil, November 8 – 9, 2008
Communiqué Kleinmond, Cape Town, South Africa, November 17 – 18, 2007
Communiqué Melbourne, Australia, November 18-19, 2006
Communiqué Xianghe, Hebei, China, October 15-16, 2005
Communiqué Berlin, Germany, 20 - 21 November 20-21, 2004
Communiqué Morelia, Mexico, 26 - 27 October 26-17, 2003
Communiqué New Delhi, India, November 23, 2002
Communiqué Ottawa, Canada, November 16-17, 2001

Communiqué Montréal, Canada, 25 October 25, 2000
Communiqué Berlin, Germany, December 15-16, 1999

Dokumen lain:

Genesis of L-20 Project

Law 37 Year 1999 on Foreign Relations, Republic of Indonesia.

Letter dated March 11, 2010 from the Permanent Representative of Singapore to the United Nations Addressed to the Secretary-General, Sixty-Fourth session, agenda item 51 (b), Macroeconomic policy questions: international financial system and development.

Pidato Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono "Towards Harmony Among Civilizations" in Harvard University, (available at: http://embassyofindonesia.it/towards-harmony-among-civilizations-speech-by-sby-at-the-john-f-kennedy-school-of-government-harvard-university/)

Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam memperingati 65 tahun kemerdekaan Republik Indonesia 16 Augustus 2010.

Pidato Susilo Bambang Yudhoyono, "Indonesia and America: 1 21th Century Partnership", pada USINDO Luncheon, Washington, 14 November 2008.

Press Release, Kementrian Luar Negeri, Republik Indonesia. "Curah Gagasan: Indonesia dan arah ke Depan G-20 Pasca Krisis Ekonomi Global" di Yogyakarta 11-12 Maret 2010. (tersedia di: http://202.148.132.171/econ/2006/WEF%20press%20release%20on%20indonesia.pdf)

The World Economic Forum Press Release "Indonesia Leaps 19 Places to 50th Rank in the World Economic Forum's 2006 Global Competitiveness Index".

Press Release, Kementrian Keuangan Republik Indonesia: *"G-20 Mendukung Usulan Indonesia tentang Mekanisme Dukungan Pembangunan bagi Negara-Negara Berkembang dalam Mengatasi Dampak Krisis Keuangan Internasional".*

Press Release, Kementrian Keuangan Republik Indonesia *"Mengatasi Dampak Krisis Global Melalui Program Stimulus Fiskal APBN 2009".*

Speech delivered by Sri Mulyani, Mentri Keuangan Republik Indonesia, "*Mengatasi Krisis Global melalui Stimulus Fiskal 2009*" di Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 27 Januari 2009.

Reformasi Sektor Keuangan Global, Progress Report Agustus 2010 (Untuk Humas), "Global Financial Sector Reform, Progress Report August 2010 (for Human relations), Bank of Indonesia, Jakarta: 2010".

Pidato Dr. Darmin Nasution, Gobernur, Bank Indonesia, "*Menata dan Memperkuat Perbankan Indonesia, Menyongsong Pemulihan Ekonomi Global*".

Press Release: Secretary-General of ASEAN to attend G-20 Summit in London – ASEAN Secretariat, 6 Maret 2009.

Joint Statement from First ASEAN-U.S. Leaders' Meeting. (tersedia di: http://www.america.gov/st/texttrans-english/2009/November/20091116162427xjsnommis0.2769281.html&distid=ucs#ixzz0uWUFtnrZ).

Chairman's Statement of the 15th ASEAN Summit -- "Enhancing Connectivity, Empowering Peoples". (tersedia di: http://www.15thaseansummit-th.org/PDF/2402Chairman%27sStatementofthe15thASEANSummit _final_with_logo.pdf)

Chairman's Statement of the 15th ASEAN Summit -- "Enhancing Connectivity, Empowering Peoples". (tersedia di: http://www.15thaseansummit-th.org/PDF/24-02Chairman%27sStatementofthe15thASEANSummit _final_with_logo.pdf)

Remarks by Prime Minister Nguyen Tan Dung, Chair of ASEAN, at the G-20 Toronto Summit Opening Plenary Session. Toronto, Canada – June 27, 2010. (tersedia di: http://www.aseansec.org/24828.htm).

Remarks by Minister for Foreign Affairs George Yeo in Parliament during Committee Of Supply Debate on 5 March 2010. (tersedia di: http://www.isria.com/pages/6_March_2010_12.php.)

Chairman's Statement of the 15th ASEAN Summit -- "Enhancing Connectivity, Empowering Peoples". (tersedia di: http://www.15thaseansummit-th.org/PDF/24-02Chairman%27sStatementofthe15thASEANSummit_final_with_logo.pdf.)

"The growing importance of Islamic finance in the global financial system", Pidato Malcolm D Knight, General Manager, Bank for International Settlement, disampaikan pada the 2nd Islamic Financial Services Board Forum, Frankfurt, December 6, 2007, (tersedia di: http://www.

bis.org/speeches/sp071210.htm).

Situs Internet

http://www.g20.org
http://econ.worldbank.org/
http://www.deplu.go.id
http://www.mfa.gov.sg/
http://www.15thaseansummit-th.org
http://www.bis.org
http://www.america.gov
http://www.g20.utoronto.ca
http://www.isria.com
http://www.indonesia.cz
http://embassyofindonesia.it
http://www.datastatistik-indonesia.com
http://www.suarakarya-online.com
http://www.bakonhumas.depkominfo.go.id
https://www.cia.gov.
http://www.aseansec.org.
http://news.bbc.co.uk.
http://www.mercosur.int
http://nationstudies.us/indonesia/98.htm
http://www.koran-jakarta.com
http://hdr.undp.org
http://asean2010.vn/asean_en/news/46/2DA86C/ASEAN-LEADERS-STATEMENT-ON-SUSTAINED-RECOVERY-AND-DEVELOPMENT.
http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/FactSheet3TheG20EN
http://eng.caexpo.org
http://www.straitstimes.com.
http://english.cri.cn/6966/2010/06/22/167s578525.htm.
http://www.thejakartapost.com.
http://www.presidensby.info.
http://www.kbri-islamabad.go.id.
http://www.mediaindonesia.com
http://www.beritabaru.com.

http://www.antaranews.com.
http://www.economicsummits.info/2009/10/global-and-regional-governance-the-asean-g20-link/
http://www.cnn.com
http://www.gtz.de
http://old.thejakartapost.com
http://www.theunity.org
http://www.oic-oci.org
http://indonesian.irib.ir
http://www.sherpatimes.com
http://www.satudunia.net
http://melampauipemilu.com/statement-infid-terhadap-pertemuan-g20/
http://tabloiddiplomasi.com.
http://www.choike.org.
http://www.amnesty.org
http://www.halifaxinitiative.org.
http://www.g7.utoronto.ca.
http://uk.reuters.com.
http://www.republika.co.id.
http://therealg8g20.com
http://www.londonsummit.gov.uk.
http://www.theglobeandmail.com.
http://southasia.oneworld.net.
http://www.republika.co.id.
http://www.korea.net
http://www.detiknews.com
http://ww.guardian.co.uk

Profil

Dr. Yulius Purwadi Hermawan

Dr. Yulius Purwadi Hermawan telah menjadi dosen di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional sejak April 1993. Dia memperoleh gelar Sarjana dalam Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada, gelar MA dari Monash University dan gelar doktor dari Leeds University, Inggris. Dia saat ini mengajar Organisasi Internasional, Hubungan Internasional di Eropa untuk tingkat S-1; Organisasi dan Hukum Internasional, Ekonomi Politik Demokrasi dan Manajemen dan Resolusi Konflik untuk tingkat S-2.

Sejak tahun 2000 Purwadi telah memiliki ketertarikan dalam program dan aktivitas organisasi internasional dalam mempromosikan demokrasi dan tata kelola global (global governance). Dia telah terlibat dalam aktivitas NGO Internasional dalam program peningkatan kapasitas politik dan integrasi yang dirancang khususnya bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka sejak tahun 2006. Ketertarikan riset meliputi Indonesia dan Institusionalisasi G-20, Struktur Sosial Masyarakat Global, dan integrasi ASEAN. Dia menjadi editor buku Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Isu, Aktor dan Metodologi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007); Membangun Demokrasi, Perdamaian, Keadilan dan Kesejahteraan (Jakarta: FES, 2009) dan co-author dengan Gordon Crawford, "Whose Agenda? "Partnership" and International Assistance to Democratization and Governance Reform in Indonesia" (Contemporary Southeast Asia, 24, 2, August 2002); dan kontributor buku Democracy in Indonesia: Challenges of Consolidation (diedit oleh Bob Sugeng Hadiwinata & Christoph Schuck, Baden-Baden: Nomos, 2007).

Wulani Sriyuliani, SIP

Wulani Sriyuliani memperoleh gelar Sarjana dalam Hubungan Internasional dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2009. Saat ini aktif dalam beberapa organisasi komunitas dan sosial dan bekerja di Yayasan AKATIGA

yang fokus pada riset sosial tentang masalah-masalah pedesaan dan perkotaan termasuk isu tanah, perburuhan, kewirausahaan kecil dan mikro dan gerakan sosial. Wulani saat ini sedang menempuh studi S-2 di Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Padjajaran, Bandung.

Selama masa studinya di Unpar, dia aktif dalam mengorganisir kegiatan-kegiatan kemahasiswaan seperti menjadi ketua lomba karya tulis nasional tahun 2008 dan ketua editor Sentris, jurnal akademik mahasiswa (2007-2008).

Getruida H. Hardjowijono, S.IP

Getruida H. Hardjowijono, biasa dipanggil Trudy, belajar di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) dan telah lulus pada tahun 2009. Saat ini bekerja di ASEAN Centre for Energy.

Ketertarikannya dengan politik luar negeri Indonesia dan diplomasi mendorongnya untuk menulis tesis berjudul, Diplomasi Indonesia dalam meningkatkan citra di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2008). Ketertarikannya yang lain adalah pada psikologi politik dan politik Indonesia.

Selama belajar di Unpar, Trudy aktif dalam banyak kegiatan kemahasiswaan. Di antaranya dia pernah menjadi Presiden International Relations English Club (IREC) dan ketua panitia Parahyangan Model of the United Nations (PMUN) di tahun 2008. Saat ini juga aktif sebagai bendahara Ikatan Alumni Unpar untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dand Bekasi (2009-2012). Dalam waktu senggang, Trudy menyukai membaca, melakukan perjalanan dan bermain softball.

Sylvie Tanaga, S.IP

Sylvie Tanaga adalah lulusan Jurusan Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Setelah lulus, dia bekerja sebagai editor majalah Suara Baru yang dikelola oleh Perhimpunan Indonesia-Tionghoa (INTI) yang memiliki cabang di seluruh wilayaha di Indonesia. Saat ini Sylvie menjadi penulis biography freelance, editor majalah TravelWan dan aktivis NGO.

Sylvie baru saja menyelesaikan biografi Agus Supangat, peneliti Indonesia yang pertama menginjakan kaki di benua Antartika; biografi tersebut akan dipublikasikan. Sylvie telah melakukan interview dengan 30 tokoh Tionghoa yang pandangan-pandangan dan perannya diakui secara internasional; wawancara tersebut telah dikompilasi dalam bentuk buku yang sedang dalam proses publikasi. Sylvie saat ini sedang menulis sebuah buku yang mengumpulkan biografi singkat enam musisi Asia termasuk dua musisi Jazz Indonesia, Alvin Lubis dan Indra Azis.

Sylvie memiliki ketertarikan dalam bidang NGO dan perannya dalam pemberdayaan masyarakat, dan juga isu-isu sosial budaya dan demokrasi. Sejak tahun 2009, Sylvie bergabung dengan doctorSHARE (Yayasan Dokter Peduli), sebuah NGO yang memiliki kepedulian serius terhadap pengentasan malnutrisi. NO tersebut telah membangun Theurapeutic Feeding Centre di Kei, Maluku Tenggara dan bekerjasama dengan Care Channels Indonesia membangun Community Feeding Centre untuk anak-anak di Semper, Jakarta Timur. NGO tersebut telah terlibat aktif pula dalam pelayanan kesehatan gratis di berbagai tempat di Indonesia.

Sylvie telah menulis dan mempublikasikan berbagai opini di media massa cetak dan elektronik. Beberapa publikasi dapat di akses di http://sylvietanaga.wordpress.com/.

Mempromosikan Demokrasi Sosial dan Pemahaman Internasional

Selama lebih dari 30 tahun, Friedrich-Ebert-Stiftung telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan damai dan stabil dan pendalaman pemahaman antara Jerman, Eropa dan Asia. Dampak dari krisis local dan regional terhadap situasi global merupakan kepentingan dari negara-negara Eropa, termasuk Jerman.

Fokus dari kinerja FES di Asia Selatan, Tenggara dan Timur berpusat pada promosi pembangunan demokratis dan dimensi social dari pembangunan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, dialog internasional telah menjadi semakin penting dalam kinerja FES di kawasan Asia, samapentingnyadengan dialog antara Asia danEropadan di dalam isu-isu pencegahan konflik.

Friedrich-Ebert-Stiftung memiliki 14 kantor perwakilan di Asia Selatan, Tenggara dan Timur, dan sebuah kantor perwakilan di Singapura untuk menangani isu-isu dalam kawasan. Sejumlah 18 orang pegawai asing dan lebih dari 100 pegawai local bekerja di sana. Dalam melaksanakan kegiatannya, FES bekerja sama dengan sejumlah lembaga pemerintah, kota, serikat pekerja, partai politik, gerakan sosial, LSM, media dan lembaga-lembaga ilmiah, sertaorganisasi-organisasiinternasional.

Friedrich-Ebert-Stiftung di Indonesia

Friedrich-Ebert-Stiftung mendirikan kantor perwakilan Indonesia pada tahun 1968. Terutama sejak 1998, FES Indonesia telah menjalankan berbagai kegiatan untuk mendukung proses demokratisasi dan pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia.

Cakupan isu yang kami tangani antara lain ialah demokratisasi, good governance, reformasi di bidang hukum, perlindungan hak azasi manusia, pencegahan dan resolusi konflik, reformasi sector keamanan, dukungan kepada media yang bebas dan berimbang, sertaisu-isusosial, ketenagakerjaan, dangender. Sejak 2006, FES Indonesia juga ikut dalam proses perdamaiandandemokratisasi di Aceh.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerjasama dengan instansi pemerintah terkait dan berbagai lembaga swadaya masyarakat. Bentuk kerja sama itu terjalind alam bentuk seminar, lokakarya, diskusi, pelatihan, dan publikasi. FES Indonesia juga mendukung dialog internasional dengan mengirimkan berbagai delegasi, tenaga ahli, akademisi, danjurnalis senior sebagaipeserta di forum regional daninternasional. Secara berkala FES juga mengundang ahli-ahli dari Jerman dan negara-negara lain untuk memberikan presentasi di Indonesia.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Kantor Perwakilan Indonesia
Jl. Kemang Selatan II No. 2A
Jakarta Selatan 12730
DKI Jakarta - Indonesia
Tel. +62 (0)21 7193 711
Fax +62 (0)21 7179 1358
E-mail:info@fes.or.id.